

# **MR. SARTONO**

**Karya dan Pengabdianya**



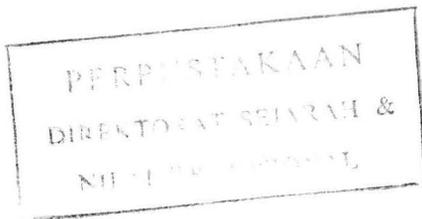
Oleh  
Nyak Wali A.T.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASION  
JAKARTA  
1985

Milik Depdikbud  
Tidak diperdagangkan

**MR. SARTONO**

**Karya dan Pengabdiannya**



Oleh  
Nyak Wali A.T.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL  
JAKARTA  
1985

REKAPITULASI DATA

Nama : Indri : 303 / 1989  
Tanggal terima :  
Tanggal jatuh : 4-9-09  
Belif/ada/da/ada : 1DSN  
Nomor buku :  
Kopi ke :

Penyunting :

Abdurachman Surjomihardjo

R Z. Leirissa, MA.

M. Soenjata Kartadarmadja

**Gambar kulit oleh :**

M.S. Karta.

## **SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Agustus 1985  
Direktur Jenderal Kebudayaan,



Prof. Dr. Haryati Soebadio  
NIP. 130119123

## KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional merupakan salah satu proyek dalam lingkungan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang antara lain mengerjakan penulisan biografi tokoh yang telah berjasa dalam masyarakat.

Adapun pengertian "tokoh" dalam naskah ini ialah seseorang yang telah berjasa atau berprestasi di dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan, pengabdian, ilmu pengetahuan, keolahragaan dan seni budaya nasional di Indonesia.

Dasar pemikiran penulisan biografi tokoh ini ialah, bahwa arah pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan nasional tidak hanya mengejar kemajuan lahir, melainkan juga mengejar kepuasan batin, dengan membina keselarasan dan keseimbangan antara keduanya.

Tujuan penulisan ini khususnya juga untuk merangsang dan membina pembangunan nasional budaya yang bertujuan menimbulkan perubahan yang membina serta meningkatkan

mutu kehidupan yang bernilai tinggi berdasarkan Pancasila, dan membina serta memperkuat rasa harga diri, kebanggaan nasional, dan kepribadian bangsa.

Jakarta, Agustus 1985  
Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi  
Sejarah Nasional

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN .  | iii     |
| KATA PENGANTAR . . . . .   | v       |
| DAFTAR ISI . . . . .   | vii     |
| PENDAHULUAN . . . . .  | 1       |
| Bab I Asal-usul dan Pendidikan Pertama . . . . .   | 4       |
| Bab II Bersekolah di <i>Rechts School</i> dan Kegiatan Sosial . . . . .                  | 13      |
| Bab III. Sartono Sebagai Mahasiswa di Leiden dan Masuk Perkumpulan . . . . .             | 22      |
| Bab IV. Mr. Sartono Sebagai Pengacara, Aktif Dalam Kegiatan Politik dan Sosial . . . . . | 38      |
| 4.1 Sebagai Pengacara . . . . .  | 38      |
| 4.2 Kegiatan Dalam Bidang Politik . . . . .  | 40      |
| 4.2.1 Kongres PNI . . . . .  | 44      |
| 4.2.2 PNI dan PPPKI . . . . .  | 52      |
| 4.2.3 PNI dan Pergerakan Pemuda . . . . .  | 56      |
| 4.2.4 PNI dan Sumpah Pemuda . . . . .  | 58      |
| 4.3 Kegiatan Dalam Bidang Sosial . . . . .   | 59      |
| 4.3.1 Ide-ide Keadilan Sosial . . . . .  | 62      |

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| 4.3.2                      | PNI dan Pendidikan Nasional .....   | 65         |
| 4.3.3                      | PNI Dibubarkan .....  | 68         |
| 4.4                        | Mr. Sartono Mendirikan Partindo .....                                       | 70         |
| <b>Bab V</b>               | <b>Tuduhan dan Pembelaan Perkara PNI oleh Sartono dan Kawan-kawan .....</b> | <b>76</b>  |
| 5.1                        | Tuduhan dan Penangkapan .....   | 76         |
| 5.2                        | Pembelaan Mr. Sartono .....   | 81         |
| <b>Bab VI</b>              | <b>Mr. Sartono Berjuang dan Mengisi Kemerdekaan .....</b>                   | <b>96</b>  |
| 6.1                        | Berjuang dan Aktif Berpolitik .....   | 96         |
| 6.2                        | Mengabdikan dan Mengisi Kemerdekaan .....                                   | 106        |
| <b>PENUTUP .....</b>       |   | <b>112</b> |
| <b>DAFTAR SUMBER .....</b> |   | <b>116</b> |

## PENDAHULUAN

Lahan dan lingkungan turut menempa kelahiran seorang tokoh. Kehadiran seorang tokoh mengundang banyak masalah dan tantangan. Masalah dan tantangan akhirnya melahirkan jawaban, baik bersifat individu maupun kelompok masyarakat.

Bila jawaban lahir dari seseorang, pertanda adanya kehadiran seorang pejuang. Kehadiran profil Sartono ke dunia ini dituntut untuk menimba ilmu dan jawaban. Menimba ilmu dan jawaban dalam bidang sosial, politik dan bidang-bidang lainnya. Hal seperti tersebut telah dilakukan oleh Sartono, walaupun ia menempuh jalan pengorbanan, penderitaan dalam menghadapi segala rintangan dan kesulitan. Mungkin ini semua telah kita lupakan jawabannya.

Sartono adalah salah seorang profil dari beberapa tokoh yang ikut terlibat dalam pembelaan bangsa dan Negara Indonesia dari cengkraman penjajah. Sartono sempat berpredikat *Meester in de rechten* atau "Mr" dari Fakultas Hukum Universitas Leiden, Negeri Belanda dalam usia kurang lebih 25 tahun.

Mr. Sartono dalam hidup dan kehidupannya selalu siap menjawab tantangan, akibat bangsa Indonesia yang tenggelam dalam kebodohan jauh sebelum zamannya. Itu semua merupakan makanan empuk bagi Mr. Sartono. Mr. Sartono telah di-tempa untuk itu oleh lahan dan lingkungannya.

Tentu tidak asing bagi kita semua, Sartono sebagai mahasiswa di Negeri Belanda, turut aktif menjadi sekretaris Perhimpunan Indonesia. Setelah kembali di Indonesia, pada tanggal 4 Juli 1927, bersama Bung Karno ia termasuk salah seorang pendiri Partai Nasional Indonesia (PNI), dengan ketuanya yang pertama Bung Karno sendiri.

Dalam tahun 1930 Mr. Sartono bertindak sebagai salah seorang pembela Bung Karno (Presiden pertama RI) yang dijebloskan ke dalam penjara oleh Pemerintah Penjajah Belanda. Perjuangan Mr. Sartono bersama Bung Karno untuk kemerdekaan bangsa Indonesia cukup besar. Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Mr. Sartono adalah peserta anggota nomor 46 dari 60 orang anggota lainnya dari seluruh Indonesia. Mr. Sartono semasa hidupnya pernah menjadi ketua Parlemen RI yang pertama. Pernah pula menjabat presiden RI sampai dua kali.

Keluarga terdekat maupun istrinya menjelaskan kepada penulis bahwa nama Mr. Sartono tidak perlu dijunjung tinggi. Hal ini sesuai dengan pesan almarhum semasa masih hidup, namun kita tidak boleh melupakannya begitu saja. Kalau kita tinjau dari segi perjuangan, Mr. Sartono cukup banyak berbuat untuk bangsa dan negara. Dihubungkan pula dengan nilai-nilai edukatif serta patriotis, almarhum Mr. Sartono adalah milik semua bangsa Indonesia. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menulis biografinya sebagai tokoh perjuangan bangsa yang bertaraf nasional dan internasional.

Sekarang marilah kita ikuti gerak langkah perjuangan dan pengabdian Mr. Sartono semasa hidupnya. Kami kira senantiasa menarik dan tidak sulit untuk dicontoh, karena dalam tubuh Mr. Sartono di samping mengalir darah bangsawan yang selalu berjihad kerakyatan, mengalir pula darah pengabdian yang mulia dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Demikian pula hendaknya kita bangsa Indonesia dalam meneruskan perjuangan dan mengisi kemerdekaan yang telah bertahun-tahun

diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita. Mereka dengan rela mengorbankan segala-galanya.

Perlu kami tambahkan di sini bahwa penulisan biografi ini didahului dengan kata sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan dan Kata Pengantar oleh pimpinan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN). Setelah Daftar Isi dan Pendahuluan penulis menguraikan biografi ini dalam 6 bab (Bab I sampai dengan VI). Sebagai penutup, penulis mencoba mengetengahkan biografi singkat Mr. Sartono. Dan untuk mendukung kebenaran fakta dan data dari biografi ini, penulis cantumkan pula daftar sumber. Adapun tentang isinya, pembaca dapat mengikuti uraian masing-masing bab dari biografi ini.

Penulis menyadari, bahwa buku biografi ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu kritik dan saran pembaca yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Semoga penulisan biografi ini mencapai tujuannya.

Jakarta, Desember 1985  
Penulis

## **BAB I ASAL-USUL DAN PENDIDIKAN PERTAMA**

Sartono adalah anak kedua dari tujuh bersaudara keluarga Raden Mas Martodikarjo, pegawai Pemerintah Mangkunegaran, Surakarta. Sartono adalah keturunan bangsawan dengan nama lengkap Raden Mas Sartono (RM. Sartono). Tetapi hal ini tidak pernah ditonjolkannya. Sartono justru merasa bangga dan terhormat memakai nama Sartono saja. Ia menganggap nama tersebut lebih demokratis dan lebih merakyat.

Saudara-saudara kandungnya ialah : Sapardjo (almarhum), Sartono (almarhum), Sartomo (almarhum), Sarwono (pensiunan guru SLA di Yogyakarta), Sarjati (sekarang berpredikat nyonya dengan alamat, Brumantakan V/8 Solo), Sarwoko (almarhum), dan Sardini (almarhumah). Ayah ketujuh bersaudara ini adalah keturunan Mangkunegoro II dan ibunya keturunan Mangkunegoro III dari Surakarta.<sup>1</sup>

Sebagaimana kita ketahui bersama dalam perjanjian "Gianti" tahun 1755 Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Sunan Paku Buwono mendapat Surakarta dan tetap beribu kota di Surakarta, sedangkan Mangkubumi mendapat Yogyakarta dengan ibu kotanya Yogyakarta, dan bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Sementara itu Mas Said tidak mendapat bagian. Mas Said yang terkenal dengan sebutan Pangeran Sember Nyawa, masih terus melan-

jutkan pembrontakan. Oleh karena itu dalam perjanjian di Salatiga pada tahun 1757, daerah Susuhunan Surakarta dibagi sebagian untuk Mas Said. Susuhunan Paku Buwono tetap di Surakarta, dan Mangkunegaran diberikan kepada Mas Said. Mas Said kemudian bergelar Mangkunegoro I. Jadi Mangkunegoro II adalah ayah dari Raden Mas Martodikarjo atau kakek Sartono dari pihak ayah. Sedangkan Mangkunegoro III adalah ayah dari Ny. RM. Martodikarjo atau kakek dari Sartono dari pihak ibu.

Sartono dilahirkan pada tanggal 5 Agustus 1900 di Kota Wonogiri Surakarta Jawa Tengah. Kota kelahirannya Sartono tidaklah sebaik kota-kota lain di Jawa Tengah. Kotanya kering, gersang dan kurang subur. Kota ini sama pula halnya dengan Kota Purwodadi dan Grobogan yang terkenal sebagai daerah kering. Oleh sebab itu atas kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia, penduduk Kota Wonogiri kemudian ditransmigrasikan ke luar Jawa. Pemerintah telah menjadikan daerah ini menjadi waduk bernama Waduk Sempor untuk keperluan irigasi bagi daerah sekitarnya. Waduk tersebut sekarang cukup menarik pula bagi para wisatawan asing sehingga ada pemasukan devisa bagi daerah ini.

Nama Mr. Sartono sudah tidak asing lagi di kalangan bangsa Indonesia. Ia adalah milik bangsa Indonesia. Kehebatannya dalam kegiatan sosial dan politik untuk mencapai Indonesia merdeka tak dapat diabaikan. Juga dalam mengisi kemerdekaan Indonesia ini sudah tidak diragukan lagi baik bagi Angkatan Persatuan 1928 maupun di kalangan pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia. Bahkan tidak mustahil jikalau sebagian besar dari mereka cukup mengenal siapa Sartono itu. Mereka mengenal watak, pribadi sampai dengan gerak langkah perjuangannya dalam bidang sosial dan politik. Mengapa demikian? Bukankah sebelum ini sudah dikatakan, bahwa lahan dan lingkungan Sartono ikut menempe kehadirannya di dunia untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Dengan demikian tokoh ini tentu dapat menjawab tentang zaman jauh sebelumnya.

Sebagaimana kita mengetahui, bangsa Inednesia pada waktu itu, dibuat bodoh oleh sistem pendidikan kolonial Belanda. Kebodohan, ketidakmampuan, kemiskinan moral dan material dan kepincangan dalam dunia pendidikan adalah sebagian dari tantangan zaman. Tingkat sekolah selalu dibeda-bedakan antara golongan pribumi dan non-pribumi. Golongan pribumi dibedakan lagi, yaitu kelompok priyayi dan rakyat biasa.

Dalam hal kepegawaian Pemerintah Penjajahan Belanda membeda-bedakan lagi. Bagi non-pribumi dapat menjadi pegawai menengah dan tinggi. Bagi kelompok priyayi dapat menjadi pegawai rendahan, dan kelompok rakyat biasa hanya dapat menjadi pegawai yang lebih rendah atau hampir setingkat dengan kuli, dengan gaji atau upah sesuai dengan kedudukannya.

Tingkat sekolah sebagai wadah pendidikan dibeda-bedakan pula. Anak rakyat biasa disediakan sekolah Ongko Loro atau Sekolah Kelas II dan Sekolah Desa 3 tahun. Itu pun tempatnya sangat terbatas dan tidak mungkin kita temui di tingkat desa atau kecamatan seperti sekarang. Paling-paling kita jumpai pada tingkat *onder afdeling* dan *afdeling* atau tingkat *kewedanan* dan kabupaten pada zaman sekarang. Wilayah *onder afdeling*, sekarang kira-kira ada tiga atau empat kecamatan, sedangkan wilayah *afdeling*, sekarang kira-kira ada dua atau tiga kabupaten.

Bagi anak-anak kelompok priyayi atau pegawai Pemerintah Penjajahan Belanda disediakan Sekolah Kelas I. Tempatnya sangat terbatas dan berada di kota-kota tertentu. Kalau prestasi anak baik baru dapat memasuki HIS. Sedangkan anak-anak Belanda dan orang asing lainnya disediakan HIS dan ELS. Ada juga di antara bangsa kita yang kebetulan anak-anak keturunan bangsawan, kalau sempat masuk HIS atau ELS, jarang yang prestasinya kalah dengan anak-anak Belanda dan anak-anak asing lainnya. Bahkan seluruhnya dapat dikalahkan oleh anak-anak pribumi (Indonesia).

Dalam buku *Memperingati 75 Tahun HIK* menyebutkan bahwa keberhasilan yang luar biasa telah dicapai oleh putra pribumi (Indonesia).

''Tuan Abdul Haris Nasution dalam ujian terakhir AMS yang telah berhasil mengalahkan semua kelompok-kelompok Belanda dan Eropah lainnya. Juga Tuan Soegarda pada tahun 1932 telah lulus dengan hasil paling baik dan luar biasa dalam ujian akhir *Europeesche Hoodacte* (*Hoofdacte met aanteekening*) yang telah mengalahkan anak-anak Belanda, anak-anak Eropah serta orang asing lainnya yang ikut dalam ujian itu. Sembilan tahun setelah itu dalam sekolah yang sama lulus pula Tuan Soendoro (tahun 1941) dan tahun 1942 lulus pula The Jan Lok.'''<sup>2</sup>

Sartono mula-mula sekolah di ELS Surakarta, karena pada waktu itu di Wonogiri tidak ada ELS (*Europeesche Lagere School*) atau sekolah Belanda. ELS itu ada tiga tingkatannya. Sekolah Belanda III atau ELS III ada di ibu kota *onder afdeling*, tetapi itu pun tidak merata. Sekolah Belanda II atau ELS II (*Tweede ELS*) ada di ibu kota *afdeling*, tetapi itu pun tidak merata pula. Sedangkan sekolah Belanda I atau ELS I (*Eerste ELS*) hanya terdapat di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Manado dan kota-kota lain termasuk Surakarta. Pada umumnya yang masuk ke ELS I (*Eerste ELS*) hanya orang-orang Belanda, orang Eropa lainnya, bangsawan dan Cina. Sartono dapat memasuki ELS I, karena dia adalah keturunan bangsawan.

Selain ELS, di Surakarta juga ada sekolah yang disebut ELS (*Hollandsch Inlandsche School*). Sekolah ini menampung orang-orang Indonesia kelas menengah yang mengerti bahasa Belanda.

Sartono masuk ELS Surakarta pada tahun 1906 dan lulus pada tahun 1913 dengan predikat nomor 1. Oleh sebab itu Sartono dengan mudah dapat diterima di MULO (*Meer Uitgebreed Lagere Onderwijs*) di Kota Surakarta. Akhirnya Sartono pada tahun 1916 dapat menamatkan sekolahnya dengan hasil yang gemilang. Karena prestasinya itu Sartono dapat melanjutkan pelajarannya ke *Rechts School* di Jakarta.

Belajar di sekolah Belanda harus penuh disiplin. Murid yang nakal akan mendapat peringatan keras, dan kalau berbuat

lagi tentu akan dikeluarkan dari sekolah. Sartono dan kawan-kawannya dapat menikmati pendidikan pada awal abad ke-20 sebagai perwujudan dari 'Politik Etis'. Politik Etis dilancarkan oleh Mr. Courad Theodor van Deventer dan kawan-kawan, antara lain Fransen van de Putte, Ir. van Koll dan Brooschooft.

Van Deventer bersama kawan-kawannya mendapat ilham dari bekas Asisten Residen Lebak Banten Selatan Eduard Douwes Dekker. Ia telah dipecat dari jabatannya akibat membela rakyat yang tertindas karena ulah penjajah dengan para kepala bumiputra yang menjabat bupati, wedana, kuwu yang memimpin sekelompok desa, demang yang memimpin satu desa dan bekel yang memimpin sekelompok rakyat desa seperti rukun tentangga.

Setelah dipecat, Douwes Dekker kemudian berkelana bersama istri beserta anaknya. Namun di Jerman ia berhasil menulis buku yang kemudian termasyhur di dunia, yaitu buku *Max Havelaar*. Ia mengatakan hendak menjadikan bukunya itu seperti buku *Uncle Tom's Cabin* karangan Beecher Stowe yang menggemparkan dan mengilhami *Abolition War* di Amerika Serikat (1861-1865).<sup>3</sup>

Bagi Sartono, untuk masuk ELS tidak ada problem, karena Sartono masih berdarah bangsawan. Kebanyakan pula anak desa yang dapat menyelusup masuk ke sekolah-sekolah seperti HIS, ELS dan lain-lain juga memperoleh kemajuan, terutama karena dihina oleh anak-anak Belanda dan orang-orang Eropa lainnya. Selain itu Sartono memang memiliki otak cerdas, lebih cerdas bila dibandingkan dengan anak-anak Belanda.

Seperti Prof. Dr. Sadarjoen Siswomartoyo pada tahun pertama masuk Sekolah Raja (*Kweek School*) ia mendaftarkan dirinya secara sembunyi-sembunyi. Waktu direktornya melihat anak desa dengan selembat destar datang untuk ikut ujian, ia tertawa keras-keras menghina, tetapi akhirnya ia lulus dalam ujian tersebut. Pada tahun pertama di sekolah Raja, Sadarjoen menduduki nomor 25 dari 30 orang murid. Tahun ke-

dua nomor 10, tahun ketiga nomor 5, dan tahun berikutnya nomor 1. Untuk selanjutnya sampai di *Hogere Kweek School* dia tidak mau melepaskan nomor satu sampai selesai belajar.<sup>4</sup>

Sartono yang berjiwa kerakyatan adalah salah seorang di antara bangsa Indonesia yang mendapat kesempatan untuk menikmati pendidikan tinggi. Rupanya ia mampu memanfaatkan kesempatan yang berharga itu, dan mempergunakan kesempatan itu secara cermat, tekun dan penuh kesadaran.

Kita mengetahui semua, sistem politik dan pendidikan kolonial Belanda melahirkan ketidakadilan di segala bidang di Indonesia. Politik rasialisme sebagai bagian dari politik kolonial akan melahirkan pola-pola pikiran yang bersifat diskriminatif. Tidak semua yang berasal dari Barat itu terbaik, dan terhormat, pasti ada yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Semua itu menurut Sartono harus diterima secara selektif, karena tidak semua yang berasal dari Indonesia itu buruk. Kadang-kadang yang didatangkan dari Barat justru lebih banyak kepalsuannya. Semua hanyalah propaganda dan tidak berdasar kenyataan. Itulah kultur diskriminatif, suatu kultur yang dipertahankan pemerintah kolonial pada zaman pemerintahan jajahan Belanda.

Mengenai pribadi Sartono dari dekat merupakan kewajiban generasi penerus. Tanpa mengenal pribadi dan sepak terjang perjuangan para pahlawan tidak mungkin generasi penerus dapat mewarisinya, apa lagi meningkatkannya.

Sartono terbilang berhasil dan sukses dalam perjuangannya, tetapi hal ini diperolehnya dengan jalan cukup jauh dan berliku, dengan penuh rintangan dan pengorbanan yang cukup banyak, dan barulah sampai ke tempat yang dituju. Itu pun belum sempurna apa yang diharapkan. Sartono sebagai manusia tentu tidak luput dari serba kekurangan.

Sudah disebutkan di muka, Sartono adalah salah seorang di antara putra Indonesia yang dengan mudah mendapat kesempatan setaraf dengan orang Belanda lainnya untuk menik-

mati pendidikan yang baik pada zaman Pemerintah Belanda. Ia adalah keturunan bangsawan (Mangkunegoro II). Ayahnya, RM. Martodikaryo adalah pegawai Pemerintah Mangkunegaran. Dari pihak ayahnya, Sartono adalah keturunan Mangkukegoro II dan dari ibunya Sartono adalah keturunan Mangkunegoro III. Menurut keturunan Mangkunegoro yang lain, foto dari Mangkunegoro I yang bergelar Mas Said tidak dapat diabadikan atau digambarkan, karena kesaktiannya.<sup>5</sup>

Sartono termasuk anak yang pandai bergaul. Ia disegani oleh kawannya karena tergolong anak yang cerdas, pandai, berprestasi dan tekun. Karena sifat-sifatnya yang sederhana, sportif dan pandai, ia cukup disegani oleh kawan dan lawan. Selama bersekolah di ELS dan MULO Sartono selalu memperoleh nilai yang cukup memuaskan. Guru-guru dan kawan-kawannya sudah melihat bakat yang luar biasa pada diri Sartono.

Setamat dari ELS Sartono masuk ke MULO yang berarti pelajaran tingkat dasar yang diperluas. Lama belajar di MULO adalah tiga tahun, seperti SMTP sekarang, cuma mutunya tentu berbeda. Mutu yang dimaksud di sini ialah dari segi tenaga pengajar. Kalau di MULO tenaga pengajar betul-betul menguasai ilmu pendidikan dan menguasai bidang studi secara mendalam dan penuh keahlian. Jadi tenaga pengajar di samping menguasai bidang studi, juga sebagai seorang pendidik yang cukup meyakinkan dan berwibawa. Sedangkan tenaga pengajar di SMTP sekarang kebanyakan tenaga pengajar bidang studi, belum tentu sebagai pendidik yang baik, karena guru, terutama guru-guru yang baru mengajar dari PGSLP dan Program D-I hanya mendapat pelajaran ilmu mendidik selama satu tahun. Ini jelas kelihatan kewibawaan guru merosot dan hampir tidak ada sama sekali.

Sekitar tahun limapuluhan mutu guru lebih baik dari sekarang. Pada waktu itu kita mengenal lembaga pendidikan guru seperti SGB, SGA, B.I/II dan PTPG. Jadi guru-guru betul-betul berwibawa.

Sekarang kita tidak mengenal lagi SGB. Tetapi kita mengenal SPG yang muridnya berasal dari SMTP non-SGB dan tamat menjadi guru SD. Dari SPG tidak boleh masuk ke IKIP, kecuali nilai yang luar biasa. Itu pun cuma satu atau dua. Mahasiswa IKIP berasal dari SMTA non-SPG. Tamat Sarjana Muda IKIP mengajar di SMTP atau SMTA, itu dapat dihitung dengan jari. Kebanyakan yang mengajar di SMTP dari PGSLP dan D-I.

Kebanyakan yang masuk ke PGSLP dan D-I. dari SMTA non-SPG. Lama belajar selama satu tahun mendapat ilmu pendidikan. Kemudian menjadi guru SMTP atau SMTA. PGSLP dan D-I bukan mencetak guru/pendidik, tetapi guru pengajar bidang studi.

Hal yang demikian mengakibatkan kewibawaan guru menurun. Kenakalan murid meningkat, karena guru kebanyakan pengajar bidang studi, bukan pendidik yang dapat dipercayai dan bertanggung jawab. Apalagi kesejahteraan guru tidak seimbang dengan apa yang diberikannya.

Zaman Sartono bersekolah, guru-gurunya betul-betul menguasai bidang studi dan ilmu pendidikan. Guru-gurunya mempelajari bidang studi dan pendidikan selama bertahun-tahun. Jadi kewibawaan guru dan mutu murid terjamin. Oleh sebab itu murid-murid sezaman dengan Sartono selalu siap dan mampu menjawab semua tantangan. Apakah tantangan di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, maupun politik tidak pernah mereka mundur menjawabnya, malah maju terus pantang mundur.

Setamat dari ELS Sartono masuk ke MULO kemudian ke *Rechts School* di Jakarta. Kegiatan Sartono di *Rechts School* Jakarta kita ikuti pada bab berikutnya.

## CATATAN BAB I

1. Mr. Ratmoko (62 tahun), *Wawancara* (Jakarta: Tanggal 6 Maret 1984).
2. *Gedenkboek HIK*, (Bandung: Volkslectuur, 1866–1941), hal. 130–131.
3. Drs. R. Nalenan, *Iskaq Tjokrohadi surjo, Alumni Desa Bersemangat Banteng*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982).
4. *Majalah Kartini*, (Jakarta: nomor 67 tanggal 30 Mei s/d 12 Juni 1977), hal. 6, 7 dan 8.
5. Mr. Ratmoko (62 tahun), *Wawancara* (Jakarta: Tanggal 6 Maret 1984).

## BAB II BERSEKOLAH DI RECHTS SCHOOL DAN KEGIATAN SOSIAL

Nasib bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan di antaranya cukup menyedihkan pada zaman pemerintahan penjajahan Belanda. Bangsa Indonesia tenggelam dalam lautan kebodohan. Namun demikian bangsa Indonesia secara kelompok maupun pribadi tetap berusaha mengangkat kebodohan itu dari dasar lautan sehingga timbul dengan gagah dan berwibawa. Pengaruh politik etis pada awal abad ke-20 terasa di daerah jajahan Belanda (Hindia Belanda) yang ingin membayar "hutang kehormatan" antara lain dengan memajukan pendidikan.

Dalam jangka sepuluh tahun yaitu antara tahun 1910-1920, jumlah murid yang memasuki Sekolah Ongko Loro, sekolah yang paling rendah di Hindia Belanda, naik dari 71.239 menjadi 423.314. Antara tahun 1900 sampai tahun 1910, murid-murid di HIS dan ELS naik menjadi 5.109, kenaikan 100% dibandingkan sebelumnya.<sup>1</sup>

Sekolah-sekolah lain yang mulai berkembang pada awal abad ke-20 dan tidak pernah dikenal sebelumnya ialah MULO (*Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs*), sama dengan SMTP sekarang cuma mutu yang berbeda. Sekolah ini menerima murid dari HIS dan ELS. Dari MULO dapat diteruskan ke AMS (*Algemene Middelbare School*). Di samping MULO dan AMS,

ada HBS (*Hoogere Burger School*) yang masa belajarnya lima tahun. Sekolah ini terutama hanya menerima murid-murid Eropa, dan seluruh Hindia Belanda pada awal abad ke-20 hanya terdapat tiga HBS, yakni di Surabaya, Semarang dan Jakarta.

Sekolah-sekolah yang menonjol ketika itu ialah STOVIA (*School tot Opleiding van Inlandsche Artsen*) atau Sekolah Dokter Hindia. STOVIA, yang bertempat di Weltevreden kini Jalan Abdurrahman Saleh, Jakarta Pusat, banyak menampung calon-calon dokter yang mengambil dalam Pergerakan Nasional setelah mereka mendirikan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908.

Tenaga-tenaga medis dididik pula pada NIAS (*Nederlandsch Indische Astsen School*) yang didirikan pada tahun 1913 di Surabaya. Untuk mendapatkan guru bantu pada sekolah desa atau kalau di Jawa, Sekolah Ongko Loro, dibuka sekolah yang namanya *Normaal School*, sedangkan tamatan HIS biasanya menjadi kepala sekolah desa.

Guru-guru tamatan *Kweekschool* tidak dapat memenuhi kebutuhan akan guru ketiak itu, karena pada awal abad ke-20 hanya terdapat lima buah *Kweekschool* yaitu tiga di Jakarta, satu di Bukittinggi dan satu lagi di Manado. Tamatan *Kweekschool* (Sekolah Raja) hanya menjadi guru pada sekolah-sekolah Pemerintahan Hindia Belanda. Untuk menjadi pegawai sampai dengan bupati, orang memasuki sekolah yang disebut OSVIA (*Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaaren*).

Di samping sekolah-sekolah tersebut, Pemerintah Hindia Belanda mulai memikirkan bagaimana orang-orang bumiputra dididik menjadi hakim sehingga mereka dapat mendalami pikiran dan adat istiadat yang terkandung dalam kalangan bumiputra sendiri waktu mengadakan suatu perkara. Terasa bahwa para hakim kolonial dalam mengadakan sesuatu perkara, biasanya dilepaskan dari adat istiadat yang melekat pada sesuatu kasus karena perasaan superioritas sebagai seorang penjahat.

Pada tanggal 15 Januari 1907 Pemerintah Belanda mengajukan sebuah rancangan Anggaran Belanja tahun 1907 untuk Hindia Belanda dengan menambahkan anggaran untuk mendirikan suatu "*School tot Opleiding voor Inlandsche Rechtskundigen*. Usul pendirian Sekolah Hakim ini mendapat tantangan cukup berat dari pihak konservatif dalam *Twedee Kamer dan Eerste Kamer*.

Setelah mendapat penjelasan-penjelasan yang cukup meyakinkan dari Menteri Jajahan Idenburg, maka diterimalah rancangan itu untuk menjadi Undang-Undang oleh *Tweede Kamer* pada tanggal 13 Nopember 1907 tanpa pemungutan suara, dan pada tanggal 18 Juli 1908 oleh *Eerste Kamer*. Dengan demikian terbukalah jalan bagi berdirinya *Rechts School*.

Pada tanggal 26 Juli 1909 dibukalah secara resmi *Rechts School* yang semula masih bernama *School tot Opleiding voor Inlandsche Rechtskundigen*. Menteri Jajahan Idenburg dalam sidang *De Eerste Kamer* menegaskan bahwa *Rechts School* bukanlah menerima siswa dari "keluarga inlander biasa" melainkan dari keluarga bangsawan. Karena itu dapat dimengerti adanya seleksi yang ketat dalam penerimaan siswa. Untuk pertama kali hanya diterima sebanyak 17 siswa dari 62 calon.<sup>2</sup> Siswa yang diterima hanya berasal dari Jawa—Madura. Mulai tahun 1915 barulah diterima siswa dari luar Jawa—Madura.

Pada tahun 1922 terdapat suatu peningkatan baru ialah dengan diubahnya nama dari *School tot Opleiding voor Inlandsche Rechtskundigen* menjadi *Rechts School*. Dua tahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1924, dibuka lagi *Rechts Hoge School* (Sekolah Hakim Tinggi) atau disebut juga Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Pembukaan sekolah baru ini berpedoman kepada laporan suatu komisi yang sengaja dibentuk untuk menjajagi rencana pembentukan Sekolah Tinggi Hukum tersebut.

Seperti telah dikatakan di muka bahwa Sartono menyelesaikan MULO di Surakarta pada tahun 1916. Ketika itu Sekolah Hakim di Jakarta telah dibuka, yaitu pada tanggal 26 Juli

1909. Berita pembukaan itu disebarkan ke seluruh ELS yang ada di Indonesia beserta syarat-syarat penerimaannya. Sebenarnya Sartono begitu lulus ujian ELS di Surakarta ingin langsung meneruskan ke *Rechts School* di Jakarta. Tetapi karena umur masih kecil dan MULO ada di Surakarta, maka diurungkan keberangkatannya ke Jakarta.

Penerimaan dari ELS justru diutamakan, karena Sekolah Hakim itu memang memerlukan tamatan ELS yang pernah disiplin ala Belanda dengan penguasaan bahasa Belanda yang baik. Karena sekolah ini baru dibuka, maka orang-orang tua, terutama di kalangan bangsawan Jawa sangat merasa bangga dan prestisenya seolah-olah tinggi di masyarakat apabila anaknya bisa masuk ke Sekolah Hakim untuk kelak menjadi hakim atau pengacara dengan gaji sekitar 150 gulden. Jumlah ini termasuk jumlah yang besar. Selain itu belum pernah orang Indonesia menjadi hakim. Setiap perkara dalam masyarakat ditangani oleh hakim Belanda. Akan tetapi kini datang suatu masa baru, di mana ada kesempatan bagi orang-orang Indonesia menjadi hakim atau ahli hukum.

Raden Mas Martodikaryo dalam hal ini, melihat anaknya Sartono, memiliki kemampuan untuk menjadi seorang ahli hukum. Sartono senang sekali ketika ayahnya menyetujui dia memasuki *Rechts School* di Jakarta. Ibunya pun ikut bersuka cita kalau kelak anaknya dapat menjadi hakim atau pengacara walaupun sebenarnya sebagai seorang ibu merasa berat berpisah dengan anaknya.

Di *Rechts School* disiplinnya sangat ketat sekali seperti apa yang disebutkan di atas tadi. Bagi Sartono, disiplin yang ketat itu bukanlah merupakan hal yang baru, karena hal itu telah biasa dialaminya di ELS dan MULO.

Pemuda Sartono ke Jakarta diantar oleh ayahnya. Perjalanan ke Jakarta dilakukan dengan naik kereta api. Kereta api dari Surakarta ke Jakarta pada waktu itu melalui Bandung. Stasiun akhir untuk kereta api cepat di Jakarta adalah Stasiun

Kemayoran.<sup>3</sup> Jarak Stasiun Gambir dengan sekolah dan asrama tidak seberapa jauh. Tetapi kalau dengan Stasiun Kemayoran agak jauh sedikit, kurang lebih dua kali lipat dari pada jarak dengan Stasiun Gambir.

*Rechts School* bertempat di *Koningsplein Zuid 10* atau yang kini dikenal dengan Merdeka Selatan 10. Gedung itu terletak di samping Kantor Balaikota DKI Jakarta sekarang. Dari Stasiun Gambir ke sekolah cukup dengan naik sado (kereta kuda) atau delman. Kadang-kadang, murid-murid senior datang menjemput adik-adiknya yang akan masuk ke asrama jika sekiranya kedatangan mereka diketahui. Di asrama, kamar-kamar telah siap. Tiap kamar besar ditempati oleh dua siswa baru. Siswa senior mendapat kamar untuk tiap orang. Tiap-tiap siswa diberikan lemari pakaian, tempat tidur, meja tulis, rak jemuran dan keperluan lainnya.

Para siswa diwajibkan selalu berpakaian rapi dan bersih. Sikap terhadap pimpinan harus sopan, juga terhadap sesama teman. Antara mereka harus terdapat kerjasama, rasa setia kawan, terbuka dan jujur antar sesama. Para siswa dalam waktu tertentu diajak oleh salah seorang gurunya untuk makan di rumahnya sesuai dengan adat kebiasaan Barat. Maksudnya agar para siswa terbiasa dengan cara-cara dan kebiasaan bertamu sehingga tidak canggung dalam menghadapi sesuatu jamuan.<sup>4</sup> Suasana demikian berlaku untuk Sartono dan teman-temannya selama 6 tahun dalam pendidikan. Mereka juga mendapat uang saku, di samping biaya sekolah, asrama, pakaian, makanan dan minuman yang serba gratis. Pemuda Sartono pada waktu itu sebenarnya bebas dari tanggungan orang tua, kecuali sekali-sekali ada kiriman orang tua yang sangat terbatas. Tetapi kadangkala kasih orang tua terhadap anaknya adalah sepanjang jalan, bukan jalan buntu. Namun secara diam-diam tetap dikirimkan lebih untuk pemuda Sartono oleh orang tuanya.

Di sekolah, Sartono dan kawan-kawannya belajar dengan tekun. Tidak ada istilah santai dalam soal belajar. Juga tidak merupakan belajar borongan atau rapelan. Di *Rechts School*

mulai kelas satu mendapat bahasa Perancis selama lima tahun. Banyak juga di samping itu bagi siswa-siswa meneruskan di luar sekolah belajar bahasa Jerman dan Inggeris, karena bila menjadi hakim sangat diperlukan bahasa-bahasa itu kelak. Di Jakarta pergaulan di antara pemuda mulai berjalan ke arah keindonesiaan. Ketika di Surakarta tidak banyak bertemu pemuda-pemuda asal luar Jawa, kecuali di Yogyakarta ada juga kita temui pemuda-pemuda dari luar Jawa. Tetapi di *Rechts School* telah ada pergaulan Indonesia, meskipun belum begitu lancar. Kadang-kadang masih terjadi ketegangan karena masing-masing, masih merasa punya kebangsaan kedaerahan/kepulauan sendiri dan prasangka-prasangka antar suku masih ada. Seperti waktu ada yang mengejek tarian Jawa, mudah timbul perkelahian mulut. Tingkatan bagian hukum bersama asramanya dipindahkan ke Jalan Pegangsaan Timur No. 17 di sebuah bangunan baru, di mana sekarang terdapat sebuah asrama mahasiswa.

Pengetian hukum kita semakin mendalam di "*vakafdeling*" pada *Rechts School* itu, termasuk juga bagian-bagian yang mengenai hukum kolonial Belanda yang memang buruk, karena mengandung unsur politiknya di sini. Sebagian besar orang Jawa beragama Islam. Tetapi tidak boleh dilupakan, bahwa orang Jawa itu dulu pernah menganut agama Budha dan Hindu, sebelum masuk Islam. Banyak di antara mereka menganut agama Islam bersama/sesuai suatu aliran kepercayaan tertentu. Fanatisme dalam agama sedikit sekali terdapat di kalangan masyarakat Jawa, justru sebaliknya hal-hal yang berhubungan dengan berbagai macam takhyul, primbon dan sebagainya.

Ini mempengaruhi pemikiran mengenai nasionalisme khususnya di kalangan terpelajar, yang tidak terlalu sukar bisa menerima kebangsaan Indonesia dan bahasa Indonesia sebagai bahasa Persatuan.

Tiga tahun di *Rechts School* Sartono benar-benar digembleng dalam hukum. Dibanding dengan STOVIA, di sana mereka setelah tiga tahun persiapan sampai tujuh tahun digembleng untuk menjadi dokter. Dari STOVIA, jika ingin meneruskan

studi di Negeri Belanda orang tak perlu menempuh tingkat doktoral, langsung diuji untuk menjadi "semi Art" dan "Arts". Sedangkan lulusan dari *Rechts School*, di Leiden diperbolehkan masuk Fakultas Hukum langsung di tingkat studi doktoral, dengan dibebaskan dari ujian "Candidat" (Sarjana Muda).

Tahun 1916 itu juga Sartono masuk "Tri Koro Dharmo", yang kemudian tahun 1918 diubah namanya menjadi "Jong Java", yang dapat disebut anak "Budi Utomo." Pemimpin Tri Koro Dharmo dari *Rechts School* ialah Djodiguno, yang setiap hari Minggu mengajak ke gedung STOVIA untuk berlatih menari tari Jawa atau main gamelan. Di halaman *Rechts School* juga diadakan latihan senam (*gymnastik*) secara berkala di bawah pimpinan Sartono sendiri pada tahun 1917 yang pada waktu itu duduk di kelas dua *Rechts School*.

*Rechts School* dulu terkenal sebagai sekolah anak mas Belanda, lain dengan STOVIA. Hanya kita diajar juga hukum yang betul-betul bersifat kolonial, ini selalu menjengkelkan, sama saja dengan pernyataan setiap kali kita dengar bahwa Indonesia belum matang untuk menjadi merdeka. Tetapi manfaatnya pendidikan di *Rechts School* itu ialah makin tahu kita tentang arti kolonialisme yang sudah maju dalam politik antara lain ialah Iwa Kusuma Sumantri dan Budiarto. Di *Rechts School* siswa yang berasal dari MULO/HBS lulusan kelas tiga OSVIA ada juga, yang terus ditampung di bagian atasan, seperti Supomo, Jusupadi, dan lain-lain. Di tahun 1920 dalam sekolah sudah ada suatu *debating club* (*de Rederijkers*).

Yang penting dan sangat menarik ialah karena kita juga mendapat Hukum Tata Negara dari Negeri Belanda. Sehingga terang bagi kita bila membandingkannya dengan tata hukum Indonesia, itu sangat berbeda sekali, karena Negeri Belanda merupakan suatu negara hukum. Sedang di sini banyak diabaikan azas-azas *Rechtsstaat* itu (soal pengasingan sewenang-wenang, peradilan rasial, pasal-pasal "bis" dan "ter" dalam *strafurboek* atau KUHP dan sebagainya).

Tahun 1921 Sartono dengan beberapa orang temannya lulus dengan baik dalam ujian *Rechts School* terakhir dan mendapat gelar '*rechtskundige*' (ahli hukum). Sartono lulus dengan baik dalam ujian akhir dengan mendapat ranking kedua sedang ranking pertama adalah Iwa Kusuma Sumantri. Kemudian Sartono menjadi pegawai negeri di Pengadilan Negeri di Surakarta hanya kira-kira selama enam bulan.

Demikian selama di *Rechts School* di samping belajar juga aktif dalam bidang sosial dan budaya, walaupun merupakan kegiatan tambahan.

## CATATAN BAB II

1. Sartono Kartosudirdjo dkk, *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid V, (Jakarta: Dep. Dikbud, 1977), hal. 131–132.
2. Drs. R. Nalenan, (*Op. cit*), hal. 7.
3. Drs. J. S. Giovani Sitohang, SH, *Suka dan duka seorang pejuang kemerdekaan Angkatan 1928–1945 Prof. Mr. Sunario*, (Jakarta: Penerbit Mars – 26, 1982), hal. 8.
4. Prof. Mr. Sunario (82 tahun), *Wawancara*, (Jakarta: Tanggal 3–3–1984).

### BAB III SARTONO SEBAGAI MAHASISWA DI LEIDEN DAN MASUK PERKUMPULAN

Pada tanggal 28 Oktober 1924 didirikan *Rechts Hoge School* (Sekolah Hakim Tinggi atau disebut juga Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta tempatnya di samping *Rechts School* yang didirikan pada tahun 1922, dan sebelumnya bernama *School tot Opleiding voor Inlandsche Rechtskundigen*.

Empat tahun sesudah *Rechts Hoge School* berjalan, maka pada tahun 1928 *Rechts School* ditutup. Lulusan *Rechts School* diberi kesempatan untuk meneruskan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Leiden. Kepada yang berstatus Pegawai Pemerintahan Hindia Belanda juga memberikan tugas belajar kepada pegawai tersebut. Pemerintah juga memberikan tugas belajar kepada yang belum pegawai Pemerintah Hindia Belanda, tetapi kepada lulusan yang terbaik untuk meneruskan kuliahnya di Leiden.

Mereka meneruskan kuliahnya untuk mendapat gelar "*meester in de rechten*" antara lain ialah: R. Sudirman, R. Ng. Subroto, R.P. Notosubagio, R. Hadi, Alinuddin Enda Bumi, R. Kusumaatmaja, R. Susanto Tirtoprojo, Wiryono Projodikoro, R. Supomo, N. Sarif Hidayat. Di samping sepuluh orang tersebut, masih tercatat 43 orang lainnya yang meninggalkan jabatannya sebagai pegawai Pemerintah Hindia Belanda untuk meneruskan

kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Leiden. Di antara 43 orang tadi termasuk Sartono.

Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, sesudah Sartono menyelesaikan pelajarannya di *Rechts School* Jakarta pada tahun 1922 dengan rangking nomor dua. Sedang rangking nomor satu pada waktu itu telah dicapai oleh Iwa Kusuma Sumantri.<sup>1</sup>

Sartono setelah menyelesaikan pelajarannya di *Rechts School* Jakarta, bekerja pada kantor Pengadilan Negeri di Surakarta. Sedangkan Iwa Kusuma Sumantri bekerja pada kantor Pengadilan Negeri di Bandung, kemudian pindah ke Surabaya. Sebenarnya bekerja pada Pemerintah Hindia Belanda bukanlah menjadi tujuan, cita-cita dan keinginan utama dari Sartono, tetapi karena ingin menambah pengalaman. Sesuai dengan kata pepatah: "Hafal kaji karena di ulang, pasar jalan karena ditempuh". Pepatah lain mengatakan pula: "enak nasi karena dikunyah dan mendalamnya ilmu karena dipraktekkan."

Kesempatan untuk meneruskan pelajaran sebagai mahasiswa pada *Rijks Universiteit* di Leiden tak kunjung datang pula. Maksudnya untuk menyelesaikan, guna mencapai gelar "*Meester in de Rechten* (Mr.)." Sartono tak sabar menunggu ketetapan Pemerintah Hindia Belanda yang birokratis itu, maka Sartono berangkat ke negeri Belanda dengan biaya sendiri.<sup>2</sup>

Pada bulan September 1922 Sartono berangkat ke Negeri Belanda dengan teman sekelasnya di *Rechts School* Jakarta, yaitu Iwa Kusuma Sumantri. Keberangkatan Sartono terlebih dahulu telah mendapat restu dari kedua orang tuanya, semua sanak saudara dan handai tolan. Mereka semua menyangkutkan harapan semoga kembali dengan hasil yang sukses demi kepentingan rakyat Indonesia kelak.

Setelah surat-surat lengkap, mohon doa restu kedua orang tua, semua sanak saudara serta handai taulan, ia pun berangkat ke Negeri Belanda dengan kapal laut melalui Tanjung Priok. Banyak orang yang berangkat ke Negeri Belanda ketika itu, karena hubungan lain ke Eropa seperti kapal terbang belum ada.

Hubungan melalui laut sudah ramai lagi setelah empat tahun perang dunia. Selama Perang Dunia I (1914–1918) hubungan laut melalui Terusan Suez tidak aman sehingga pelayaran terpaksa melalui Samudra Pasifik. Para penumpang pada umumnya adalah orang-orang Beanda yang biasanya mengambil tempat pada kelas pertama. Sartono pada waktu itu menumpang pada kelas dua. Orang penuh sesak di pelabuhan untuk mengantar keluarganya, teman sejawatnya dan lain-lain. Sedang Sartono hanya diantar oleh beberapa handai taulan.

Rute perjalanan laut pada waktu itu dari Tanjung Priok menuju Belawan – Sabang (mengisi air) – Colombo, yang ketika itu masih merupakan darah jajahan Inggris. Colombo merupakan tempat persinggahan kapal untuk mengisi bahan bakar. Sesudah itu kapal berlayar menuju Samudera Indonesia, masuk Laut Merah dengan tujuan Kota Suez, yang berada di pintu gerbang Terusan Suez. Setelah menyeberangi Terusan Suez, sampailah kapal di Port Said yang terletak di ujung utara terusan buatan Ferdinand de Lesseps tahun 1859–1869. Dari sini biasanya kapal singgah lagi di Alexandria, kota pelabuhan Mesir yang terkenal di pantai selatan Laut Tengah. Dari sini menyeberang Laut Tengah dan sampailah di pantai selatan Eropa. Di sini sebagian penumpang sudah siap dengan visanya untuk melalui jalan darat dengan kereta api. Kota Marceille, kota di selatan Perancis, di pantai Laut Tengah yang sejuk dan indah, selalu disinggahi kapal-kapal yang berlayar dari arah Asia, Afrika, menuju Eropa Barat.

Sebagian lagi meneruskan perjalanan melalui laut dengan menyeberang Selat Gibraltar (*Jabal al Tarik*), masuk Samudera Atlantik, menyusur Tanjung Iberia, menuju utara dan akhirnya sampailah ke Nederland. Ada juga yang tidak melewati kedua route tersebut. Mereka singgah di Genua, Itali, dan dari sini dengan menggunakan kereta api mereka melanjutkan perjalanan ke Eropa Barat. Route yang ditempuh Sartono ketika itu ialah yang melewati Kota Marceille. Setiba di Nederland, ia meneruskan perjalanannya ke Leiden. Di Universitas Leiden sudah ba-

nyak teman-teman Sartono lulusan *Rechts School* Jakarta. Kota Leiden yang sejuk dan dingin itu cukup mengesankan bagi Sartono yang baru menginjakkan kakinya di sana. Walaupun Leiden termasuk kota kecil dan kurang ramai, jika dibandingkan dengan Den Haag, akan tetapi kota ini terkenal dengan Universitas Leidennya, yang merupakan salah satu universitas tertua di Eropa.

Universitas itu mengingatkan bangsa Belanda kepada semangat patriot mereka untuk mempertahankan kemerdekaan mereka dari usaha penjajahan Spanyol dalam perang 80 tahun melawan Spanyol (1568–1648) penduduk Leiden dengan semangat kemerdekaannya dan cinta akan tanah airnya, berhasil mempertahankan Leiden dari pendudukan Sepanyol. Atas jasa penduduk Leiden inilah, Pangeran van Oranye menghadihkan universitas yang termasuk megah ketika itu kepada penduduk Leiden. Universitas tersebut didirikan pada tahun 1575, dan sejak itu Leiden menjadi salah satu pusat pendidikan intelektual di Nederland.

Sartono mencatatkan diri sebagai mahasiswa tingkat doktoral pada Fakultas Hukum *Rijks Universiti, Leiden*. Ia dan beberapa temannya yang juga alumni *Rechts School* Jakarta diberi kesempatan untuk menyelesaikan studinya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena tu ada yang menyelesaikan studinya lebih cepat. Gondokusumo dalam waktu yang relatif singkat yakni enam bulan sudah berhasil meraih gelar "*meester in de rechten*" dengan disertasinya yang berjudul "*Vernietiging-dorpsberluiten*". Supomo lulus denan disertasi "*cumlaude*", sekaligus menggondol hadiah "Gajah Mada". Hadi, Urip Kartodirjo, Susanto Tirtoprojo, Wirjono Projodikoro, lulus dengan predikat *Met Genoegen* dan menerima hadiah "Hadiah Kenaka"

Setelah mencatat namanya sebagai mahasiswa, Sartono mulai bekerja keras untuk menyelesaikan kuliahnya sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Dia dan teman-temannya tidak diharuskan mengikuti kuliah. Mereka boleh bebas dari kuliah asal memenuhi segala sesuatu yang merupakan syarat yang

harus dipenuhi oleh seorang mahasiswa. Mereka selalu berkonsultasi dengan dosen-dosen yang bersangkutan untuk mengetahui buku-buku apa yang perlu dibaca. Entah itu buku wajib atau pelengkap saja. Mereka mencari buku-buku dari perpustakaan yang ada di Leiden dan Den Haag. Perpustakaan yang disediakan untuk umum itu banyak sekali membantu mahasiswa dalam menyelesaikan kuliahnya. Banyak buku-buku yang tidak ditemukan di toko-toko buku, dapat ditemukan di perpustakaan. Perpustakaan yang administratif diatur dengan baik. Sartono ketika itu tidak mempunyai uang untuk membeli buku.

Ia hanya mengandalkan perpustakaan untuk meminjam dari teman. Teman Sartono yang paling dekat ialah Iwa Kusuma Sumantri dan Budiarto. Mereka sering bersama-sama untuk studi atau berpergian ke kota-kota lain. Selama tiga tahun di Nederland ia tidak tinggal pada satu tempat saja. Ia pernah tinggal di Leiden. Pernah juga tinggal di Scheveningen. Kota ini letaknya di pantai barat, di tepi Samudera Atlantik, dan merupakan kota wisata di Negeri Belanda. Banyak orang berdatangan dari seluruh Belanda atau kota-kota lain di Eropa untuk istirahat di situ. Kota mungil ini dilindungi oleh tanggul pasir sepanjang pantai yang terbentuk secara alamiah oleh angin dan ombak Samudera Atlantik. Dari Scheveningen ke Den Haag tidak seberapa jauh. Ada bis yang menghubungkan kota ini dengan Den Haag.

Sartono juga pernah tinggal di Den Haag, yang sangat ramai dibandingkan dengan kota lainnya di Nederland ketika itu. Di sini banyak orang Indonesia. Fasilitas untuk belajar seperti perpustakaan dan toko buku lebih lengkap. Teman-teman mahasiswa asal Indonesia yang jumlahnya ketika itu antara 50–100 orang, lebih banyak di Den Haag. Sartono pernah menetap pula di tempat-tempat lain di Negeri Belanda, karena hubungannya antara satu tempat dengan tempat lain cukup lancar.

Hubungan antara Negeri Belanda dengan Belgia sangat lancar. Mahasiswa-mahasiswa banyak juga yang tinggal di Brusel ibu kota Belgia. Orang bisa menggunakan bis ataupun kereta

api. Karena Belgia pernah disatukan dengan Belanda menjadi satu kerajaan, maka hubungan antara penduduk kedua negeri itu terbiasa dalam adat istiadat dan kebiasaan sehari-hari.<sup>3</sup>

Selama menjadi mahasiswa, Sartono hidup sesederhana mungkin. Meskipun tinggal di negara yang sudah termasuk kaya, namun Sartono selalu tampil secara sederhana. Sartono tidak bekerja selama tiga tahun tinggal di sana. Teman-teman lainnya bekerja sambil kuliah, terutama mereka yang sudah berada pada tingkat doktoral. Untuk menyelesaikan studinya selama tiga tahun itu, ia mencari beasiswa di Nederland. Di sana ada beberapa lembaga sosial yang mau memberikan bantuan kepada mahasiswa Indonesia. Mereka yang mendapat beasiswa itu antara lain Mohammad Hatta, Tan Malaka, Iskaq, Sartono dan beberapa teman lainnya lagi. Jumlah beasiswa yang diterima biasanya belum mencukupi sehingga mereka harus belajar hidup sehemat mungkin.

Rasa solidaritas sangat besar di kalangan mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda. Mereka yang berasal dari Indonesia, jauh dari tanah airnya, dibatasi oleh beberapa samudera dan daratan beberapa benua, yang jaraknya ribuan kilometer, memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Mereka saling membantu. Apabila seorang mahasiswa kehabisan uang, padahal ia sangat memerlukan untuk sesuatu keperluan yang mendesak, teman-teman lain akan membantu mengumpulkan uang secara bergotong royong. Apabila ada mahasiswa yang belum mendapat kiriman dari orang tuanya, ia akan ditampung oleh teman-teman lainnya. Ia bisa makan di situ tanpa bayar, tanpa sewa rumah, meskipun dirasakan bahwa kehadiran seseorang akan mengurangi jatah atau fasilitas yang sangat minim. Sudah menjadi kebiasaan pula bahwa teman yang kebetulan banyak uangnya, mengajak yang lainnya untuk jalan-jalan, makan di restoran Indonesia atau nonton. Kehidupan mahasiswa Indonesia yang demikian itu tanpa melihat kepada perbedaan suku, ras dan agama, mempertebal rasa senasib dan setanah air yang selanjutnya diterjemahkan dalam perjuangan politik.

Dalam kegiatan organisasi, Sartono juga masuk dalam perkumpulan Perhimpunan Indonesia (PI). Perhimpunan Indonesia itu sebelumnya bernama "*Indische Vereniging*" sebagai organisasi perjuangan para mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda, yang didirikan pada tahun 1908, kira-kira enam bulan setelah didirikannya Budi Utomo (20 Mei 1908) di Indonesia.<sup>4</sup> Pada tahun 1922 nama "*Indische Vereniging*" diganti menjadi *Indonesische Vereniging* (Perkumpulan Indonesia). Pada mulanya organisasi tersebut bersifat sosial kemudian bergerak di bidang politik. Melalui organisasi itulah para pelajar dan mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda menyalurkan perasaan dan pendapat secara radikal menentang kolonialisme. Berkenaan dengan itu, majalah "*Hindia PUTra*" pun diubah namanya menjadi "Indonesia Merdeka". Dengan demikian namanya sesuai dengan tujuan perjuangannya yaitu untuk mencapai "Indonesia Merdeka".

Nama *Indonesia Vereniging* (Perkumpulan Indonesia), kemudian diganti dengan Perhimpunan Indonesia (PI). Tujuan PI di samping untuk mencapai "Indonesia Merdeka" dengan menyatukan berbagai golongan bangsa Indonesia untuk dapat mematahkan kolonial Hindia Belanda. Dalam lapangan politik PI bekerjasama dengan partai-partai politik di Indonesia, dan partai-partai itu mengakui kepemimpinan PI sebagai pos terdepan (*Voorpost*) di Eropa. Juga tujuan "Perhimpunan Indonesia" ialah: Indonesia merdeka dengan masa-aksi yang nasionalistis-demokratis Indonesia melalui non-koperasi terhadap penjajah Belanda berdasarkan pertentangan dalam kepentingan.

PI mendukung azas demokrasi dan memajukan politik-politik non-koperasi dengan Pemerintah Hindia Belanda. Pemimpin-pemimpin PI lainnya yang terkenal adalah: Mohammad Hatta, Achmad Subardjo, Gatot Tanumihardja, Nazir Datuk Pamuncak, Mohammad Nazif, Dermawan Mangunkusumo, Herman Kartiwisastro, Iwa Kusuma Sumantri, Sukiman Wirjosandjojo, Sunario, Sastro Muljono, A.A. Maramis, J.B. Sitandala, Suwarno, Arnold Mononutu, Budiarti, Amir, Muhammad

Yusuf. Sartono ikut dalam periode kepemimpinan PI sewaktu dipimpin oleh Sukiman, mungkin sebagai anggota atau sebagai komisaris. Memang Sartono tidak memegang peranan penting seperti yang lain. Tetapi walaupun Sartono sebagai anggota biasa PI, dia tetap mengamati dari dekat kegiatan organisasi ini sejak kedatangannya di negeri Ratu Wilhelmina. Menurut Sartono, Perhimpunan Indonesia menampilkan perjuangan yang sangat berani bagi perjuangan Bangsa Indonesia. Andil yang diberikan Perhimpunan Indonesia terhadap pergerakan nasional di Indonesia sangat besar sekali.<sup>5</sup>

Terhadap lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 Perhimpunan Indonesia memberikan sumbangan yang besar, terutama dengan melalui majalah-majalah "Indonesia Merdeka" Di samping mengikuti pergerakan kebangsaan di luar negeri, walaupun Sartono hanya sebagai anggota yang selalu mengikuti sepak terjang "Perhimpunan Indonesia" dari dekat, namun ia tidak mengabaikan pelajarannya di Fakultas Hukum *Rijks Universiteit*, Leiden.

Sewaktu pimpinan Perhimpunan Indonesia beralih ke tangan Mohammad Hatta, ada juga anggota PI diutus ke Moskow seperti Iwa Kusuma Sumantri dan Samaun. Mereka berdua ditugaskan untuk memepelajari program Fornt Persatuan yang sedang didengung-dengungkan ketika itu oleh Rusia dan sampai di mana peranan Rusia dalam program itu.<sup>6</sup>

Perlu kita ketahui bahwa pergantian nama *Indische Vereeniging ke Indonesische Vereeniging*, kemudian menjadi Perhimpunan Indonesia, menunjukkan perubahan semangat juang. Suatu peningkatan watak. Nasionalisme Indonesia yang berkembang dalam Perhimpunan Indonesia sejak berdirinya patut diketahui oleh generasi-generasi bangsa Indonesia. Perubahan nama tersebut dilakukan oleh pengurus organisasi yang susunannya lengkapnya terdiri atas: Herman Kartowisastro (ketua), Suwarno (sekretaris), Mohammad Hatta (bendahara), dan Darmawan (archivaris).

Selain perubahan nama, Herman Kartowisastro dan teman-temannya banyak memberi perhatian kepada tanah airnya Indonesia yang ketika itu masih dikenal dengan nama Hindia Belanda.

Mereka mendiskusikan apa yang dikenal dengan *November belofte* (Janji November) pada tanggal 18 Nopember 1918 Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. J.P. Graaf van Limburg Stirum (1916–1921). Ketika ia memberikan sambutan pada pembukaan *Volksraad* (Dewan Rakyat) di Batavia ia menjanjikan bahwa *Volksraad* itu kelak merupakan wakil rakyat seluruh Hindia Belanda dan akan memberikan perbaikan-perbaikan kepada penduduk bumiputra. Janji ini tidak pernah direalisasi karena dinilai bersikap lunak terhadap penduduk Hindia Belanda. Ia ditarik dan diganti dengan gubernur jenderal baru yang bersikap keras ialah Mr. D. Fock (1921–1926). Pada masa pemerintahannya terjadi arus pemogokan yang dilancarkan oleh Sarekat Islam dan PKI dengan sarekat-sarekat buruh yang berada di bawah naungan kedua partai politik tersebut. Di masa inilah terjadi pembuangan orang-orang Indonesia ke Digul, ke luar negeri atau terbelenggu dalam penjara kolonial.

Herman Kartowisastro dan teman-temannya mencela keras sikap kolonial dari Pemerintah Hindia Belanda dengan gubernur jenderal yang berhati singa itu. Keadaan buruk yang melanda tanah air mempengaruhi jalan pikiran Herman Kartowisastro dan kawan-kawannya. Mereka juga diilhami oleh seruan pemimpin-pemimpin dunia yang dikumandangkan pada akhir perang dunia (1914–1918) ialah *right of self determination* bagi bangsa-bangsa di dunia. Sebagai media komunikasi, Herman dan teman-temannya menerbitkan majalah *Hindia Poetera*, yang sebelumnya dikelola oleh "*Indonesische Verbond van Studenten*, sebuah organisasi mahasiswa bentuk konfederasi yang di dalamnya bergabung *Indische Vereeniging*, *Tjung Hoa Hui* (organisasi mahasiswa Cina), dan beberapa organisasi mahasiswa Belanda yang mempunyai perhatian pada Hindia Belanda, yakni suatu perkumpulan yang berusaha mengumpulkan Organisasi Mahasis-

wa Indonesia, Belanda, Indo-Belanda dan Cina yang berasal dari Indonesia.

Kepemimpinan Herman Kartowisastro kemudian diganti oleh pengurus baru periode 1923–1924 yang susunannya sebagai berikut: Iwa Kusuma Sumantri (ketua), J.B. Sitanalla (sekretaris), Mohammad Hatta (bendahara), Darmawan Mangunkusumo (archivaris), dan Sastro Mulyono (komisaris).

Pada masa kepemimpinan Iwa Kusuma Sumantri dan kawan-kawannya, *Indonesische Vereeniging* maju selangkah lagi dengan keterangan azasnya yang tegas-tegas bercorak nasional-radikal, yang menghendaki persatuan rakyat Indonesia dan pemerintah yang bertanggung jawab terhadap rakyat Indonesia.

Perhimpunan Indonesia di bawah pimpinan Iwa Kusuma Sumantri berusaha keras untuk menunjukkan warna perjuangan mereka kepada seluruh anggota, dan sedapat mungkin diketahui oleh pimpinan Pergerakan Nasional di Indonesia. Untuk itu mereka tetap menerbitkan majalah "*Hindia Poetera*" yang diseludupkan ke Indonesia. Redaksi *Hindia Poetra* ketika itu ialah: Achmad Subardjo, Mohammad Hatta dan Darmawan Mangunkusumo. Alamat redaksi di tempat tinggal Mohammad Hatta, di *Schoone Bergwerweg 51 B*, Rotterdam, dekat dengan *Handels Hoge School*. Mohammad Hatta dan teman-temannya ditugaskan untuk menyusun "*Gedenkboek Indonesische Vereeniging 1908–1923*". Buku ini berhasil diterbitkan pada tahun 1924, bulan April. Penulis *Gedenkboek* itu menggunakan nama samaran dengan maksud untuk pengamanan pribadi pengarang.<sup>7</sup>

*Gedenkboek* tersebut mendapat kecaman keras dari kaum kolonialis Belanda, dan menicap bahwa *Indonesische Vereeniging* sudah menlangkah ke arah yang berbahaya. Meskipun demikian sikap radikal organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda ini tidak berkurang, malah bertambah tinggi suhunya di masa kepemimpinan Nazir Datuk Pamuncak yang susunan lengkap pengurusnya adalah sebagai berikut : Nazir Datuk Pamuncak (ketua), A.A. Maramis (sektetaris), R. Suwarno (bendahara), Sukiman (komisaris), dan Mohammad Nazif (achivaris).

Pada rapat anggota tanggal 1 Maret 1924, Nazir Datuk Pamuncak menjelaskan tentang keterangan dasar. Dikatakannya bahwa "Indonesia yang bersatu, dengan menyingkirkan perbedaan golongan, dapat mematahkan kekuasaan penjajahan". Tujuannya ialah memerdekakan Indonesia melalui suatu aksi massa nasional yang insaf dan berdasar kepada tenaga sendiri. Ditegaskannya bahwa karena ada dua jenis penjajahan yakni penjajahan politik dan penjajahan ekonomi, maka aksi itu harus ditujukan kepada kemerdekaan politik dan sikap menentang kapital asing yang menyedot kekayaan Indonesia. Ia menandakan politik non-koperasi sebagai sendi perjuangan rakyat Indonesia. Dikatakannya bahwa kerjasama dengan penjajah untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia adalah menipu diri sendiri. Kerjasama hanya mungkin di antara dua golongan yang sama hak dan kewajiban serta kepentingannya. Apabila syarat itu tidak dipenuhi maka kerjasama itu berarti mempermainkan yang lemah oleh yang kuat untuk kepentingan sendiri. Sebab itu "*Indonesische Vereeniging*" menolak kerjasama dan tetap bertujuan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan.<sup>8</sup>

Untuk mempertegas tujuan perjuangan mereka, maka Nazir Datuk Pamuncak dan teman-temannya memutuskan untuk mengubah nama majalah *Hindia Poetera* dengan nama yang langsung menunjukkan tujuan perjuangan mereka yakni Indonesia Merdeka pada tahun 1924.

Tindakan radikal yang diambil pada masa kepemimpinan Nazir Datuk Pamuncak ialah pemecatan terhadap Noto Suroto dan J.B. Sitanala. Noto Suroto, penganut politik asosiasi, adalah bekas mahasiswa hukum Universitas Leiden. Ia adalah putra Pangeran Notodiningrat dari Pakualaman, Yogyakarta. Ia termasuk seorang pendiri *Indische Vereeniging*. Setelah tidak berhasil menyelesaikan kuliahnya, ia mengarahkan perhatiannya untuk membuka toko buku di Den Haag. Ia juga memiliki bakat sebagai pengarang. Ia dikenal sebagai seorang sastrawan asal Indonesia di Nederland, dan karangannya sudah luas dibaca umum.

Pada tahun 1924 Arnold Mononutu membaca tajuk rencana majalah *Udaya*. Dalam tajuk tersebut Noto Suroto setinggi langit memuji jasa dan budi baik Van Heutsz sebagai pacificator Indonesia. Van Heutsz dinilai oleh Noto Suroto sebagai seorang pahlawan yang telah berjasa mendatangkan keamanan di Hindia Belanda. Van Heutsz telah berjasa karena berhasil telah menindak perlawanan rakyat di Hindia Belanda.

Pendapat demikian menurut Arnold Mononutu tidak dapat diampuni. Ia meminta kepada Nazir Datuk Pamuncak sebagai ketua *Indonesiche Vereeniging* untuk mengadakan rapat anggota. Dalam rapat itu Arnold Mononutu ditampilkan sebagai jaksa penuntut. Arnold Mononutu menegaskan dalam rapat anggota, yang didengar langsung oleh Noto Suroto, bahwa sikap Noto Suroto sebagai anggota organisasi tidak dapat dibenarkan. Arnold Mononutu menyatakan bahwa tidaklah tepat Noto Suroto memuji Van Heutsz yang tidak berperikemanusiaan menindas perlawanan rakyat Indonesia, yang hendak mencari kebebasan dan kemerdekaan. Sikap yang demikian berlawanan dengan cita-cita perjuangan *Indonesiche Vereeniging*. Oleh sebab itu Arnold Mononutu menuntut agar Noto Suroto dikeluarkan dari *Indonesiche Vereeniging*. Ternyata rapat anggota menyetujui tuntutan Arnold Mononutu sehingga Noto Suroto dipecat dari *Indonesiche Vereeniging*, setelah diberi kesempatan kepadanya untuk membela diri.

Tindakan yang sama dilakukan pula terhadap J.B. Sitanala, bekas Sekretaris *Indische Vereeniging*. Ketika diadakan rapat untuk memecat Noto Suroto, ia tidak hadir. Karena itu ia mengirim surat kepada surat kabar *Het Algemene Handelsblad*. Surat Sitanala dimuat dalam kolom surat pembaca pada terbitan tanggal 3 Januari 1925 yang diberi judul *Een booze geest* (satu semangat jahat). Dalam suratnya itu ia menyerang anggota dan pengurus *Indonesiche Vereeniging*, yang sudah mengeluarkan Noto Suroto dari organisasi. Dua kali ia mengirim surat kepada surat kabar tersebut dengan nada yang sama. Nazir Datuk Pamuncak dan teman-temannya sangat marah terhadap sikap

Sitanala tersebut. Mereka mengadakan rapat anggota dan mengundang Sitanala untuk mempertanggungjawabkan isi suratnya itu. Dalam rapat tersebut, pihak pengurus menjelaskan kepada Sitanala bahwa sebenarnya ia boleh berpendapat lain akan tetapi tidak boleh membeberkan kepada pers. Sitanala tidak dapat membela dirinya dan mau menerima resiko yang ditimpakan kepadanya akibat perbuatannya itu. Dalam pemungutan suara, ternyata para anggota setuju agar Sitanala dipecat dari keanggotaan *Indonesische Vereeniging*.

Tindakan *Indonesische Vereeniging* yang mengeluarkan dua orang anggotanya berturut-turut hanya dalam jangka waktu sebulan ini mendapat sorotan tajam dari pers kolonial Belanda. Mereka memperingatkan Pemerintah Belanda agar berhati-hati terhadap *Indonesische Vereeniging* yang makin radikal dan dapat mengancam kepentingan Belanda di Hindia Belanda.

Setelah rapat mengeluarkan keputusan tentang pemecatan Sitanala, maka rapat dilanjutkan untuk memilih pengurus baru. Susunan pengurus lengkap yang dipilih dalam rapat itu ialah: Sukiman Wiryosanjoyo (ketua), Arnold Mononutu (wakil ketua), Surono (sekretaris I), Mohammad Hatta (sekretaris II), Amir (komisaris), Budiarto (komisaris), dan Muhammad Yusuf (komisaris).

Pengurus *Indonesische Vereeniging* kali ini jumlahnya lebih banyak daripada jumlah anggota pengurus sebelumnya. Jumlah pengurus sebelumnya hanya sekitar lima orang saja. Kali ini jumlahnya mencapai delapan orang dengan tugas yang lebih berat. Sebulan kemudian pengurus mengadakan rapat lagi untuk membicarakan program dasar organisasi. Rapat yang diadakan pada tanggal 8 Februari 1925 dan dipimpin oleh ketuanya, Sukiman Wiryosanjoyo, memutuskan program dasar organisasi sebagai berikut :

1. Hanya satu Indonesia yang merasa bersatu, dengan menyampingkan perbedaan-perbedaan golongan yang dapat mematahkan kekuasaan penjajahan. Tujuan bersama yakni memerdekakan Indonesia dan menghendaki supaya dibangun suatu aksi massa

yang nasionalistis yang sadar dan bersandar pada kekuatan diri sendiri.

2. Ikut sertanya segenap lapisan rakyat Indonesia dalam perjuangan bersama untuk kemerdekaan itu adalah pula suatu syarat yang dibutuhkan secara mutlak untuk mencapai tujuan.
3. Unsur yang paling berpengaruh dan bersifat inti dalam setiap masalah politik kolonial ialah pertentangan kepentingan antara penjajah dan yang terjajah. Kecenderungan politik penjajah untuk menguburkan dan menyelimuti unsur ini harus dibahas oleh pihak yang dijajah dengan mempertajam dan menegaskan semua pertentangan itu.
4. Dengan memperhatikan pengaruh yang merusak dan demoralisasi dari penjajahan terhadap keadaan psikis dan fisik dalam kehidupan Indonesia maka perlu diusahakan sungguh-sungguh normalisasi keadaan jasmani dan rohani.<sup>9</sup>

Rapat tanggal 18 Februari itu juga memutuskan perubahan nama organisasi dari *Indonesiche Vereeniging* menjadi Perhimpunan Indonesia. Penggunaan nama "Indonesia," adalah suatu identifikasi terhadap watak nasional organisasi yang makin ditingkatkan dalam perjuangan. Istilah "Indonesia" untuk mengganti Hindia Belanda makin didengungkan oleh Perhimpunan Indonesia pada setiap kesempatan, misalnya dalam pertemuan-pertemuan internasional. Mereka menggunakan topi filit yang sudah digunting ujungnya sebagai pici yang menunjukkan ciri nasional Indonesia. Dalam perjumpaan dengan teman-teman mahasiswa dari Asia ataupun Afrika, para mahasiswa Indonesia berusaha menjelaskan tentang adanya suatu kepulauan yang terletak di antara Benua Asia dengan Australia, antara Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik yang masih dijajah Belanda. Inilah Indonesia yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya dari kolonialisme Belanda. Sejak Perhimpunan Indonesia dipimpin oleh Sukiman dan teman-temannya, kolonialisme Belanda mulai berusaha untuk mengambil tindakan terhadap pengurus Perhimpunan Indonesia.

Akan tetapi masa Perhimpunan Indonesia sejak tahun 1926 dengan penampilan "jago muda dari Timur" Muhammad

Hatta, sebagai Ketua, tidak begitu diketahui lagi oleh Sartono, karena ia lulus dengan memperoleh gelar *meester in de rechten*, dan selanjutnya kembali ke Indonesia. Sartono ikut dipesan oleh teman-teman yang masih tinggal di Negeri Belanda agar setibanya di Indonesia, mengusahakan berdirinya suatu partai nasional yang akan menjadi penopang dalam gerakan kebangsaan.

Demikian Sartono selama menjadi mahasiswa di Leiden, juga menjadi anggota Perhimpunan Indonesia (PI). Dalam perkumpulan Sartono tidak berperan dalam kepengurusan, tetapi adalah anggota yang aktif mengamati gerak langkah dan sepak terjang perjuangan Perhimpunan Indonesia. Tahun itu juga Sartono kembali ke Indonesia untuk berjuang mencapai Indonesia Merdeka.

Gambaran secara kronologis tentang perkembangan perkumpulan pelajar-pelajar Indonesia di Nederland, adalah sebagai berikut :

1. 1919—1921 Perkumpulan diketuai oleh Achmad Subarjo
2. 1921—1922 Perkumpulan diketuai oleh dr. Sutomo
3. 1922—1923 Perkumpulan diketuai oleh Herman Kartowisastro
4. 1923—1924 Perkumpulan diketuai oleh Iwa Kusuma Sumantri
5. 1924—1925 Perkumpulan diketuai oleh Nazir Datuk Pamuncak
6. 1925—1926 Perkumpulan diketuai oleh Dr. Sukiman Wiryosanjoyo
7. 1926—1930 Perkumpulan diketuai oleh Mohammad Hatta

### CATATAN BAB III

1. Prof. Mr. Sunario (82 tahun), *Wawancara*, (Jakarta : Tanggal 12 Maret 1984).
2. Sarwoko (72 tahun), *Wawancara*, (Jakarta : Tanggal 18 Agustus 1983).
3. Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo (88 tahun), *wawancara*, (Jakarta: Tanggal 12 Desember 1983).
4. Dr. Mohammad Hatta, *Berpartisipasi Dalam Perjuangan Kemerdekaan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1976), hal. 8.
5. *Majalah Selecta*, 27-12-1971, Prof. H. Iwa Kusuma Sumantri SH (1969-1971), Jakarta, 1971, hal. 12.
6. *Majalah Selecta*, *Loc. cit.*
7. Mohammad Hatta, *Memoir*, (Jakarta: Tintamas, 1979), hal. 158-159.
8. Mohammad Hatta, *Ibid*, hal. 168.
9. Prof. Mr. Sunario, *PNI dan Perjuangannya*, (Jakarta: DPP-PNI, 1972), hal. 15-16 dan Mohammad Hatta, *Op. cit*, hal. 171.

## **BAB IV MR. SARTONO SEBAGAI PENGACARA, AKTIF DALAM KEGIATAN POLITIK DAN SOSIAL**

### **4.1 *Sebagai Pengacara***

Setelah Mr. Sartono kembali ke Indonesia, ia memilih tempat dan berjuang pertama di Indonesia di kota Bandung. Di Bandung Mr. Sartono bersama Mr. Iskaq Tjokrohadisuryo, yang berusia lebih tua dari Mr. Sartono, dan teman-temannya yang lain menyewa rumah di *regentsweg No. 22*, sekarang Jalan Dewi Sartika. Mereka menyewa paviliun dari rumah di *Regentsweg* itu sebagai kantor advokat dan tempat tinggal. Mereka terdiri atas sarjana-sarjana yang umurnya pada waktu itu masih sekitar seperempat abad. Advokat-advokat muda alumni Universitas Leiden itu ialah : Mr. Iskaq Tjorohadisuryo, Mr. Sartono, Mr. Budiarto Martoatmojo dan Mr. Sunario. Sarjana-sarjana muda ini membuka kantor advokat non-koperasi. Jadi bukan sebagai pengacara (advokat) negara Pemerintah Hindia Belanda.

Kantor advokat di Bandung itu dipimpin oleh Mr. Iskaq Tjorohadisuryo dan wakil pimpinan ialah Mr. Sartono. Staf lainnya ialah Mr. Budiarto Martoatmojo dan Mr. Sunarto.

Advokat-advokat muda ini cukup berhasil dan sukses menangani tindakan hukum yang sewenang-wenang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Advokat-advokat ini betul-betul menegakkan hukum membela demi keadilan untuk

membela rakyat yang tertindas sewenang-wenang. Kasus perkara siap ditangani mereka di sekitar Bandung, bahkan seluruh Jawa Barat mereka layani.

Seperti contoh di Tasikmalaya, ia membela seorang kondektur kereta api, Jasin namanya, yang dituduh ikut dalam pemberontakan komunis. Sebenarnya kasus ini tidak lebih dari pada fitnah belaka. Oleh sebab itu dari pada tertuduh ini teraniaya dan dijatuhkan hukuman berat, terpaksa dibela oleh advokat-advokat muda tersebut yang dipimpin oleh Mr. Sunario bersama staf lainnya, akhirnya dihukum enteng oleh *Landraad* tetapi terus diinternir ke Digul.

Kehadiran dan kehidupan kantor advokat yang dipimpin oleh Mr. Iskaq Tjokrohadisuryo dan Mr. Sartono di Kota Bandung mengundang banyak persoalan dari Pemerintah Hindia Belanda. Sudah barang tentu dalam hal ini Pemerintah Kolonial Belanda mendapat bantuan dari advokat-advokat orang Belanda.

Tentu saja advokat-advokat Belanda memandang advokat-advokat Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Iskaq Tjokrohadisuryo dan Mr. Sartono bersama semua stafnya sebagai konkuren baru advokat-advokat Belanda. Sebaliknya berat bagi kita untuk bersaing dengan mereka, yang sudah berpengalaman banyak selama berpuluh tahun jika tidak berabad-abad di sini. Sebab itu advokat-advokat muda Indonesia, ingin juga menyediakan waktu berpolitik, dan harus berani hidup dengan sederhana.

Walaupun demikian advokat-advokat muda itu berjuang dan terus berjuang membela rakyat. Setelah kasus pembelaan terhadap Jasin di Tasikmalaya, Mr. Budiarto Martoatmojo bersama staf lainnya ditugaskan pula menangani membela seorang haji di Banten yang dituduh juga ikut dalam pemberontakan komunis, walaupun tertuduh tidak berhasil dibela, dan akhirnya dihukum mati, tetapi advokat-advokat muda ini merasa puas telah membela tertuduh, akibat korban fitnahan Belanda.

Pada tahun 1928 Mr. Iskaq Tjokrohadisuryo dan Mr. Sartono membuka cabang kantor advokat Mr. Iskaq Tjokrohadisur-

yo dan kawan-kawan di Pintu Kecil, Jakarta Kota. Kantor cabang itu siap diurus dan dipimpin oleh Mr. Sartono dan Mr. Sunario yang kemudian menyusul Mr. Budiarto Martoatmojo. Ini semua karena cukup banyaknya tuduhan fitnahan dari Pemerintah Hindia Belanda kepada rakyat Indonesia yang harus dibela.

#### 4.2 *Kegiatan Dalam Bidang Politik*

Apabila kita berbicara tentang Pergerakan Nasional dan artinya bagi bangsa Indonesia dewasa ini maka mau tidak mau kita harus berbicara tentang periode 1927–1934 yang mengatakannya kolonialisme Belanda di seluruh Hindia Belanda. Selama hampir setengah abad Pergerakan Nasional Indonesia, yang membuahkan suatu negara-kebangsaan (*nation-state*) pada tanggal 17 Agustus 1945, periode Pergerakan Nasional antara tahun 1927–1934 menjadi inti dari keseluruhan pergerakan. Tujuh tahun itu mengisahkan kepada kita arti dari Pergerakan Nasional yang menelan korban harta dan jiwa rakyat Indonesia, dan perjuangan bangsa Indonesia sepanjang sejarah. Periode yang cemerlang itu melukiskan kepada kita mengapa kita berdiri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila, dan mengapa kita harus berjuang mendirikan suatu negara merdeka sebagai "jembatan-emas" untuk kepentingan rakyat Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur spiritual-material. Kalau kita ingin mengerti Indonesia yang akan datang, kita dituntut untuk mempelajari perjuangan bangsa Indonesia melalui Sejarah Perjuangan Bangsa.

Selama tujuh tahun tersebut, Mr. Sartono dan kawan-kawan banyak memberikan andilnya kepada bangsa Indonesia. Sebagai salah seorang pendiri dan pemimpin Partai Nasional Indonesia dan seorang pemimpin Pergerakan Nasional ketika itu, Mr. Sartono menempatkan diri sebagai pejuang bangsa yang tidak takut kepada gertakan dan ancaman dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Sarjana-sarjana alumni Universitas Leiden itu ialah: Mr. Iskaq Tjorohadisuryo, Mr. Sartono, Mr. Budiarto Martoatmojo, dan Mr. Sunarto. Dr. Samsi Sastrowidagdo, seorang dokter muda Indonesia alumni Universitas Leiden. Sebelum mereka berlima berdiam di Bandung, udara kota sejuk itu sudah dihangati oleh gejolak Pergerakan Nasional. Penduduk kota kembang sudah mengenal sebelumnya pemuda Sukarno sebagai singa podium. Mereka sudah membaca tulisan-tulisan Sukarno dalam majalah *Suluh Indonesia Muda*, majalah yang diterbitkan di Bandung oleh *Algemene Studie Club*. Buah tangan pemuda Sukarno yang terkenal waktu itu ialah "*Nasionalisme, Islamisme dan Merxisme*" tahun 1926, dan "*Dimanakah Tinjumu?*", tahun 1927. Sukarno sudah menyandang gelar insinyurnya pada tanggal 25 Mei 1926. Semula ia menjadi anggota dan pimpinan *Jong Java*, tetapi kemudian Sukarno dan kawan-kawannya menyadari bahwa memimpin *Jong Java* sudah termasuk kategori ketinggalan dalam lajunya Pergerakan Nasional.

Ir. Sukarno dan Ir. Anwari serta beberapa teman lainnya mendirikan *Algemene Studie Club*, kelompok pergerakan mahasiswa yang nampaknya disinonimkan dengan Perhimpunan Indonesia di Nederland. Cabang *Algemene Studie Club* terdapat juga di kota-kota lainnya seperti Solo dan Surabaya. Dengan majalah *Suluh Indonesia Muda*, mereka mempropagandakan cita-cita Pergerakan Nasional yakni "Indonesia lepas dari Belanda".

Kedua alumni *Technische Hooge School* (HIS) itu, termasuk dua sejoli yang bersahabat dan bekerjasama dalam perjuangan. Keduanya juga membuka Biro Teknik di rumah Ir. Sukarno. Sukarno mulai tampil di muka umum sebagai orator muda sejak tahun 1921. Rapat umum tahun 1922 itu diselenggarakan oleh *Radicale Concentratie*, suatu bentuk konfederasi pertama dari beberapa organisasi politik dan sosial ketika itu. Sukarno yang berjiwa dan bersemangat muda tidak puas dengan pembicara-pembicara dalam rapat itu, yang dinilainya terlalu lunak. Ia berteriak kepada pimpinan rapat minta bicara. Walau-

pun pimpinan rapat agak sedikit bimbang karena tidak ada acara bagi Sukarno untuk pidato, namun akhirnya desakan-desakan pemuda Sukarno dipenuhinya juga. Di depan puluhan ribu orang, Sukarno berpidato dengan semangat yang berapi-api disertai ajakan untuk melaksanakan politik percaya diri sendiri, dan tidak mengemis-ngemis kepada Pemerintah Kolonial Belanda. Sukarno segera ditarik turun oleh Kepala Polisi Kolonial Bandung dan rapat dibubarkan. Sejak itulah Sukarno dikenal sebagai singa podium di Kota Bandung. Karena itu sejak ia menamatkan studinya, ia tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia menyadari bahwa untuk Indonesia diperlukan kehadiran suatu partai politik nasional yang akan membawa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan nasional. Teman-teman Sukarno yang datang dari Nederland pun sudah mendapat pesan dari kawan-kawannya di Negeri Belanda, agar di Indonesia segera didirikan partai yang bercorak nasional sebagai alat perjuangan kaum nasionalis. Cita-cita kaum nasionalis dari Indonesia berpadu dengan cita-cita kaum nasionalis dari Negeri Belanda. Karena itu mereka merintis suatu pertemuan untuk mendirikan suatu partai nasional. Pertemuan itu diadakan di *Regentsweg no. 22* Bandung, tanggal 4 Juli 1927.

Rapat untuk mendirikan PNI ini dihadiri oleh Mr. Isqaq Tjokrohadisuryo, Mr. Sartono, Mr. Budiarto Martoatmojo, Mr. Sunario, Dr. Samsi Sastrowidagdo, Ir. Sukarno, Ir. Anwari dan dr. Cipto Mangunkusumo, Cipto Mangunkusumo tidak setuju berdirinya suatu partai nasional karena ia berpendapat bahwa partai nasional itu akan dinilai oleh pemerintah kolonial sebagai pengganti Partai Komunis Indonesia yang sudah dilarang.<sup>1</sup> Cipto Mangunkusumo ketika itu memang keberatan, karena statusnya sebagai seorang buangan di Bandung. Ia dibuang karena dituduh membantu anggota Partai Komunis yang terlarang. Namun Bung Karno dalam pembelaannya di depan Landraad Bandung tahun 1930, menyatakan Cipto Mangunkusumo sebagai salah seorang pendiri PNI.

Juga baik Bung Karno, maupun Sunario dan Isqaq, setuju nama Jan Tilaar dan Sujadi dicantumkan sebagai pendiri PNI,

meskipun mereka tidak hadir dalam rapat pembentukan tersebut. Menurut Prof. Mr. Sunario, sebelum rapat untuk mendirikan PNI, dibentuk suatu panitia persiapan. Dalam panitia itu Jan Tilaar dan Sujadi ikut serta sebagai figur yang mengambil peranan penting. Sujadi waktu itu bekerja sebagai pegawai Departemen Keuangan di Jakarta, yang banyak berkorespondensi dengan Mohammad Hatta, ketua Perhimpunan Indonesia di Nederland. Ia termasuk seorang pengedar majalah *Indonesia Merdeka* yang diselundupkan dari Nederland ke Indonesia. Sedang Jan Tilaar bekerja sebagai pegawai dari sebuah bank di Jakarta. Jadi pendiri PNI sebanyak 10 orang.

Pentingnya tanggal 4 Juli 1927 bagi perjuangan nasional Indonesia menurut analisa Prof. Sunario demikian :

”Hari Senin Paing tanggal 4 Juli 1927, empat puluh lima tahun yang lalu, jadi masih delapan belas tahun sebelum Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, adalah satu hari yang mengandung arti yang penting sekali untuk perjuangan kemerdekaan nasional kita. Karena memang benar bahwa peristiwa yang terjadi pada hari itu adalah sangat menentukan, bukan saja bagi Keluarga Besar PNI sendiri, melainkan secara obyektif juga untuk hari depan seluruh bangsa Indonesia pada umumnya. Bahkan sifat yang sangat menentukan itu bukan saja mengenai situasi politik di Indonesia sebelum Perang Dunia ke II semata-mata atau lebih tegas lagi, bukan saja mengenai episode perjuangan kemerdekaan kita sebelum tanggal 17 Agustus 1945, melainkan juga masih secara terus menerus meliputi periode sesudah itu di dalam kehidupan nasional kita.

Sebab pada tanggal tersebut lahirlah Partai Nasional Indonesia, yang bukan saja berarti sekedar bertambahnya di negeri kita ini dengan satu partai politik lain lagi di samping partai-partai yang telah ada, dan kali ini dengan satu partai baru yang bersifat nasional Indonesia dalam arti luas dan tidak chauvinistis. Tetapi PNI adalah partai yang membawa mission khusus yang tepat datangnya yakni tugas suci untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia dengan tiada membedakan agama, suku dan sebagainya dalam suatu kekuatan yang maha hebat. Karena persatuan bangsa ini merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak) untuk dapat merealisasikan cita-cita kemerdekaan

kaan bangsa Indonesia dalam bentuk satu Negara Nasional yang kompak yang hendak merupakan pintu gerbang atau jembatan emas".<sup>2</sup>

PNI yang baru didirikan itu untuk pertama kali disebut Perserikatan Nasional Indonesia. Di antara pendiri-pendiri PNI, Ir. Sukarno dinilai paling populer dan paling maju untuk memimpin partai sebagai ketua atau pemuka.

Pengurus Besar PNI yang pertama itu terdiri atas : Ir. Sukarno (ketua), Mr. Iskaq Tjokrohadisuryo (sekretaris/bendahara), Dr. Samdi Sastrowidagdo (anggota), Mr. Sartono (anggota), Mr. Sunario (anggota), dan Ir. Anwari (anggota).

#### 4.2.1 Kongres PNI

PNI di bawah pimpinan Sukarno—Iskaq dan teman-temannya menyelenggarakan kongres sebanyak dua kali. Kongres pertama diadakan setahun sesudah berdirinya PNI yakni tanggal 28 sampai 30 Mei 1928 di Surabaya. Kongres kedua diadakan pada tanggal 18 sampai 20 Mei 1929 di Jakarta. Pada umumnya organisasi politik, organisasi pemuda, sosial dan lain-lainnya tiap tahun mengadakan kongres untuk mengganti pengurus dan membicarakan program kegiatan organisasi.

Pada kongres pertama yang diadakan di gedung *Stadstuin Theater*, Surabaya, ada tiga pembicara yang penting yakni Sukarno tentang keterangan azas PNI, Iskaq tentang *exorbitante rechten*, dan Sartono tentang hak-hak berserikat, berkumpul, mencetak dan menulis. Rapat dibagi atas *besloten vergadering* (rapat tertutup) dan *openbare vergadering* (rapat terbuka). Rapat tertutup hanya dihadiri oleh pimpinan PNI dari Pusat dan wakil-wakil dari cabang.

Rapat terbuka yang selama kongres dihadiri massa sekitar 3.000 – 3.500 orang arek-arek Surabaya, terdiri atas pimpinan dan massa PNI serta simpatisan, dan tentu saja wakil Pemerintah Hindia Belanda dan PID (*Politieke Inlichtingen Dienst*). Dalam sidang terbuka itu wakil-wakil organisasi maupun pers

biasanya mendapat kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Pada kongres tersebut tercatat pembicara antara lain: utusan PSI (Partai Sarekat Islam) cabang Surabaya, utusan *Hoofd bestuur* Sarekat Madura, utusan *Indonesische Studie Club* Surabaya, utusan PPPKI (Dr. Sutomo), A.M. Sangaji dan *Hoofd bestuur* PSI dan lain-lain.

Dari ketiga pembicara utama tersebut, Sukarno dalam memberikan uraian tentang keterangan azas PNI, membicarakan panjang lebar tentang percaya diri sendiri, menolong diri sendiri dan tidak mengemis-ngemis dengan jalan membangun persatuan dan kesatuan nasional melalui usaha membangkitkan *nationale wil*, *nationale geest* dan *nationale daad*.

Sidang terbuka yang kedua pada hari Selasa sore mende-ngarkan uraian Iskaq tentang *exorbitante rechten*. Sidang dibuka oleh *Voorzitter Congres Comite* (Ketua Panitia Kongres), Ir. Anwari, dihadiri sekitar 3.500 pengunjung. Sidang dimulai pukul 20.30. Wakil Pemerintah yang hadir waktu itu ialah: Gobeë dan Datuk Tumenggung dari Kantor *voor Indonesische-Zaken*, bupati dan patih Surabaya, polisi dan beberapa pejabat lainnya. Juga wakil-wakil dari partai politik lainnya dan organisasi pemuda, wanita dan organisasi sosial serta pers.

Ketika Sukarno yang dikenal dengan "Banteng Indonesia" memasuki ruang sidang, meluaplah sorak-sorai ramai sekali menyambutnya. Ia membuka sidang dengan mengatakan bahwa Iskaq sebagai pembicara akan membacakan uraiannya tentang *exorbitante rechten* dan mengharapkan peserta rapat mende-ngarkan dengan baik. Ketua PNI itu menjelaskan bahwa uraian Iskaq itu akan dicetak untuk dijual kepada umum, sebab uraiannya sangat penting bagi kehidupan dan pergaulan di tanah air.

Iskaq dalam pembicaraannya menjelaskan tentang asal-usul *exorbitante rechten*, perkembangannya dan maksud dari *exorbitante rechten* itu dikeluarkan oleh Belanda. Iskaq menegaskan bahwa :

"dengan adanya hak-hak luar biasa di tanah air kita ini maka senantiasa terancamlah kemerdekaan diri kita, dengan adanya hak-hak luar

biasa itu, maka bagi Rakyat Indonesia tidak adalah kepastian dan ketentuan untuk bergerak merdeka, dan tidak adalah ketentuan tanggungan pemerintah akan tidak sewenang-wenang menghalang-halangi kemerdekaan diri kita, menyempitkan lapangan untuk bergerak merdeka".<sup>3</sup>

Seusai Iskaq berbicara, A.M. Sangaji dari PSI diberi kesempatan untuk berbicara. Ia menjelaskan bahwa PSI pada tahun 1924 dalam suatu rapat umum telah mengajukan suatu mosi agar *exorbitante rechten* itu dicabut namun tidak berhasil. Selanjutnya Suyudi dari PNI cabang Mataram berpendapat bahwa orang yang dijatuhi *exorbitante rechten* itu sebenarnya bukan hukuman akan tetapi mereka yang dijatuhi *exorbitante* itu merasakan suatu yang berat seperti hukuman, sedang Mr. Sartono berpendapat bahwa *exorbitante rechten* merupakan suatu rintangan besar bagi Pergerakan Nasional dan kemajuan bangsa Indonesia.<sup>4</sup>

Kemudian Sukarno yang sebagai pimpinan sidang menanyakan kepada hadirin, apakah mereka setuju atau tidak dengan *exorbitante rechten*, yang dijawab serentak dengan teriakan "tidak setuju". Sukarno lalu menjelaskan kembali apa yang sudah diuraikan Ir. Iskaq Tjokrohadisuryo bahwa banyak orang tidak mengerti tentang komunisme dan sudah lama tidak ada yang memimpin PKI, akan tetapi karena Pemerintah memandang orang-orang itu bisa merusak keamanan dan ketenteraman, maka kepada mereka dijatuhkan *exorbitante rechten* seperti dr. Cipto Mangunkusumo yang dijatuhkan *exorbitante rechten* dan dibuang ke Banda.

Hasil kongres yang penting ialah mengganti nama Perserikatan Nasional Indonesia menjadi Partai Nasional Indonesia. Untuk kepentingan penyebaran paham persatuan dan kesatuan bangsa dalam mencapai Indonesia Merdeka, diputuskan bahwa PNI akan menerbitkan surat kabar partai yang namanya "Persatuan Indonesia". Kongres menetapkan cabang-cabang yang sudah sah diakui ialah: cabang Bandung, Jakarta, Mataram/Yogyakarta, Surabaya dan Cirebon, sedang yang diakui sebagai

calon cabang ialah calon cabang Palembang, Makassar (Ujung Pandang sekarang), Pariaman, Ulusiau (Sangir – Talaut).

Keputusan kongres yang paling penting ialah pengesahan Anggaran Dasar (*statuten*). Azas dan Daftar Usaha PNI. Kongres pertama ini menetapkan kembali Ir. Sukarno sebagai ketua PNI. Susunan Pengurus lengkap sebagai berikut : Ir. Sukarno (ketua), Mr. Iskaq Tjorohadisuryo (sekretaris/bendahara). Dr. Sanusi, Ir. Anwari, Mr. Sujudi, Mr. Sartono, Mr. Sunario (anggota).

Dibandingkan dengan pengurus pertama, maka kini hanya ditambah seorang anggota pengurus yakni Mr. Sujudi. Dengan demikian maka kepemimpinan PNI masih tetap berpusat pada Sukarno dan Iskaq. Menurut Prof. Mr. Sunario, Mr. Iskaq dinilai sebagai orang yang "pintar cari duit". Oleh sebab itu ia tetap memegang jabatan bendahara. Bahkan banyak membantu Sukarno dalam keuangan.

Sekretariat PNI pada waktu itu bertempat di Gang Kenari 15, gedung milik Mohammad Husni Thamrin. Sebagai sekretaris dan bendahara, Mr. Iskaq banyak menghabiskan waktunya di tempat tersebut untuk kepentingan perjuangan nasional. Surat kabar *Persatuan Indonesia* juga bermarkas di situ. Redaksi surat kabar PNI ini yang diterbitkan sesuai dengan keputusan kongres, ialah Ir. Sukarno dan Mr. Sunario. Administrasi ditangani oleh Mr. Sartono. Barang siapa yang pernah membaca *Persatuan Indonesia* dan membandingkannya dengan surat-surat kabar lainnya ketika itu, akan sampai kepada penilaian bahwa surat kabar tersebut adalah surat kabar yang paling tajam mengkritik dan menghantam kolonialisme Belanda, serta berada di barisan paling depan untuk menanamkan persatuan dan kesatuan bangsa. Bahasa Indonesianya juga lebih baik kalau dibandingkan dengan surat kabar lainnya ketika itu. Pada "*Persatuan Indonesia*", dapat dibaca aksi-aksi massa PNI melalui rapat-rapat umum, konperensi ataupun kongres.

Kongres kedua dari PNI diselenggarakan setahun sesudah kongres pertama. Kongres ini merupakan kongres yang terakhir

untuk Partani Nasional Indonesia di masa Pergerakan Nasional. Kongres yang berlangsung dari tanggal 18 sampai 20 Mei 1929, diselenggarakan di Gedung Permufakatan Nasional, Gang Kenari 15, Jakarta. Mr. Sartono di antaranya teman-teman yang lain berusaha agar kongres kedua ini mulai dari resepsinya, sidang-sidang terbuka dan tertutup mampu memberikan corak kebangsaan yang dihayati oleh bangsa Indonesia. Menurut laporan surat kabar "*Damokondo*" dan "*Persatuan Indonesia*", resepsi pembukaan kongres berjalan sangat meriah dan bersemangat.

Resepsi dibuka tepat pukul 20.00 Mr. Sunario dari pengurus pusat berdiri dan menanyakan wakil organisasi dan wakil pers yang hadir pada waktu itu. Sesudah itu Mr. Sartono berdiri dan mengucapkan selamat datang kepada seluruh pengunjung sambil memintakan doa agar kongres berjalan dengan sukses. Pengunjung menyambut dengan tepuk tangan yang kemudian dilanjutkan dengan upacara menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil berdiri dengan iringan perhimpunan musik Melayang. Ruang sidang dihias dengan warna serba merah putih, ditambah dengan gabah-gabah, daun beringin yang hijau maya. Jalan menuju ke Gedung Permufakatan Nasional itu penuh sesak dengan orang. Di mulut gang terpancang dua tiang besar, di mana berkibar panji-panji merah putih yang ditengahnya bergambar kepala banteng segitiga. Dalam ruang terpampang pula gambar Pangeran Diponegoro yang besar sebanyak dua buah dan tiga karangan bunga ucapan selamat berkongres dari Rukun Wanodya (perhimpunan putri), Pirukunan Kebonsirih (perhimpunan kematian), dan nona Ramlah Saleh. Semua cabang PNI hadir, kecuali cabang Ulusiau karena ketuanya G. Dauhan dilarang datang ke kongres PNI oleh residen di Manado.

Utusan dari organisasi politik dan sosial lengkap hadir. Begitu pula dari pers, termasuk utusan pers dari Padang dan Palembang. Wakil organisasi yang memberi sambutan dalam resepsi itu ialah PSII Partai Serikat Islam Indonesia cabang Jakarta, Rukun Wanodya, pengurus *Kweekschool*, pengurus PSII, Budi Utomo cabang Jakarta merangkap pengurus, Muhammad-

diyah cabang Jakarta, Kaum Betawi, Pasundan cabang Jakarta, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), Pemuda Indonesia, Kecirebonan, Persatuan Koperasi Indonesia, Perhimpunan Musik Melayang, Pengurus Sarekat Madura, Pasundan, ISDP (*Indische Social Democratische Partij*), Rukun Sunda (koperasi) Taman Siswa, Margining Keutamen, Perikatan Puteri Indonesia, PPPKI dan Saerun sebagai wakil pers kiri.

Yang menarik publik ketika itu ialah penampilan kaum puteri dalam resepsi itu, yang memberikan sambutan dengan menuntut kebebasan nasional sebagai sesuatu yang belum lazim di Indonesia ketika itu. Dua pembicara terakhir paling banyak mendapat sambutan dan sorak sorai ialah Mohammad Husni Thamrin dari PPPKI dan Sukarno PNI. Tepuk tangan riuh rendah disertai sorak-sorakan menyambut Husni Thamrin, memaksa ketua PPPKI itu berdiri lima menit di depan hadirin sambil sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum ia menyampaikan kata sambutannya. Sambutan yang lebih meriah lagi diberikan kepada Sukarno, yang menganjurkan penggalangan persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai kemerdekaan nasional.

Keesokan harinya, Minggu tanggal 19 Mei, diselenggarakan sidang terbuka. Gedung yang digunakan ialah Gedung Permufakatan Nasional dan Gedung Bioskop Rialto di Senen. Pihak pemerintah mengeluarkan persatuan baru bahwa ruang sidang harus dalam keadaan tertutup dan tidak boleh ada yang berdiri. Oleh sebab itu kursi-kursi yang di Gedung Permufakatan tidak akan mampu menampung semua hadirin. Itulah sebabnya Mr. Sartono dan teman-teman pimpinan PNI berusaha mencari tempat lain yakni di Gedung Bioskop Rialto. Untuk kedua tempat tersebut, Sartono dan kawan-kawannya mengusahakan agar pembicara dan pokok pembicaraan sama. Jamnya saja yang berbeda. Di Gedung Permufakatan Nasional acara dimulai pukul 09.00 pagi, sedang di bioskop Rialto pukul 10.00. Pembicara yang sudah selesai berbicara di Gedung Permufakatan, segera ke bioskop Rialto untuk menyajikan lagi ceramahnya kepada peserta sidang di sana.

Karena bersemangatnya pengunjung ketika itu, maka antara pukul tujuh dan pukul delapan gedung-gedung tersebut sudah terisi penuh. Pengurus Pusat PNI dibagi atas dua kelompok. Sebagian memimpin sidang di Gang Kenari, sebagian lagi di Senen.<sup>9</sup>

Pada kedua tempat tersebut, apabila Sukarno, yang disebut "Banteng PNI" oleh "Darmokondo" datang, selalu disambut hangat sekali oleh hadirin sebagai tanda penghormatan sebesar-besarnya kepada Ketua PNI itu. Pada waktu itu Sukarno sudah muncul sebagai top figur dalam kepentingan Pergerakan Nasional.

Pembicara utama sesudah kata pembukaan dari ketua PNI ialah Mr. Sunario yang berbicara tentang koperasi. Mr. Sunario menekankan bahwa PNI tidak hanya berpolitik melainkan juga mengurus ekonomi sebagai syarat penting untuk mencapai kemerdekaan. Tetapi Mr. Sunario mengingatkan bahwa pengurus ekonomi tidak boleh membuat orang menjadi "mata duitan" melainkan berusaha mempercepat Indonesia Merdeka.<sup>5</sup>

Pembicara kedua sesudah Mr. Sunario ialah Mr. Ali Sastroamijoyo tentang Pergerakan Nasional di luar negeri oleh Perhimpunan Indonesia. Ditekankan oleh pembicara bahwa perjuangan Perhimpunan Indonesia hanya berjalan karena kemauan keras dari anggotanya meskipun mereka di Negeri Belanda itu melarat sekali. Pembicara selanjutnya ialah Gatot Mangkupraja yang menekankan keuntungan luar biasa dari kaum kapitalis yang mengeksploitasi rakyat Indonesia. Ia menganjurkan agar kaum buruh membentuk "*machtsvorming*" dengan mendirikan serikat-serikat buruh untuk menghadapi perlakuan yang tidak baik dari kaum kapitalis dan imperialis.

Hari berikutnya tanggal 20 Mei, Senin, adalah hari terakhir penyelenggaraan kongres PNI. Ada surat dan telegram yang diterima oleh panitia kongres, dari kalangan luar PNI yang menyatakan simpatinya kepada kongres PNI dan meminta agar acara kongres itu dilanjutkan saja. Mereka mendesak agar kongres jangan ditutup dulu. Sidang hari ketiga ini diadakan di

Gedung Permufakatan Nasional. Gedung ini milik Husni Thamrin yang sudah dipugar atas kerjasama dan bantuan berbagai kalangan yang bersimpati kepada perjuangan nasional, tidak dapat menampung pengunjung yang hadir.

Pukul 07.30 pagi, ruangan sudah penuh, tak ada kursi yang kosong. Anggota-anggota PNI terpaksa berdiri dan memberi kesempatan kepada pengunjung sidang yang bukan PNI. Panitia terpaksa membuka tikar di lantai ubin untuk orang-orang yang masing berdiri. Panitia kongres PNI agak sulit dihadapkan dengan melimpahnya pengunjung waktu itu. Ratusan orang terpaksa pulang, sedang sisanya berdiri saja di luar gedung. Wakil Pemerintah Hindia Belanda, polisi pers dan utusan organisasi lengkap hadir.

Tepat pukul 09.00 sidang dibuka oleh Suyudi, yang kemudian mempersilakan Sukarno untuk berbicara tentang Emigratie dan Tanibonden (Imigrasi dan Serikat Tani). Pidato Sukarno mengundang tampik – sorak yang ramai tetapi juga mendatangkan isak tangis dari hadirin, termasuk Sukarno sendiri, apabila ia berbicara tentang hal-hal yang sentimental yakni kesengsaraan rakyat kecil yang disaksikannya sendiri. Pembicara berikutnya ialah Suyudi tentang "hambatan-hambatan yang diperoleh kaum nasionalis terutama PNI dalam perjuangan". Dia mengemukakan bahwa ada dua penghambat pokok ketika itu ialah berbagai ketentuan perundangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti pasal-pasal karet dalam KUHP yakni pasal 153 bis dan ter, 162 bis, 169 bis dan hak gubernur jenderal yakni *exorbitante rechten*. Hambatan kedua yakni praktek kintil-kintilan dari reserse yang selalu mengintil seorang pengurus partai ke mana saja ia pergi. Praktek 'Kintil' itu bertujuan agar pemerintah kolonial memonitor seluruh kegiatan PNI. Pembicara setelah Mr. Suyudi ialah Mr. Sartono yang dengan semangat mengulas tentang perlawanan terhadap praktek lintah darat yang memeras rakyat.

Sesudah Mr. Sartono, tibalah giliran bagi sekretaris yang ditugaskan membacakan keputusan kongres. Keputusan kongres kedua ini sebagai berikut :

1. Pengurus lama terpilih kembali. Kedudukan Pengurus tetap di Bandung. Ketua Ir. Sukarno, Sekretaris Mr. Isqaq Tjokrohadi-suryo dan bendahara Mr. Sartono.
2. Dengan sekuat-kuatnya, PNI harus menyokong Bank Nasional Indonesia di Surabaya, yaitu dengan menghimpunkan uang, membeli dan menjualkan saham.
3. Pengurus PNI dikuasakan, supaya berhubungan dengan Perhimpunan Indonesia itu bisa dipandang sebagai wakilnya PNI tentang dan dalam soal-soal yang oleh Pengurus PNI dipandang bisa di-wakilkkan kepada Perhimpunan Indonesia tersebut.
4. Dengan segera-segeranya PNI harus mengadakan korban dan Studifonds yaitu fonds untuk menolong korban-korban pergerakan dan untuk membelanjai anak-anak sekolah yang cerdas pi-kirannya tetapi tidak bisa melanjutkan pelajarannya, terhalang kekuarangan uang. Diputuskan, bahwa paling lambat dua bulan, kedua fonds itu harus sudah bisa menghimpuang uang f 2.000 banyaknya.
5. Dipandang perlu, bahwasanya dengan sekuat tenaga PNI harus menghimpun perhimpunan-perhimpunan kopersi jadi satu badan, yaitu Persatuan Koperasi Indonesia.
6. Memperhatikan keadaan kaum buruh dengan berusaha menghimpunkan kaum buruh dalam perikatan.
7. Kongres PNI ketiga akan diadakan di Pekalongan.<sup>6</sup>

Selesai pembacaan keputusan kongres oleh sekretaris, tiba giliran Sukarno sebagai ketua PNI untuk menutup kongres. Sukarno sekali lagi menyerukan kepada hadirin untuk percaya diri sendiri, bekerja terus untuk mencapai apa yang dicita-citakan yakni Indonesia Merdeka. Ketua PNI itu menyampaikan tekad pengurus pusat PNI kepada hadirin dengan menyatakan: "maka kita bersumpah di hadapanmu, yaitu meskipun banyak rintangan, banyak duri, banyak 'kintil-kintilan' dan banyak cucu-nguk, tetapi kita akan bekerja terus, tidak mundur, terus bekerja supaya bisa membawa rakyat ke lapang yang lebih mulai."<sup>7</sup>

#### 4.2.2 PNI dan PPPKI

Sebelum PNI berdiri, sudah ada juga usaha untuk mengga-lang persatuan di antara kelompok-kelompok Pergerakan Nasio-

nal. Usaha-usaha itu berhasil membentuk badan kerjasama antara Budi Utomo, Sarekat Islam ISDV (*Indische Social Democratische Verseniging*), yang kemudian berubah menjadi PKI, Insulinde (NIP, ISDP (*Indische Sosial Democratische Partij*), VSTP (*Vereeniging van Spoor en Tramwegpersoneel*) Perserikatan Pegawai Kereta Api dan Trem), namanya *Radicale Concentratie* yang mengadakan aksi bersama seperti rapat-rapat umum.

Setelah tahun 1923 *Radicale Concentratie* tidak berfungsi lagi karena perbedaan pendapat antara Sarekat Islam dengan kelompok-kelompok yang beraliran kebangsaan, maka pada bulan September 1926 lahirlah Komite Persastuan Indonesia yang di dalamnya bergabung antara lain: Sarekat Islam, Muhammadiyah, *Jong Islamienten Bond*, Pasundan, Persatuan Minahasa, Sarekat Ambon, dan Sarekat Madura. Badan kerjasama ini tidak dapat berjalan dan berfungsi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pergerakan Nasional ketika itu, sehingga lahir lagi gagasan baru untuk membentuk suatu badan persatuan federatif antara organisasi-organisasi Pergerakan Nasional.

Gagasan ini dipelopori oleh tokoh-tokoh PNI yakni Sukarno, Iskaq Tjokrohadisuryo, Samsi, Anwari, Sartono, Sunario, Suyudi dan lain-lain. Lahirlah organisasi federatif Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Istilah permufakatan menunjukkan bahwa segala permasalahan akan diselesaikan dan diputuskan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. PPPKI yang didirikan di Bandung pada tanggal 17 Desember 1927, hanya lima bulan seteah PNI berdiri, adalah satu badan persatuan yang menggabungkan PNI, PSI, Budi Utomo, Kaum Betawi dan Serikat Sumatera. Organisasi yang kemudian masuk menjadi anggota PPPKI ialah Serikat Madura, Serekat Celebes dan Tirtayasa (organisasi orang-orang Banten). Setelah PNI dibubarkan pada tahun 1931, Partindo (Partai Indonesia) menggantikan kedudukan PNI dalam PPPKI.

Tiap organisasi menunjuk wakilnya untuk menjadi pemimpin PPPKI. Sukarno dan Iskaq ditunjuk sebagai wakil dari

PNI. Dari *Algemene Studie Club* ditunjuk Sartono, Samsi dan Budiarto. Karena tiga figur terakhir adalah juga anggota dan pimpinan PNI, maka kegiatan-kegiatan PPPKI banyak didominasi oleh PNI. Dari PSII ditunjuk Sukiman dan Syahbudin Latif. Dari Budi Utomo adalah Kusumo Utoyo dan Sutopo Wono-boyo, Oto Subrata, Bakri Surya Atmaja dan S. Sonjaya dari Pasundan, Parada Harahap, Dahlan Abdullah dari Serikat Sumatera, Mohammad Husni Thamrin dari Kaum Betawi, Suyono, Gondokusumo dan Sunyoto dari *Indische Studie Club*.

Sebagaimana kita ketahui, maka pada tanggal 26 Desember 1929 oleh Kongres II PPPKI di Kota Surakarta, telah didirikan sebuah "Fonds Nasional" yang maksudnya ialah untuk mengumpulkan harta benda dan dana guna keperluan nasional. Fonds ini diurus oleh suatu badan *commissie* dari PPPKI yang terdiri atas wakil-wakil dari organisasi yang diketuai oleh Mr. Sartono.<sup>8</sup>

Federasi ini berusaha menjauhkan pertentangan-pertentangan yang sering terjadi dalam menghadapi masalah-masalah tertentu. Dalam Anggaran Dasar PPPKI pasal 2 dikatakan bahwa: "ia bermaksud mendatangkan persatuan di daam aksinya perkumpulan-perkumpulan yang menjadi lidernya, dan berdaya upaya supaya aksi itu dapat menjadi lebih teratur."<sup>9</sup> Keputusan diambil dengan suara mufakat. Apabila ada organisasi yang tidak setuju terhadap suatu putusan, maka keputusan tersebut tidak mengikat organisasi yang bersangkutan. Sebaliknya keputusan mengikat semua organisasi yang sudah menyatakan per-setujuannya.

Hasil kongres pertama PPPKI di Surabaya di antaranya melahirkan beberapa keputusan. Sebagai pelaksanaan di antara hasil keputusan kongres PPPKI, diadakanlah rencana untuk melancarkan aksi massa bersama. Dua tokoh orator yang terkenal ketika itu ialah H.O.S. Tjokroaminoto dan Sukarno serta beberapa teman lainnya ditetapkan oleh kongres dalam sebuah komisi, namanya "Komisi Program Aksi". Mereka menyadari bahwa hambatan besar bagi Pergerakan Nasional ialah pasal

153 bis, ter dan pasal 116 bis. Sebab itu Komisi Program Aksi merencanakan langkah-langkah aksi menentang kolonialisme Belanda dalam bentuk rapat-rapat aksi seperti: rapat umum serentak di beberapa tempat yakni Surabaya, Jakarta, Bandung, Mataram, pada tanggal 1 September 1929 untuk menentang pasal-pasal karet tersebut dan *Poenale Sonctie*. Rapat-rapat tersebut ternyata sangat menggusarkan Pemerintah Hindia Belanda.

Pemerintah menuduh bahwa kegiatan aksi itu dan usaha *machtsvorming* sebenarnya terjadi karena hasutan orang-orang PNO. Pemerintah menyadari bahwa aksi-aksi radikal PNI sebenarnya sudah diperluas ke dalam wadah PPPKI dan banyak mempengaruhi masa organisasi lunak. Pemerintah Hindia Belanda mencari jalan dan alasan yang dapat digunakan untuk menindak PNI dan tokoh-tokohnya. Kongres PNI di Mataram (Yogyakarta) tanggal 28–29 September 1929 yang menambah anggota Pengurus Pusat dinilai sebagai suatu usaha untuk meningkatkan aksi-aksinya yang radikal.

Hasil konperensi itu menyusun Pengurus Pusat yang baru sebagai berikut :

1. Ketua : Ir. Sukarno (Bandung)
2. Sekretaris I : Mr. Iskaq Tjorohadiusryo (Bandung)
3. Sekretaris II : Gatot Mangunpraja (Bandung)
4. Penningmeester: Mr. Sartono (Jakarta)
5. Komisari : Sujadi (Jakarta)
6. Komisaris bagian Jawa Timur: Ir. Anwari (Surabaya)
7. Komisaris Bagian Jawa Tengah: Mr. Sujudi (Yogyakarta)
8. Komisaris bagian Jawa Barat: Dr. Samsi (Jakarta).

Komisaris Pengurus Pusat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa sejak PNI didirikan sampai dengan pembubarannya pada tahun 1931, Sukarno dan teman-temannya yang lain tetap ditempatkan sebagai figur puncak dalam kepemimpinan PNI. Pengembangan anggota Pengurus Pusat sebagaimana tercantum di atas adalah sesuai dengan usaha untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan PNI dalam menghadapi kolonialisme Belanda

baik sebagai aksi tersendiri maupun bersama-sama melalui PPPKI.

Demikianlah PPPKI sudah banyak mengambil langkah yang sejalan dengan hasil keputusan kongres PNI pertama tahun 1928 dan keputusan yang kedua tahun 1929. Keadaan ini tidak hanya membuat Pemerintah Hindia Belanda berusaha mengambil tindakan terhadap PNI, tetapi juga menimbulkan curiga yang makin mendalam dari beberapa pimpinan organisasi kooperatif yang bergabung dalam PPPKI. Mereka berusaha untuk mengalihkan dan mengarahkan kepemimpinan PPPKI ke arah yang lunak dan kooperatif. Usaha itu nampak berhasil ketika kepemimpinan PPPKI yang semula didominasi tokoh-tokoh PNI dan berkantor di Bandung, berhasil dialihkan ke tangan dr. Sutomo dari *Indonesche Studie Club*, sedang sekretarisnya pun dipindahkan ke Surabaya. Ir. Sukarno dan tokoh-tokoh PNI lainnya yang semula memainkan peranan yang menentukan dalam PPPKI, kian menjauh, kecuali Ir. Anwari dari pengurus PNI yang tinggal di Surabaya dan masih tetap berperanserta dalam kepemimpinan PPPKI di bawah dr. Sutomo. Meskipun demikian, pemerintah tetap tidak bisa memisahkan PNI dan tokoh-tokohnya seperti Sukarno, Iskaq, Sartono, Sunario dengan kegiatan-kegiatan PPPKI. Kesempatan bagi pihak Belanda untuk bertindak, PPPKI akan mengadakan kongresnya di Surakarta pada tanggal 25 sampai 27 Desember 1929. Untuk mencegah pengaruh PNI yang makin jauh pada PPPKI, maka sebelum dan sesudah Kongres PPPKI, Gubernur Jenderal Foch memerintahkan penangkapan besar-besaran terhadap tokoh-tokoh PNI.

#### 4.2.3 PNI dan Pergerakan Pemuda

Kehadiran PNI banyak mempengaruhi perjuangan pemuda dalam Pergerakan Nasional. Sejak PNI didirikan pada tanggal 4 Juli 1927, semangat kebangsaan makin bertambah dan tertanam pada gerakan pemuda sampai dengan akhirnya Ikrar Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.

Sebelum PNI berdiri, organisasi-organisasi pemuda sudah menyadari perlunya persatuan. Semangat kebangsaan telah tumbuh dan berkembang, dan perjuangan mereka makin mendapat arti untuk mencapai kemerdekaan nasional setelah PNI didirikan. Kegiatan pemuda yang patut dicatat sebelum berdirinya PNI ialah Kongres Pemuda Indonesia pertama yang diselenggarakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Ketua kongres ialah Mohammad Tabrani yang kelak menjadi seorang tokoh PNI. Tujuan kongres ialah: "Menggugah semangat kerjasama di antara bermacam-macam organisasi pemuda di tanah air kita, supaya dapat mewujudkan dasar pokok untuk lahirnya persatuan Indonesia di tengah-tengah bangsa di dunia".<sup>10</sup>

Sesudah kongres pemuda tersebut di atas, lahir organisasi mahasiswa yang tidak lagi mempersoalkan perbedaan suku yakni Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). Pendiri PPPI pada bulan September 1926 antara lain ialah Abdullah Sigit, Sugondo Joyopuspito, dan Suwiryo yang kemudian menjadi seorang tokoh PNI. Organisasi pemuda yang peranannya makin besar sejak tahun 1926 di kalangan gerakan pemuda ialah *Jong Java*. *Jong Java* memiliki anggota yang paling banyak jika dibandingkan dengan organisasi pemuda lainnya. Cabang-cabangnya tersebar di seluruh Jawa. Tokoh-tokoh PNI umumnya pernah menjadi anggota dan pimpinan *Jong Java* sebelum terjun ke dalam PNI. Organisasi pemuda yang mempunyai hubungan batin paling kuat dengan PNI ketika itu ialah *Jong Java*, *Jong Indonesia* dan PPPI, di samping organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda yakni Perhimpunan Indonesia.

*Jong Java* sejak tahun 1920-an mulai melepaskan belenggu kesukuannya untuk memperjuangkan persatuan nasional. Dalam anggaran dasar hasil kongresnya yang ke-7 di Yogyakarta tanggal 27-31 Desember 1924, dicantumkan watak keindonesiaannya sebagai berikut :

"Tujuannya ialah mempersiapkan anggota-anggotanya agar kelak turut membantu dalam pembentukan Jawa Raya dan un-

tuk mengembangkan rasa kesatuan di antara suku-suku bangsa Indonesia supaya di kemudian hari mendirikan Negara Indonesia yang merdeka.<sup>11</sup>

*Jong Java* bersama organisasi pemuda lainnya seperti Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, *Jong Bataks Bond*, Sekar Rukun, *Jong Islamieten Bond*, *Jong Ambon* dan *Jong Minahasa* mengadakan rapat bersama pada tanggal 20 Februari 1927 dan memutuskan bahwa "Persatuan Indonesia" dan "Kemerdekaan Indonesia" sebagai cita-cita bersama. Dalam pertemuan itu *Jong Java* menganjurkan agar persatuan pemuda yang akan dibentuk, "berdiri atas kebangsaan dan netral agama". Pertemuan berikutnya diadakan pada tanggal 23 April 1927 yang dihadiri oleh *Jong Java*, *Jong Sumatranen Bond*, *Jong Bataks Bond*, *Jong Ambon*, *Jong Minahasa*, *PPPI* dan *Jong Indonesia*. Mereka memutuskan pada rapat itu bahwa organisasi pemuda yang boleh masuk badan persatuan pemuda ialah organisasi pemuda berdasarkan kebangsaan.<sup>12</sup>

Organisasi-organisasi pemuda itu pun memiliki organisasi kepanduan seperti : *Jong Java Pandvinderij* dan *Jong Java, Natipij (National Islamiesche Padvinderij)* dari *Jong Islamieten Bond*, *INPO (Indonesisch Nationale Padvinders Organisatie)* dari Pemuda Indonesia, *Pandu Pemuda Sumatra* dari *Jong Sumatranen Bond*, Organisasi-organisasi kepanduan tersebut ditambah dengan *SIAP (Sarekat Islam Afdeling Pandu)* dan *Nationale Padvinderij*, digabung daam federasi kepanduan namanya *PAPI (Persaudaraan Antar Pandu Indonesia)*. *PAPI* dipimpin oleh Sunario dari *PNI*.

#### 4.2.4 *PNI dan Sumpah Pemuda*

Kongres Pemuda Indonesia kedua yang diselenggarakan pada tanggal 27–28 Oktober 1928 di Jakarta, hanya satu tahun empat bulan sesudah *PNI* berdiri dan hanya lima bulan sesudah kongres *PNI* pertama di Surabaya. *PPPI* yang menjadi motor dari Kongres Pemuda Indonesia Kedua itu, tokoh-tokohnya dikenal sebagai anggota ataupun pimpinan *PNI* sebelum dan

sesudah kongres seperti Suwiryo, Sartono, Sunario, Subagio Reksodipuro, Muhammad Yamin, A.K. Gani, Tamzil, Sumanang Amir Syarifuddin, Syahrir dan lain-lain. Sugondo dan Suwiryo masing-masing sebagai ketua dan sekretaris, mempunyai peranan yang sangat penting dalam kongres Pemuda Indonesia Kedua itu. Mereka serumah dengan Arnold Mononutu, anggota PNI dan eks ketua Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda, sehingga Arnold Mononutu dapat memberikan bimbingan dan pengaruhnya langsung kepada mereka dalam memimpin kongres. Sartono, salah seorang pendiri PNI dan juga seorang pimpinan PNI, bertindak sebagai penasihat hukum terhadap para pemuda dalam penyelenggaraan kongres itu. Menurut Sunario, pimpinan pemuda ketika itu banyak meminta nasihat tokoh-tokoh PNI seperti Sukarno, Iskaq, Sartono, Sunario dan lain-lain, dalam hubungan dengan penyelenggaraan kongres. Seperti contohnya izin kongres itu mengalami kemacetan, berhasil diatasi oleh Sunario. Kericuhan dalam pembukaan dan sidang kongres pemuda dengan Polisi Kolonial Pemerintah Hindia Belanda, dapat diatasi oleh Sartono dengan cukup diplomatis dan yuris.<sup>13</sup>

Utusan-utusan dari PNI yang hadir ialah: Sartono (PNI Cabang Jakarta), Inu Martokusumo (PNI Cabang Bandung), Sunario (PAPI, INPO dan Pengurus Besar PNI), Arnold Mononutu (*Jong Selebes*, anggota PNI). Tokoh-tokoh lainnya yang hadir juga dalam kongres itu ialah: Mangunsarkoro, Dien Pantouw (kemudian menjadi isteri Sunario), Suwiryo, Sumanang, Anwari (semuanya dari PNI). Di samping itu banyak juga yang di luar PNI. Nampak bahwa tokoh-tokoh PNI banyak yang menghadiri Kongres Pemuda Indonesia Kedua itu dan memberikan peranan yang penting terhadap jiwa dan semangat kongres.

#### 4.3 *Kegiatan Dalam Bidang Sosial*

Dalam masyarakat asli Indonesia banyak ditemukan kelompok masyarakat yang memiliki kebiasaan tolong-menolong satu sama lain, terutama dalam menghadapi masalah yang sulit

dan tak bisa dikerjakan sendiri. Masyarakat asli Indonesia yang monistis itu berada pada suatu lingkaran keterikatan sosial yang biasanya dijalankan dengan sesuatu jaringan upacara keagamaan suku yang majemuk. Kebiasaan tolong-menolong dalam masyarakat itu sekarang dikenal istilah gotong royong.

Pengaruh organisasi moderen yang berasal dari Eropa mengubah ide keadilan sosial dan kegiatan sosial itu menjadi kegiatan kolektif terorganisasi hasilnya lebih efektif. Organisasi modern itu mentransformasikan jiwa dan semangat tolong menolong yang sebelumnya sudah hidup di dalam masyarakat Indonesia. Contoh tentang kehidupan klasik bercorak komunal di Indonesia ialah kehidupan pada masyarakat Samin di Blora sekitar tahun 1890, dipimpin oleh Kiai Samin alias Surantiko atau lebih dikenal nama Pak Engkrek.<sup>1 4</sup>

Gerakan Saminisme meliputi 2.300 kepala keluarga yang tersebar di Rembang, Ngawi, Grobogan, Pati dan Kudus. Mereka memamerkan suatu kehidupan sosial dengan disiplin ketat dan penuh sakral serta menilai bahwa manusia itu sama derajat. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Gerakan Saminisme memelihara suatu kehidupan demokratis dalam bidang sosial ekonomi dan juga politik. Harta bendanya adalah milik komunal. Tanah dan kekayaan yang dikelola adalah milik bersama

dan digunakan untuk kepentingan bersama. Agamanya bernama DAM, yang percaya kepda Nabi Adam. Sembahyang empat kali sehari. Apabila ada yang akan menikah maka mereka akan dikawinkan sesuai dengan adat yang berlaku dalam masyarakat Samin tidak melalui penghulu atau pihak pemerintah. Gerakan Samin bersikap non-koperasi terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Mereka tidak mau membayar pajak kepada pemerintah yang menilai sebagai memeras rakyat. Banyak kepala keluarga yang disita kekayaannya, karena tidak membayar pajak. Di samping itu pemerintah mengambil tindakan lebih keras lagi dengan mengadakan penangkapan-penangkapan. Tetapi mereka lebih senang masuk penjara bersama-sama dari pada harus membayar

pajak. Itulah sebabnya banyak di antara keluarga masyarakat Samin dipenjarakan Pemerintah Hindia Belanda.

Namun keterikatan sosial dan moral masyarakat Samin memberikan kewajiban kepada masyarakat komunal itu untuk menanggung kehidupan keluarga yang menderita kesulitan. Dalam masyarakat Samin gerakan moral itu sangat penting. Tidak diperkenankan adanya penipuan, pencurian, perampokan, zinah dan bentuk-bentuk penyelewengan lain yang merugikan sesama anggota kelompok itu.

Setiap tindakan yang dinilai melanggar nilai-nilai masyarakat komunal akan ditindak sesuai dengan hukum yang sudah diatur dalam masyarakat Samin. Sikap dan tindak-tanduk masyarakat Samin dinilai tidak memperdulikan pemerintah dan bahkan dianggap sebagai pemberontakan. Akibatnya pimpinan mereka Kiai Samin ditangkap dan dibuang ke Sumatera. Di sana ia meninggal sebagai manusia buangan pada tahun 1914. Meskipun demikian, gerakan Samin tidak hilang dengan sendirinya. Ide-ide sosial dan gerakan-gerakan sosial demikian masih dapat dicari contoh-contohnya dalam kelompok-kelompok komunal di kawasan Indonesia lainnya.

Kenyataan tersebut membawa kita kepada suatu pengertian bahwa ide-ide sosial yang berasal dari Barat seperti ide-ide sosialnya Karl Marx dan Friederick Engels, semangat dan jiwanya tidak asing sama sekali bagi masyarakat Indonesia. Bahkan agama yang masuk ke Indonesia seperti agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen, pada hakikatnya memiliki dasar-dasar keadilan sosial yang mendalam dengan perkataan lain, ide keadilan sosial, hidup sama rasa sama rata, tidak selamanya bersumber kepada ajaran Marx – Engels.

Dalam hubungan inilah tokoh-tokoh PNI seperti Sukarno, Iskaq, Sartono, Sunario, Samsi, Anwari dan lain-lain berusaha memelopori gerakan politik dan sosial ekonomi dengan sasaran utamanya ialah memperbaiki masyarakat Indonesia yang sudah rusak akibat eksploitasi imperialisme dan kolonialisme. Dengan

gerakan politik, PNI bertujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang miskin terutama hendak membangun sesuatu masyarakat adil makmur, di seberang "jembatan emas" proklamasi.

#### 4.3.1 *Ide-ide Keadilan Sosial*

Ide-ide keadilan sosial dari PNI dapat diketahui dari keputusan-keputusan kongres PNI pertama tanggal 18–20 Mei 1928 dan keputusan kongres PNI kedua tanggal 28–30 Mei 1929. Begitu pula dalam berbagai kesempatan tokoh-tokoh PNI selalu mengemukakan ide sosialnya. Ketika itu tokoh-tokoh PNI begitu populer sehingga mereka selalu diundang untuk memberikan ceramah dalam kongres koperasi atau rapat umum sesuatu organisasi politik ataupun organisasi sosial, ekonomi dan budaya.

Apabila kita teliti beberapa surat kabar seperti "Persatuan Indonesia", *Darmokondo*, *Bahagia* dan lain-lain antara tahun 1927–1930 periode tulisan-tulisan Sukarno pada periode yang sama, belum nampak istilah "Marhaen" dan "Marhaenisme", dalam hubungan dengan ide keadilan sosial yang hendak diperjuangkan PNI.

Istilah "Marhen" dan "Marhaenisme" baru secara menyolok digunakan oleh Sukarno dalam pembelaannya di depan Pengadilan Bandung tahun 1930. Pembelaan Sukarno yang terkenal di Indonesia dengan nama "Indonesia Menggugat" itu, banyak mengupas tentang dasar-dasar perjuangan PNI untuk mencapai kemerdekaan nasional dan membangun masyarakat adil dan makmur sebagai sasaran kemerdekaan. Tulisan-tulisan Bung Karno sebelum ditangkap bulan Desember 1929 seperti yang dimuat dalam buku *Dibawah Bendera Revolusi*, belum ada yang menggunakan istilah "Marhaen" dan "Marhaenisme". Istilah-istilah tersebut baru digunakan dalam tulisan-tulisan Bung Karno sesudah keluar dari penjara Sukamiskin tahun 1931. Berarti bahwa istilah "Marhaen" dan "Marhaenisme" baru digunakan secara resmi ketika Bung Karno memimpin Partai Indonesia (Partindo).

Namun demikian ide-ide keadilan sosial yang dilancarkan oleh PNI, maupun ide keadilan sosial di mana Partindo adalah sama. Tidak ada perbedaan. Baik PNI maupun Partindo, sama-sama melancarkan aksi masa menentang imperialisme, kolonialisme dan kapitalisme. Sukarno dan kawan-kawannya setiap kesempatan selalu mengupas keburukan-keburukan kapitalisme sebagai suatu tata pergaulan masyarakat, yang dalam bidang produksi memisahkan alat produksi dengan kaum buruh, sehingga mengakibatkan keuntungan yang berlebihan dari produksi terakumulasi pada kaum majikan atau pengusaha, sedang di pihak lain kaum buruh menderita kemelaratan dan kemiskinan. PNI selalu menegaskan bahwa modal asing yang selalu mengalir masuk ke Indonesia akibat politik pintu terbuka dari Pemerintah Belanda tidak akan membawa rahmat bagi rakyat Indonesia. Dengan politik itu maka kapitalis internasional dari Jepang, Jerman, Amerika, Inggris, Italia, Perancis, Belanda masuk ke Indonesia untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia dan memeras tenaga rakyat Indonesia yang murah untuk mendapat keuntungan yang besar.

Menurut Sukarno, hal ini terbukti dari ekspor Indonesia yang jauh lebih tinggi bila dibanding dengan impor. Bung Karno dalam *Suluh Indonesia Muda* tahun 1932 dengan tulisan yang berjudul "Swadeshi dan massa aksi di Indonesia" membuat perbandingan antara ekspor yang jauh melebihi impor.<sup>15</sup>

Bung Karno juga dalam tulisan-tulisannya seperti "Mencapai Indonesia Merdeka", "Sosio-Nasionalisme dan Sosio Demokrasi", menandakan agar perjuangan kaum marhaen Indonesia jangan mengalami nasib seperti perjuangan rakyat jelata Perancis di masa Revolusi Perancis. Di sana golongan rakyat jelata yang memulai revolusi. Mereka yang menggerakkan revolusi itu di bawah pimpinan Mirabeau. Tetapi akhirnya hasil revolusi hanya dinikmati kaum borjuis Perancis. Kaum kapitalis Perancis berhasil mengambil alih kekuasaan dan kepemimpinan dalam revolusi sehingga rakyat jelata tidak mendapat apa-apa

dari revolusi yang mereka gerakkan sendiri. Mereka hanya terkena getahnya.

PNI berjuang untuk mencapai kemerdekaan dan pembangunan suatu masyarakat yang berkeadilan sosial di seberang "jembatan emas" yang namanya proklamasi. PNI menganjurkan agar rakyat Indonesia berpikir merdeka, percaya pada diri sendiri dalam bidang ekonomi, dan jangan bersandar pada sistem kapitalisme, sebab kapitalisme akan membawa malapetaka bagi kaum marhaen Indonesia. Salah satu jalan keluarnya ialah mendirikan koperasi. Di mana-mana PNI menganjurkan kepada rakyat untuk mendirikan koperasi sebagai syarat penting bagi kemakmuran kaum marhaen. Rakyat Marhaen telah mungkin berdiri sendiri dengan modal nol. Mereka harus bekerjasama, bergotong royong dalam urusan ekonomi yang dikenal dengan koperasi, di samping usaha memajukan perusahaan dan perdagangan rakyat untuk memperkuat ekonomi bangsa.

Sebagai penompang terhadap kegiatan ekonomi merdeka dan percaya pada diri sendiri. PNI menganjurkan didirikan serikat buruh dan serikat taani. Serikat-serikat buruh itu harus berada pada barisan depan dalam menghadapi stelsel kapitalisme untuk memperjuangkan kepentingan kaum buruh dan rakyat secara keseluruhan. Kaum buruh tidak dapat berdiri sendiri secara individual menghadapi kekuasaan para majikan dengan stelsel kapitalisme yang terkordinasi secara efektif. Organisasi buruh yang kuat adalah syarat mutlak bagi kaum buruh untuk memperjuangkan kepentingannya.

Bertitik tolak dari pendirian tersebut, PNI mendorong berdirinya berbagai serikat buruh seperti Persatuan Motoris (sopir) Indonesia (PMI), Serikat Anak Kapal Indonesia (SAKI) di Jakarta, Persatuan Jongos Indonesia (PDI) dan *Cost Java Spoor Bond* Indonesia di Surabaya.

Ide Sosial dari PNI lebih lanjut dapat dibaca pada keputusan Kongres PNI pertama yang menyangkut bidang sosial. Akan

tetapi lebih terperinci lagi dilihat pada rancangan daftar usaha yang dipersiapkan Pengurus Besar PNI menjelang kongres.

Dengan demikian maka pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, khususnya yang menyangkut pelaksanaan keadilan sosial, telah kita temukan dalam ide keadilan sosial yang diperjuangkan oleh PNI dengan pemimpin-pemimpinnya termasuk di antaranya Mr. Sartono.

#### 4.3.2 *PNI dan Pendidikan Nasional*

Mr. Sartono adalah manusia yang sama sekali tidak mau lepas perhatiannya dalam bidang politik, sosial maupun pendidikan. Kita mengetahui semua bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia pada awal abad ke-20 dari pihak Pemerintah Hindia Belanda jauh dari memadai. Keadaan ini sangat disadari oleh rakyat Indonesia yang terpelajar. Mereka menyadari bahwa kemajuan rakyat Indonesia hanya bisa dicapai melalui pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan yang tidak mempunyai hubungan khusus dengan salah satu agama, melainkan berdasarkan kepada kebangsaan semata-mata yakni Lembaga Pendidikan Taman Siswa, Ksatrian Institut, INS (*Indonesische Nederlandsche School*) Kayu Tanam dan Perguruan Rakyat.

Banyak kaum nasionalis, khususnya dari PNI seperti Sartono, Sunario dan lain-lain mengambil peranan pada sekolah-sekolah kebangsaan itu, baik sebagai guru, pengurus ataupun sebagai donatur.

Di antara lembaga-lembaga pendidikan tadi, Pengurus Rakyat yang mempunyai hubungan langsung dengan Partai Nasional Indonesia. Berdirinya Perguruan Rakyat pada bulan Desember 1928 adalah atas dorongan PNI. Biaya penyelenggaraan Perguruan Rakyat berasal dari dua sumber. Sumber pertama ialah dari para pelajar, sedang sumber kedua berasal dari para donatur termasuk Sartono, Sunario, Suwiryono dan banyak yang lain lagi dari para tokoh PNI.

Tokoh-tokoh PNI yang ikut mengurus Perguruan Rakyat ini ialah: Mr. Sartono, Mr. Sunario, Arnold Mononutu, Wilopo, Suwiryo dan lain-lain. Pengurus pertama dari Perguruan Rakyat ini terdiri atas :

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Ketua        | : Dr. Mr. Mohammad Nazir |
| Penulis I    | : Arnold Mononutu        |
| Penulis II   | : Sudarmoatmojo          |
| Bendahara I  | : B. Tomowardoyo         |
| Bendahara II | : S. Martadisastra       |
| Anggota      | : Dr. Asikin             |
|              | : Mr. Muhammad Yamin     |
|              | : Nyonoprawoto           |
|              | : Sunarko.               |

Badan Pengawas terdiri atas :

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Ketua   | : R.A.A. Kusumo Utoyo     |
| Penulis | : D. Kusuma Subrata       |
| Anggota | : Mr. Hadi                |
|         | : Dahlan Abdullah         |
|         | : Mr. Sartono             |
|         | : Mohammad Husni Thamrin. |

Perguruan Rakyat akhirnya membuka Universitas Rakyat (*Volks Universteit*) yang disebut juga Perguruan Rakyat Malam, karena memberikan kuliahnya pada malam hari. Direktornya ialah Arnold Mononutu. Pelajaran yang diberikan antara lain geografi, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Belanda, Sosiologi tatanegara, tata buku dan stenografi. Ceramah-ceramah juga diberikan seminggu sekali seperti oleh: Ki Hajar Dewantara tentang perguruan dan pendidikan, dr. Sarjito tentang penyakit malaria, dr. Purbocaroko tentang bahasa Indonesia, Kusuma Subrata tentang Ddewan kabupaten, dr. Asikin tentang kesehatan, Saerun dan Jamaluddin Adinegoro tentang jurnalistik.

Guru-guru di Perguruan Rakyat banyak diambil dari mahasiswa di Jakarta, yang sekaligus mendidik pribadi-pribadi

mereka sebagai calon-calon pemimpin, di samping membantu mereka dalam mengikuti kuliah. Perguruan rakyat juga membuka Perguruan Rendah Umum Penambah (PROP), Perguruan Rendah Umum Luas (PROL), setingkat MULO, Perguruan Rendah Umum (PRO) setingkat HIS. Juga dibuka Biro Kuonsultasi Kesehatan, pimpinan Prof. dr. Sarjito dan Biro Konsultasi Hukum pimpinan Mr. Sartono. Selanjutnya dibuka pula persiapan untuk perguruan tinggi setingkat AMS. Juga dibuka Perguruan Umum Pendidikan (POP), setingkat dengan *Kweek-school* dan Perguruan Rumah Tangga Indonesia (PERTI), setingkat *Huishoudschool*.

Untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan dari Perguruan Rakyat, Mohammad Husni Thamrin bersedia memberikan bantuannya dengan membeli rumah bekas pendinginan daging di Gang Kenari, di samping Gedung Permufakatan Nasional. Penyelenggaraan pendidikan berjalan lancar dengan disiplin dan semangat nasional yang tinggi. Menurut Arnold Mononutu Sekretaris Perguruan Rakyat, setiap minggu Perguruan Rakyat mendapat pemeriksaan dari pihak Departemen van Onderwijs yang biasanya memberi pujian terhadap Perguruan Rakyat. Bantuan yang ditawarkan oleh *Departement van Onderwijs*, ditolak oleh Perguruan Rakyat karena bantuan itu dapat mengikat cita-cita dan perjuangan Perguruan Rakyat. Resikonya ialah bahwa penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Rakyat berjalan secara sederhana. Pengajar-pengajarnya kaum nasionalis, terpaksa menerima honor yang minim. Arnold Mononutu sebagai Sekretaris Perguruan Rakyat menerima 40 gulden. Muhammad Yamin sebagai pengajar sejarah menerima 25 gulden. Darmawan Mangunkusumo dan Gunawan Mangunkusumo, saudara dari Cipto Mangunkusumo, masing-masing menerima 25 gulden. Pengajar-pengajar lainnya yang turut memberikan darma baktinya kepada pendidikan nasional ketika itu melalui Perguruan Rakyat ialah Amir Syarifuddin, Sunario, Sugarda Purbakawatja, A. K. Gani, Tamzil, Latif Hendraningrat, Nur Sultan Iskandar, Suwiryono dan lain-lain.

#### 4.3.3 PNI Dibubarkan

Tindakan Pemerintah Hindia Belanda yang dilakukan pada tanggal 29 Desember 1929 terhadap Partai Nasional Indonesia, disudahi dengan penuntutan keempat pemimpin PNI, yaitu Ir. Sukarno, Gatot Mangkupraja, Maskun dan Supriadinata, atas dakwaan melanggar artikel 153 bis 169 dari *Buku Hukum Siksa*.

Dalam keputusan *Landraad Bandung* pada tanggal 22 Desember 1930 maka keempat pemimpin PNI itu dianggap sudah melanggar pasal-pasal tersebut dari *Buku Hukum Siksa*, dan atas diri mereka dijatuhkan hukuman masing-masing 4 tahun, 2 tahun, 1 tahun 8 bulan dan 1 tahun 3 bulan.

Berhubung dengan keputusan itu maka keempat tokoh PNI tadi telah naik appel ke hakim yang lebih tinggi (*Raad van Justitie*). Pada tanggal 17 April 1931 keluarlah keputusan *Raad van Justitie*, yang menguatkan vonis *Landraad Bandung* itu.

Oleh karena keputusan ini, maka PNI pada tanggal 16 April 1931 telah mengadakan kongres luar biasa yang kedua kalinya di Jakarta untuk menentukan sikapnya.

Kongres ini dikunjungi oleh wakil-wakil dari segenap cabang-cabang PNI dan mengambil keputusan sebagai berikut:

1. bahwa vonis *Landraad Bandung* yang dikeluarkan oleh *Raad van Justitie* melukai perasaan keadilan dari Rakyat Indonesia seluruhnya.
2. bahwa keempat pemimpin itu dan Partai Nasional Indonesia tidak berdosa.
3. bahwa vonis *Landraad Bandung* yang diperkuat oleh *Raad van Justitie* tidak hanya mengenai ke empat pemimpin itu saja, tetapi juga mengenai segenap partai.
4. bahwa vonnis tadi semata-mata membunuh Partai Nasional Indonesia.
5. bahwa karena keadaan memaksa (*overmacht*) lebih sempurna membubarkan Partai kita.<sup>16</sup>

dan akhirnya mengambil keputusan membubarkan Partai Nasional Indonesia.

Sungguhpun perkumpulan Partai Nasional Indonesia dibubarkan, kita percaya, bahwa semangat kebangsaan dan kesadaran yang ditanam oleh PNI di hati sanubari rakyat akan lebih berkobar-kobar dan kita percaya bahwa Rakyat Indonesia akan lebih giat bekerja untuk mencapai kemerdekaan tanah air dan bangsa, yang akan datang.

### Dengan salam nasional

Jakarta, 25 April 1931.

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Mr. Sartono . . . . .       | (Hoofdbestuur) |
| S. Angronsudhirjo . . . . . | (Hoofdbestuur) |
| Ir. Anwari . . . . .        | (Hoofdbestuur) |
| Suwiryo. . . . .            | (Hoofdbestuur) |
| Sukemi . . . . .            | (Hoofdbestuur) |
| Manadi . . . . .            | (Hoofdbestuur) |
| Sungeb (Jakarta)            |                |
| Sukarto (Jakarta)           |                |
| Subroto (Jakarta)           |                |
| Kr. Lawi (Pekalongan)       |                |
| M. Yahya Ns (Pekalongan)    |                |
| Sofyan (Pekalongan)         |                |
| Harun Ali (Pekalongan)      |                |
| Nungtijk (Palembang)        |                |
| Mr. Suyudi (Mataram)        |                |
| Sutarjo (Bandung)           |                |
| Moh. Thoib (Bandung)        |                |
| Wiyono (Malang)             |                |
| Sudarmo (Malang)            |                |
| Atmaji (Surabaya)           |                |
| Pranata (Surabaya)          |                |
| Dwijowiyoto (Semarang)      |                |
| Atmosantoso (Semarang)      |                |
| Sujadi                      |                |
| Mr. Ali Sastroamijoyo.      |                |

- Keputusan tentang kekayaan partai adalah sebagai berikut:
- 1) Kekayaan cabang Surabaya diserahkan kepada Taman Siswa (penyerahan dikuasakan pada M. Atmaji).
  - 2) Kekayaan cabang Semarang diserahkan kepada Tuan Tjipto (penyerahan dikuasakan pada T. Dwijotenoyo).
  - 3) Kekayaan cabang Malang diserahkan pada Taman Siswa dan Perguruan Rakyat (penyerahan dikuasakan pada T. Wiyono).
  - 4) Kekayaan cabang Mataram diserahkan pada Taman Siswa dan Perguruan Rakyat (penyerahan dikuasakan pada T. Mr. Suyudi).
  - 5) Kekayaan cabang Bandung diserahkan kepada Cooperatie Karukunan (penyerahan dikuasakan pada T. Manadi).
  - 6) Kekayaan cabang Palembang diserahkan pada Badan Permufakatan Pergerakan Palembang (penyerahan dikuasakan pada T. Samidin).
  - 7) Kekayaan cabang Pekalongan barang-barang diurus oleh Komite terdiri atas saudara-saudara Kr. Lawi, Yahya, Y. Yusuf untuk diserahkan pada pendirian-pendirian nasional yang dianggap perlu.
  - 8) Uang pada fonds Taman Siswa buat beli alat sekolah (penyerahan dikuasakan pada T. Kr. Lawi).
  - 9) Kekayaan cabang Jakarta: sekolah-sekolah BOMA diserahkan kepada komite terdiri atas tuan-tuan Suwiryo, Nyonyo, Sukarto, Subroto dan Sungeb. Kursi-kursi yang ada di Gang Kenari buat Perguruan Rakyat. Poliklinik kepada komite yang terdiri atas tuan-tuan dr. Asikin, Mr. Sartono dan Angronsudhirjo

#### 4.4 *Mr. Sartono mendirikan PARTINDO*

Sejarah berdirinya Partai Indonesia (PARTINDO) adalah sebagai berikut. Pada tanggal 26 April 1931 bertempat di Kramat 97 pav. telah berkumpul: Mr. Sartono, Manadi, Sukemi, Angronsudhirjo dan Suwiryo, untuk merencanakan pendirian partai politik baru. Setelah diadakan pembicaraan panjang lebar, maka pertemuan mengambil keputusan:

1. dengan selekas-lekasnya harus didirikan partai politik baru, yang memakai tujuan Indonesia Merdeka, dan yang memakai azas-azas "tiap-tiap bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib diri sendiri, "persatuan Indonesia, tidak membeda-bedakan deraja dan agama".
2. keputusan ini akan disiarkan di surat-surat kabar.
3. partai tersebut akan didirikan pada tanggal 29 April 1931.
4. susunan kata dan kalimat dari Anggaran Dasar dan Azas-azas akan ditetapkan pada lain hari.<sup>17</sup>

Pada tanggal 29 April 1931 partai tersebut didirikan dengan memakai nama "PARTAI INDONESIA" (PARTINDO). Yang duduk dalam Pengurus Besar (Pengurus Pusat) ialah semua anggota-anggota dewan pendiri, yaitu :

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Pemuka/Ketua . . . . . | Mr. Sartono    |
| Penulis . . . . .      | Suwiryo        |
| Bendahari . . . . .    | Angronsudhirjo |
| Pembantu . . . . .     | Manadi         |
| Pembantu . . . . .     | Sukaemi.       |

Berhubung dengan beberapa hal maka Angron Sudirjo meletakkan jabatannya sebagai bendahari dari Pengurus Besar, dan diganti oleh Suwiryo. Sedangkan jabatan penulis yang tadinya dipegang oleh Suwiryo digantikan oleh Nyonoprawoto. Jadi susunan Pengurus Besar Partai Indonesia sesudah itu adalah sebagai berikut :

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Mr. Sartono . . . . .   | Pemuka/Ketua                       |
| Manadi . . . . .        | Wakil pemuka                       |
| Nyonoprawoto . . . . .  | Penyurat<br>(Gang Kenari II No. 2) |
| Suwiryo . . . . .       | Bendahari                          |
| Sudarmoatmojo . . . . . | Pembantu                           |
| Sukaemi . . . . .       | Pembantu                           |
| Yusuf Yahya . . . . .   | Pembantu                           |

Untuk mengerjakan cita-cita partai, maka partai telah mengadakan badan-badan sebagai berikut :

1. Badan pengurus perguruan pemimpin sebagai pemuka S. Tirtosupono dan penulis Suwiryo.
2. Badan pengurus soal pengajaran nasional sebagai pemuka Sudarmoatmojo dan penulis Yusuf Yahaya.
3. Badan pengurus soal ekonomi sebagai pemuka Mr. Sartono dan penulis Winoto.
4. Badan pengurus soal pergerakan sekerja sebagai pemuka Mr. Sartono dan penulis Achmad Sumadi.
5. Badan pengurus soal pers sebagai pemuka Nyonoprawoto dan sebagai penulis Yusuf Yahya.

Tujuan Partai Indonesia ialah "Indonesia Merdeka". Jalan untuk mencapai tujuan ialah:

- a. memperkuat usaha bangsa Indonesia supaya mendapat hak-hak politik yang seluas-luasnya dan supaya mendapat suatu pemerintahan yang berdasar kerakyatan dan kebangsaan.
- b. memperbaiki peri-kehidupan sosial dan memajukan perekonomian bangsa Indonesia.

Mr. Sartono dalam mendirikan dan memimpin Partai Indonesia cukup berhasil. Walaupun dalam pembubaran PNI banyak desas-desus kiri kanan mengatakan pemimpin tidak ada jiwa kerakyatan dalam pembubaran PNI. Kemudian Mr. Sartono mengatakan secara biasa saja pengecut atau tidaknya boleh pertimbangkan sendiri, bagaimana sifatnya mereka yang mendirikan satu partai baru sehari setelah PNI dibubarkan. Sedang dasar dan azas partai baru itu pun sama atau hampir sama dengan yang hilang.<sup>18</sup>

Bung Hatta juga menyarankan, mengapa Partai Nasional Indonesia (PNI) buru-buru membubarkan diri, sebelum ada yang melarangnya partai itu menjalankan kegiatannya. Tetapi perhitungan Mr. Sartono sebagai seorang pengacara dan tokoh politik tentu berbeda dengan saran dari Bung Hatta itu. Mr. Sartono mempunyai perhitungan lain, ditinjau dari segi hukum dan politik.

Mr. Sartono sebagai pendiri dan pemuka/ketua Pimpinan Pusat Partai Indonesia sampai dengan permulaan tahun 1933. Tdak berapa lama Mr. Sartono mendirikan PARTINDO Bung Hatta mendirikan pula PNI (Pendidikan Nasional Indonesia). PNI oleh Bung Hatta sebenarnya ke dalam tetap bergerak dalam bidang politik, tetapi ke luar seolah-olah bergerak dalam bidang sosial belaka.

Setelah Ir. Sukarno keluar dari tahanan, ia memilih PARTINDO pimpinan Mr. Sartono, bukan PNI Bung Hatta. Soalnya Bung Hatta cukup punya nama sebagai ketua dan pengurus Perhimpunan Indonesia (PI) di Negeri Belanda. Sedangkan PARTINDO yang dipimpin oleh Mr. Sartono adalah teman seperjuangan pendiri PNI pada tanggal 4 Juli 1927.

Kira-kira sejak Ir. Sukarno keluar dari tahan kolonial Belanda di Bandung, masuk PARTINDO terpilih sebagai wakil ketua, sedangkan ketuanya adalah Mr. Sartono. Ini berlangsung sampai diadakannya kongres kedua Partai Indonesia di Surabaya yang berlangsung dari tanggal 14–19 April 1933.

Adapun komposisi pengurus besar atau Pimpinan Pusat PARTINDO hasil kongres itu adalah sebagai berikut :

|   |                |
|---|----------------|
| Ir. Sukarno . . . . .                       | Ketua          |
| Mr. Sartono . . . . .                       | Wakil Ketua I  |
| Amir Syarifuddin . . . . .                  | Wakil Ketua II |
| Nyonoprawoto . . . . .                      | Penulis I      |
| Gatot Mangkupraja . . . . .                 | Penulis II     |
| Suwiryo . . . . .                           | Bendahara      |
| Jauhari Salim . . . . .                     | Komisaris      |
| M. B. Tumbel . . . . .                      | Komisaris      |
| Moch. Sidik Djoyosukarto . . . . .          | Komisaris      |
| S. Effendi . . . . .                        | Komisaris      |
| Sedang sebagai pengurus besar harian adalah |                |
| Mr. Sartono . . . . .                       | Ketua          |
| Amir Syarifuddin . . . . .                  | Wakil Ketua    |
| Nyonoprawoto . . . . .                      | Penulis        |
| Suwiryo . . . . .                           | Bendahara      |

Sekretariat : Gang Kenari II No. 2 Jakarta.<sup>19</sup>

#### CATATAN BAB IV

1. Prof. Mr. Sunario, *Op. cit*, hal. 7
2. Prof. Mr. Sunario, *Ibid*, hal. 3.
3. Pidato Mr. Iskaq di depan Kongres PNI I, *Darmokondo*, 7 Juni 1928.
4. Pidato Mr. Sartono di depan Kongres PNI I, *Darmokondo*, 7 Juni 1928.
5. Pidato Mr. Sunario di depan Kongres PNI II, *Darmokondo*, 25 Mei 1929.
6. *Darmokondo*, 24 Mei 1928.
7. *Darmokondo*, 31 Mei 1928.
8. *Persatuan Indonesia No. 40 Tahun ke III*, 10 Februari 1930.
9. *Persatuan Indonesia Tahun ke I*, 1 September 1928.
10. *Ceramah M. Tabrani*, tanggal 26 April 1975.
11. Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta, *Bunga Rampai Sumpah Pemuda*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1978), hal. 528.
12. *Ibid*, hal. 529.
13. Bambang Sularto, *W. R. Supratman*, (Jakarta: Proyek IDSN, 1980/1981), hal. 128-142.
14. *Darmokondo*, Juli 1928 dan Dr. H. Ruslan Abdulgani, *Sosialisme Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1965), Cetakan VII, hal. 12 - 13.

15. Ir. Sukarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, jilid I, cetakan III, (Jakarta: 1964), hal. 147.
16. *Persatuan Indonesia No. 84 Tahun ke IV*, tanggal 30 April 1931.
17. *Persatuan Indonesia No. 88 Tahun ke IV*, tanggal 10 Juni 1931.
18. *Persatuan Indonesia No. 99 Tahun ke IV*, tanggal 26 Agustus 1931.
19. *Persatuan Indonesia No. 168-169-170*, tanggal-tanggal 10, 20, dan 30 Maret 1933.

## BAB V TUDUHAN DAN PEMBELAAN PERKARA PNI OLEH MR. SARTONO DAN KAWAN-KAWAN

### 5.1 *Tuduhan dan Penangkapan*

Seperti apa yang kita ketahui semua bahwa pada hari Senin Paing tanggal 4 Juli 1927, Ir. Sukarno, Ir. Anwari, Mr. Sartono, Mr. Sunario, dr. Samsi Sastrowidagdo, Mr. Budiarto, Jan Tilaar dan Sujadi (keduanya tidak hadir dalam rapat mendirikan PNI). Tetapi sebelum rapat pembentukan PNI, terlebih dahulu dibentuk suatu panitia persiapan. Dalam panitia itu Jan Tilaar dan Sujadi ikut serta sebagai figur yang mengambil peranan penting.

PNI mula-mula adalah singkatan dari Perserikatan Nasional Indonesia (PNI), kemudian berubah menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI). Tujuan Partai Nasional Indonesia ialah "Indonesia merdeka sekarang" dengan dasar nasionalisme Indonesia melalui massa-aksi, marhaenisme, dan non-koperasi.

Setelah melakukan propaganda dan aksi yang begitu tajam yang cukup diplomatis dan polisis, maka pada tanggal 29 Desember 1929 diadakan penggerebakan dan penangkapan terhadap tempat tinggal dan pemimpin-pemimpin PNI di seluruh Indonesia oleh aparatatur Pemerintah Kolonial Belanda. Pemimpin-pemimpin yang ditangkap itu ialah:

1. Dari Medan : Mr. Iwa Kusuma Sumantri.

2. Dari Bandung : Ir. Sukarno  
R. Gatot Mangunpraja  
Maskun  
Supriadinata.
3. Dari Pekalongan : Kr. Lawi
4. Banyak yang lain lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini.<sup>1</sup>

Dengan terjadinya penggerebekan dan penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin PNI di seluruh tanah air, dengan sendirinya mengundang kekagetan yang meletus di dalam udara pergaulan hidup Indonesia dan Negeri Belanda tak berhenti dan terus mengumandang. Perhatian dan kegemparan itu terus mengantarkan udara politik Indonesia dan Negeri Belanda pada saat itu bertambah runcing dan tajam.<sup>2</sup>

Dalam pembelaan perkara penangkapan pemimpin-pemimpin PNI tidaklah ditulis dalam buku biografi ini untuk seluruh tanah air yang terperinci, tetapi adalah pemimpin-pemimpin yang ditangkap dan dipenjarakan di Banceuj, Bandung saja. Untuk pembela dalam buku ini hanya ditampilkan: Mr. Sartono, Mr. Sastromulyono, R. Idih Prawiradiputra dan Mr. Suyudi. Sedangkan saksi yang akan didengar kesaksiannya dalam perkara itu berjumlah kurang lebih 113 orang.

Pada tanggal 4 Agustus 1930 keempat orang pembela perkara, diberi izin masuk ke dalam tahanan, supaya dapat berbicara langsung dengan terdakwa. Pada hari Senin tanggal 18 Agustus 1920, perkara pemimpin-pemimpin PNI dibuka untuk umum dalam sidang di pengadilan *Landraad Bandung*.

Tuduhan pertama para terdakwa telah melanggar pasal 108, 109, 110 (lama) dan pasal 161 bis, 163 bis, 171 dari *Buku Hukum Siksa*. Bahwa keempat orang yang terdakwa, yaitu terdanda Ir. Sukarno, Raden Gatot Mangunpraja, Maskun dan Supriadinata, semuanya adalah anggota perkumpulan Partai Nasional Indonesia, lagi pula :

Terdakwa pertama, tuan Ir. Sukarno, sebagai ketua Pengurus Pusat dan Cabang PNI Bandung ikut mendirikan PNI pada

tanggal 4 Juli 1927 di Kota Bandung ibu negeri Periangan Tengah Propinsi Jawa Barat, dan semenjak itu telah berdiri beberapa cabang di beberapa tempat di seluruh tanah air Indonesia. Terdakwa kedua, tuan Raden Gatot Mangunpraja, sebagai penulis II pengurus PNI PUSat. Terdakwa ketiga tuan Maskun, sebagai penulis II PNI cabang Bandung. Terdakwa keempat tuan Supriadinata, sebagai kandidat propagandis PNI cabang Bandung.

Semenjak berdirinya PNI sampai tanggal 29 Desember 1929, setidaknya-tidaknya dalam tahun-tahun tersebut di atas dan teristimewa dalam pertengahan tahun 1929, mereka telah ikut dengan Partai Nasional Indonesia dengan memimpin dan berbicara dalam rapat terbuka, dalam pertemuan untuk khusus dan propaganda yang tertutup, serta memajukan serta menganjurkan supaya rakyat bergerak (massa-aksi) dan memimpinnya untuk kepentingan partai dengan lokasinya di Kota Bandung dan pada beberapa tempat di Periangan Tengah, bahkan memancar ke seluruh tanah air. Jadi mereka insaf akan maksud perkumpulan yang nanti akan disebutkan.

Sejak semula berdirinya PNI, Pemerintah Hindia Belanda telah menaruh curiga. Pihak pemerintah menganggap badan ini tidak lain merupakan kelanjutan maksud Partai Komunis Indonesia (PKI) secara tidak langsung, walaupun susunan dan caranya kelihatan berlainan, tetapi tetap bermaksud untuk melakukan rongrongan terhadap Pemerintah Hindia Belanda, perjuangan PNI adalah meneruskan maksud PKI yang tidak tercapai, yang dalam penghabisan tahun 1926 dan permulaan tahun 1927 memberontak melawan Pemerintah Hindia Belanda, tetapi tidak berhasil karena dapat diatasi oleh pemerintah segera.

Dalam Kongres PNI di Jakarta, yang dilangsungkan dalam Mei 1929 Pemerintah Kolonial menuduh lagi, bahwa Pengurus Pusat PNI bersama dengan semua cabang-cabangnya telah mengambil keputusan dalam rapat tertutup secara diam-diam dan tidak disiarkan. Menurut tuduhan pemerintah kolonial, PNI mulai dari pengurus pusat beserta dengan pengurus cabang beserta anggotanya akan melakukan pemberontakan terhadap Pe-

merintah Kolonial Belanda, yaitu secara diam-diam melanjutkan pemberontakan PKI yang dapat digagalkan oleh pemerintah kolonial. Oleh sebab-sebab inilah, maka beberapa keputusan kongres PNI, terutama hasil dalam rapat-rapat tertutup telah menyembunyikan suatu maksud tertentu dan tidak dilahirkan dalam notulen atau dalam program yang disiarkan, tetapi disimpan merupakan rahasia partai.

Jadi oleh sebab itu sebenarnya PNI hendak menjatuhkan kekuasaan pemerintah kolonial yang berkedudukan di Hindia Belanda dan akan menyerangnya dengan berbuat kejahatan mengganggu keamanan dalam negeri dan kejahatan-kejahatan lain seperti berkumpul, berserikat mengadakan pemberontakan, dan berserikat mengusahakan kejahatan hendak menghapuskan atau mengubah macam pemerintahan Hindia Belanda yang sah dengan jalan yang tidak sah (*Kitab Hukuman* pasal 110 lam); pemberontakan ini dan mengusahakan kejahatan (*Kitab Hukuman* pasal 108 dan 109 lama). meragakkan orang lain, supaya melakukan segala perbuatan ini dengan berbagai alat senjata untuk menyebabkan perbuatan seperti tersebut dalam pasal 55 angka 2 (*Kitab Hukuman* pasal 161 bis); membangkitkan huru-hara atau rusuh di antara penduduk dalam negeri dengan menyiarkan kabar-kabar bohong (*Kitab Hukuman* pasal 171); begitu juga segala kejahatan, kalau mencoba melakukan atau ikut kejahatan-kejahatan tersebut.

Tuduhan kedua: pasal 169 dan 153 bis. Dalam tahun 1929 dan pada beberapa ketika yang tiada dapat ditentukan, diadakan oleh Partai Nasional Indonesia di Kota Bandung dan di mana-mana di Keresidenan Periang Tengah telah diadakan beberapa pertemuan atau rapat tertutup untuk khusus dan propaganda; jadi rapat ini dihadiri oleh berbagai-bagai orang yang telah masuk PNI.

Dalam rapat tersebut masing-masing terdakwa telah mengeluarkan dengan sengaja beberapa perkataan yang menjurus mengganggu ketertiban umum secara tidak langsung men-

jatuhkan dan menyerang kekuasaan pemerintah yang berkedudukan di Hindia Belanda dengan memakai perkataan terus terang, sindir, setidak-tidaknya beralas atau dengan sembunyi-sembunyi, pendeknya setiak-tidaknya menimbulkan perasaan dengan mengeluarkan pembicaraan seperti :

"Untuk mencapai kemerdekaan wajiblah kita bersatu"; "supaya kemerdekaan dapat dicapai, haruslah kita menghapuskan keimperialisan dan kapitalisme, dijatuhkan atau dirobahkan"; "Wujud imperialisme ialah kuasa-pemerintahan Hindia Belanda yang sekarang, dan kaum kapitalis ialah orang Belanda dan orang asing yang berniaga di tanah sini"; "rakyat Indonesia ditindas (diinjak-injak) dan diperas oleh Gubernemen Hindia Belanda"; "Kemerdekaan akan datang dalam tahun 1930, kalau peperangan Pasifik kita lakukan untuk berpaling kepada pemerintah dan memaksa supaya Pemerintah Hindia Belanda pergi (bertolak) dari sini", "kuasa pemerintah kolonial, setidak-tidaknya kaum imperialisten, dapat kita paksa pergi dari Hindia Belanda dengan mengadakan pemogokan", "Pemerintah Hindia Belanda mesti diganti dengan pemerintah bangsa sendiri", "Partai Nasional Indonesia harus menjadi kuat, supaya kekuatan dan kekuasaan orang Belanda dapat berpindah ke PNI"; "hal ini akan berlaku dalam tahun 1930, setidak-tidaknya tiada lama lagi".

Pundeknya setidak-tidaknya memakai perkataan-perkataan yang serupa itu dan yang bermaksud menghasut rakyat. Segala perbuatan ini diancam oleh hukuman, menurut Kitab Hukum pasal 169 dan 153 bis.

Demikian di antara bunyi tuduhan yang diberatkan ke atas batu kepala para pemimpin Partai Nasional Indonesia (PNI) pada waktu itu. Banyak tuduhan-tuduhan lain yang dicari-cari dan tetap memberatkan para terdakwa perkara PNI.

Suatu pernyataan dari majalah *Timbul* tentang tindakan Pemerintah Hindia Belanda terhadap pemimpin-pemimpin PNI adalah suatu tindakan yang gegabah dan sangat berbahaya

sekali. Kalau selama ini rakyat Indonesia begitu percaya kepada Pemerintah Hindia Belanda, tetapi dengan kasus tersebut akan dapat menghilangkan sendi kepercayaan rakyat kepada Pemerintah Hindia Belanda.<sup>3</sup>

Ir. Anwari dan Mr. Sartono atas nama Pengurus Besar Partai Nasional Indonesia (PNI) mengumumkan antara lain: Dalam politik yang demikian tak bolehlah kita berkecil hati. Sungguhpun! amat besar dan berat cobaan yang kita alami akan tetapi haruslah kita kaum nasionalis Indonesia, tetap menjalankan kewajiban kita yang suci terhadap kepada tanah air kita dalam lapangan pekerjaan yang selaras dengan keadaan kita masing-masing.<sup>4</sup>

Mosi rapat PPPKI di Jakarta menanggapi peristiwa tanggal 29 Desember 1929 memutuskan :

1. memandang salah tindakan Pemeintah Hindia Belanda dalam tindakannya tanggal 29 Desember 1929 dengan alasan yang dicari-cari;
2. berkeyakinan dan menganjur sekuat-kuatnya, bahwa rakyat Indonesia meskipun ada halangan akan tetap meneruskan Pergerakan Kemerdekaan Kebangsaannya sampai berhasil, terutama sekali PNI akan melanjutkan dan menguatkan pergeakannya dan dengan semboyan "maju terus pantang mundur!"
3. meneruskan mosi ini, sesudahnya lalu meneruskan pekerjaan lain.<sup>5</sup>

## 5.2 *Pembelaan Mr. Sartono*

Pembelaan perkara pemimpin-pemimpin PNI di muka pengadilan *Landraad Bandung* tercatat ada empat orang, yaitu Mr. Sartono, Mr. Sastromulyono, Raden Idih Prawiradiputra, dan Mr. Suyudi. Dalam buku biografi ini hanya dimuatkan pembelaan dari Mr. Sartono saja. Pembelaan Mr. Sartono ini sesuai dengan apa yang diucapkannya di muka sidang pengadilan *Landraad Bandung* yang dimulai pada tanggal 18 Agustus 1930. Untuk lebih jelasnya ikutilah kutipan di bawah ini.

## PEMBELAAN TOEAN Mr. SARTONO

Toean Presiden

dan Lid-lid Lendraad jang terhormat;

Madjelis Pengadilan jang termoeelia;

Toean Presiden! Sebeloemnja saja moelai pleodeoi ini, baiklah lebih dahoeleoe saja mengoetjapkan terima kasih dan menghargakan, berapa besarnja kesabaran dan ketenangan toean, ketika memimpin perkara jang begitoe pentingnya.

Toean Presiden! Memang besar sekali kesabaran toean, ketika mendjalankan pemeriksaan perkara ini, selainnja dari pada itoe saja mengoetjapkan terima kasih atas nama jang tertoeoeh akan kebaik-an jang ditangoeng mereka dari pada toean dimoeoka pengadilan.

Toean Presiden! Keliatan oleh saja, bahwa toean bertenaga dengan sekoeat-koeatnja, baik sebeloem atapoen ketika pemeriksaan, soepaja jang terdakwa mendapat kelonggaran dalam batasan wet atau oendang-oendang negeri.

Toean Presiden! Jang tertoeoeh pertama (toean Ir. Soekarno) telah berbitjara pandjang lebar dan memboektikan dengan djaan jang bagoes dan membangkitkan kepertjajaan, bahwa mereka bersih dari pada perboeatan jang ditoedoehkan kepada mereka, oleh sebab itoe soerat pembelaan atau pleidooi kami hanja akan tertoeoedjoe kepada beberapa keterangan-keterangan jang bergantoeng dengan soerat penjerahan kepada persidangan Landraad (soerat toedoehan acte van wervijzing), dengan tjaranja memberi boekti (bewijsvoering) dan harganja tanda-tanda boekti (berwijsmiddelen).

Telah kami poetoeskan pelidooi akan dilakoekan seperti berikoet : Toean Idi Prawira di Poetra, jaitu kawan saja sebagai pieiter, akan mengeloearkan pemandangan perkara toedoehan sub 2.

Saudara jang terhormat, toean Sastromoeljono akan membitjarkan teodoehan sub. 1 dan sja sendiri akan memperkatakan soerat toedoehan atau soerat penjerahan ke hadapan Landdrad ini.

Toean Presiden! Tanggal 10 Djanuari 1920 Pemerintah memberi tahoeakan dalam Dewan Rakjat, alasan-alasan apakah jang menggerakkan Pemerintah menggeledah pengandjoer-pengandjoer (leider) PNI wakil Pemerintah bagian Perkara Oemoem toean Mr. Ir. Kiewiet de Jonge, menerangkan ketika itoe, bahwa pengandjoer-pengandjor PNI atjap kali MENEGAHKAN segala orang jang sefikiran dengan mereka, menempuh djalan kekerasan djadi soepaja djangan menempoeh djalan ini.

Diakoei oleh Pemeritah, bahwa sesoenggoehnja ada pengandjoer-pengandjoer lain berpidato dalam beberapa rapat dengan memakai perkataan-perkataan jang berisi penghasoetan, tetapi walaoepoen demikian mereka tidak dapat ditarik oleh oendang-oendang hoekoem.

Soenggoehpoen demikian dirasa perloe djoea perkara itoe moesti ditoentoet dengan djalan oendang-oendang hoekoeman (stratrechterlijk), karena orang adalah mendengar kabar angin jang boenjinja: kira-kira permoeaan tahoen 1930 atau pada hari Tahoen Baroe akan berlakoe pemberontakan. Selama perkara ini didjalankan telah njata dengan seterang-terangnja, bahwa kabar angin itoe tiada beralasan sama sekali. Djadi proces ini dimoelai dan dilakoean dengan alasan jang tipis sekali.

Saksi Nol XII t. Mr. Laj. A. Roskott ketika ditanjakan kepadanya apa dapatkah ditjari asalnja kabar angin itoe, bahwa dalam tahoen 1930 akan ada pemberontakan memberi djawaban: Tidak dapat, karena itoe soedah tentoe tinggal gelap, tetapi saja masih ingat, ada diantara oang jang kena sangka menjatakan, bahwa kabar angin itoe didengarnja dari orang toea-toea, atau dari orang jang pada biasanja tiada maoe pertjaja kepada kabar angin itoe. Ketika ditanjakan apa saksi masih ingat pesakitan No. 1 (t. Ir. Soekarno) atau nama P.N.I. ada diseboet-seboet dalam kabar angin itoe, maka djawabnja: Saja tahoe benar, jang nama t. Ir. Soekarno tidak diseboet-seboet tentang nama P.N.I. saja rasa djoeaga tidak.

Perkara ini beralasan politik.

Toean Presiden! Jang tertoeoeh ketika Soekarno telah mengatakan dengan betoel, bahwa proces ini ialah perkara jang berdasarkan politik. Dan memang soedah soemestinja begitoe. P.N.I. ialah soeatoe partai politik dengan memakai toedjoean politik dan toedjoean ni ditjapai dengan oesaha politik. Itoelah jang menjadikan soerat pertahanan ini bertambah berat dan soekar, lebih berat dari pada perkara kriminal biasa. Sebetoelnja procedur sederhana, seperti menoeroet Reglemen Boemipoetera, tidaklah mentjoekoepi bagi perkara jang bermaksoed begini dan begitoe besarnja. Banjak perkara jang penting-penting jang tiada teratoer dalamnja, dan selama perkara P.N.I. didjalankan hal jang terseboet ini memang telah pernah kelihatan. Tjaranja saksi pertama, t. Albregths, memberi boekti atas kesaksiannja tiadalah dapat disatoekan atau tjotjok dengan procedure hoekoeman jang biasa.

Tiada sadja bagi orang jang mempertahankan djoega bagi seseorang hakim adalah perkara politik banjak berpengertian jang soekar-soekar perdjalan an sedjarah memboektikan bagaimana soekarnja seorang hakim menjimpan pemandangan jang objektif dalam soeatoe proses politik.

#### Pengeledahan Manifes dan Protesmeeting.

Toean Presiden! Perboeatan Pemerintah pada tanggal 29 Desember 1929 menentang P.N.I. adalah soeatoe kedatangan jang tiba-tiba kedalam doenia politik, tetapi doenia politik ini tiada mendjadi kaget olehnja, walaupoen pers Eropah menggambarkan seperti djadi sebenar-benarnja terkedjoet. Dengan tenang dan sabar ditanggoeng segala apa jang terdjadi dan hal ini menjaksikan berapa besarnja kepertjajaan kepada kebersihan maksoed-maksoed jang dikandoeng.

Sehari sesoedah itoe, tanggal 30 Desember 1929, keloear soeatoe manifes dari redaksi s.k. Timboel jang menjatakan: bahwa aksi Pemerintah ada berbahaya dan mengeloearkan fikiran, bahwa perkataan-perkataan kekoesaan jang dilakoekan baroe dapat dipakai, djikalau soedah perloe sekali. Tiada soeatoe tanda menjatakan jang keperluan itoe moedah dapat dilakoekan.

Pada tanggal 9 Janoeari 1930 dikirim oleh Hoofbestuur P.N.I. soeatoe manifes kepada seloeroeh partai, dalam soerat itoe ditolak segala toedoehan jang didakwakan kepada P.N.I. dan mengeloearkan kepertjajaan, bahwa maksoed P.N.I. bersih adanja.

Segala perkoempolan politik Indonesia jang lain semoeanja berbaris mendjadi satoe di belakang P.N.I. tanggal 13 Janoeari 1930 diadakan di Jakarta soeatoe prefesmeeting, rapat besar ini mengeloearkan mosi, jang mentjela kelakoean Pemerintah jang tiada bersifat pengadilan (Justitieel), melainkan bersifat politik.

Fraksi kebangsaan (nationale fractie) dalam Dewan Rakjat meminta kepada Pemerintah soepaja mengeloearkan boekti-boekti, jang mendjadi alasan pengeledahan. Roepe-roepanja karena tiada sanggoep, laloe Pemerintah menolak segala pembitjaraan perkara itoe dengan tinggi hati, bagi fraksi kebangsaan hanjalah tinggal kewadajiban lagi, mengeloearkan protes akan pendirian Pemerintah jang seperti itoe.

Toean Presiden! Segalanja ini menjatakan, bagaimana kejakinan doenia politik Indonesia, jaitoe tempat orang dapat mengetahoei

dengan sesoenggoehnja, bahwa segala toedoehan jang ditoedjoekan kepada P.N.I. tiada beralasan, dan ternjata sekarang, bagaimana moedahnja melakoekan atoeran jang berbahaya itoe.

Kitab Toentoetan (lama) fasal 143 mengatakan, bahwa soerat toentoetan (dagvaarding) mesti berisi perboeatan jang ditoedjoekan tempat dan waktoe mesti dinjatakan; ketentoean ini maksoednja soepaja penoentoetan berisi perboeatan jang tentoe, sehingga jang tertoeoeh dapat mempertahankan diri dengan setjaranja oentoeik melawan toedoehan. (Lampiran I katja 7 : arrest H.R. 24 Jan. 1927 W. 11654, lampiran Ia, arrest HI 1918 W. 10284 lampiran II, halaman 3).

Kalau toedoehan diseboetkan dengan tiada tentoe, djadi kalau menoeoeh dengan matjam perboeatan dan boleh poela bergantoe dengan berbagai-bagai kedjadian, maka penoeoehitan itoe mendjadi batal.

Blok Besier berkata dalam kitab "Ned Strafproces" bag II, katja 14: "Dalam wet atjap kali dipakai pengertian dengan oemoemnja, sehingga soeatoe perkataan boleh ditoedjoekan kepada segala perboeatan atau keadaan, djadi tiada menggambarkan sesoeatoe perboeatan jang djelas. Kalau perkataan itoe dipakai dalam pendakwaan, maka jang tertoeoeh tiada dapat mengetahoei perboeatan atau keadaan mana jang diberatkan kepadanya. Itoelah sebabnja, maka soerat toedoehan kemoeka hakim tadi boleh dibatalkan.

Djadi kalaoe perboeatan-perboeatan jang tentoe tiada diseboetkan, tiada dapat diganti sadja dengan qualificatie dalam soerat toedoehan. Begitoe poelalah poetoesan Rechtbank di Den Haag dalam ponis 30 Oktober 1922 (Penoedoehan perboeatan berboeat salah) jang tiada menerangkan (perboeatan seperti jang tertoeolis dalam Kitab Toentoetan (lama) fasal 145, malainkan qualificatie kedjahatan Kitab Toentoetan fasal 249 (M. Jur. 1925: 401). Gerechtscf di Amsterdam memoetoeskan dalam arrest tanggal 14 Nopember 1922 (W. 11012), bahwa penoeoehitan kedjahatan Kit. Toent, fasal 268 (pemberian tahoe palseo) beloem tjukup kalau diseboetkan, bahwa seseorang memberi tahoean jang palseo dengan sengadja, jaitoe soeatoe kedjahatan berqualificatie jang tentoe, malainkan perboeatan-perboeatan itoe mesti diseboetkan termoeat dalam pemberian tahoe jang palseo (lampiran III hal. 3).

Conclusie Mr. Sartono.

Kalau kita bandingkan soerat toedoehan perkara P.N.I. ini dengan segala apa jang dikatakan tadi, maka bertanjalah kita: Apakah jang tampak oleh kita?

Menoeroet toedoehan jang terdakwa berboeat kesalahan karena ikoet dengan P.N.I. jang katanja bermaksoed hendak mendjatuhkan dan melanggar koeasa Pemerintah Hindia Belanda jang ada. Karena kitab Hoekoem menjeboetkan "bermaksoed berboeat kedjahatan", maka tentoe perkataan kedjahatan disini dipakai oleh vet-hoekoeman menoroet perkataan jang dilazimkan dalam kehakiman dan teknik (technisch-juridisch). Dan dalam Kitab Hoekoeman perkataan "meroentoehkan koeasa pemerintah" tiadalah ada terseboet.

Toean Presiden dan Madjelis Pengadilan! Seteroesnja adalah maksoed P.N.I. itoe jang katanja bermaksoed hendak berboeat kedjahatan jang tiada tentoe, jaitu meroentoehkan koeasa pemerintah, dapat diboektikan dengan kedjahatan-kedjahatan jang mengganggu keamanan negeri, seperti:

1. berserikat (samenspanning) mengadakan pemberontakan (Kitab Hoek fasal 110 lama).
2. berserikat mengoesahkan kedjahatan aanslag oentoek menghilangkan ataoe mengoebah matjam pemerintahan Hindia Belanda jang sjah dengan djalan jang tiada sjah (Kitab Hoek fasal 110 lama).
3. pemberontakan jang terseboet (Kitab Hoek fasal 109 lama).
4. pengoesahaan kedjahatan (aanslag Kitab Hoek fasal 108 lama).
5. kalau seseorang menggerakkan orang lain, soepaja melakoekan segala perboeatan ini (jang terseboet dalam sub 1-4) dengan perkakas oentoek menjebabkan perboeatan, seperti terseboet dalam fasal 55 angka 2 (Kitab Hoek fasal 163 bis).
6. menimboelkan atau memadjoekan pemogokan oentoek mengganggu ketertiban oemoem (Kitab Hoek fasal 161 bis).
7. membangkitkan hoeroe hara atau roesoeh diantara pendoedoek negeri dengan menjiarkan kabar-kabar bohong (Kitab Hoek fasal 171).
8. begitoe djoega segala kedjahatan, kalau mentjoba melakoekan ataoe ikoet dengan kedjahatan jang terseboet dalam sub 1-7.

Tetapi djoega segala kedjahatan ini tiada diterangkan: dalam pendakwaan dipakai seboetan-seboetan (qualificatie) sadja, tetapi perboeatan atau kelakoean jang diterangkan dengan tentoe tiada dikata-

kan. Menjerang atau mendjatoehkan koeasa pemerintah, sebenarbenarnya ialah soeatoe pengertian ataoe perkoempoelan berbagai-bagai kelakoean. Perkataan tadi itoe tiadalah memberi arti perboeatan jang tentoe dan concreet.

Begitoe joega halnya dengan perkataan-perkataan lain dalam pe-noedoeahan seperti: berserikat djahat (samenspanning) mengadakan pemberontakan dan mengoesahakan kedjahatan (aanslag) oentoeek menghilangkan matjam pemerintah Hindia Belanda jang sjah pemberontakan dan pengoesahaan kedjahatan jang terseboet : menggerakkan orang lain, soepaja melakoean perboeatan-perboeatan dengan memakai perkakas oentoeek menjebabkan pemboeatan: menimbulkan ataoe memadjoekan pemberontakan soepaja ketertiban oemoem terganggoe: membangkitkan hoeroe hara atau roesoeh diantara pendoeoek negeri dengan menjiarkan kabar-kabar bohong: segala kedjahatan mentjoba melakoean atau ikoet dengan kedjahatan jang terseboet diatas.

Seperti telah dikatakan kalaoe dalam soerat pendakwaan hanja dimoeatkan seboetan-seboetan (qualificatie) sadja dan pada halnya semestinja haroes barisi kelakoean-kelakoean (kealpaan) jang diterangkan dengan tentoe, maka hal itoe tidak mentjoekoepi ketentoean jang didapat dalam Reglemen Boemipoetera fasal 250.

Pendeknja dalam soerat pendakwaan tiadalah didapat perboeatan-perboeatan jang tentoe dan concreet.

Persakitan ditoeoeh karena melanggar Kitab Hoekoeman fasal 169. Soepaja isi dan arti fasal ini dapat diketahoei, maka patoetlah kita mengambil fasal jang sama, jaitoe fasal 140 (Ned), seperti djoega soedah berlakoe dengan fasal-fasal lain.

Hooge Raad telah memberi soeatoe interpretasi jang bergoena oentoeek mengetahoei apa artinja fasal 169 itoe.

Fasal 169 boenjinja:

1. Ikoet dengan soeatoe perkoempoelan jang bermaksoed melakoean kedjahatan dihoekoem dengan hoekoeman pendjara selama-lamanja enam tahoen.
2. Ikoet dengan soeatoe perkoempoelan jang bermaksoed melakoean pelanggaran atau dengan perkoempoelan lain jang dilarang peratoeran oemoem, dihoekoem dengan hoekoeman pendjara, selama-lamanja sembilan boelan atau didenda sebanjak-banjaknja tiga ratoes roepiah.

3. Tertoedjoe kepada orang jang mendirikan atau memimpin perkoempoelan itoe, maka hoekoeman itoe boleh ditambah dengan sepertiga.

Dalam tahoen 1894 pemimpin-pemimpin (bestuurders) perkoempoelan "Sociaal Democratische Bond" ditoentoet dimoeaka hakim dengan memakai alasan poetoesan-kongres. Dalam poetoesan ini terseboet; Partai sosial demokrat ialah soeatoe partai jang revolusioneer, karena partai itoe memakai azas, bahwa keadaan-keadaan jang djelek itoe hanja dapat dihilangkan kalaoe "privaat bezit" dihapoeskan. Onteok kaoem marhain (proletarit) tiadalah dapat peroebahan jang tetap, kalaoe teroes ditoeroet dasar-dasar pergaoelan hidoep sekarang. Taktik jang ditoeroet partai sosial demokrat ialah taktik jang beralaskan politik, karena partai itoe tiada pertjaja bahwa pergaoelan sekarang akan beroebah dengan lambat-lambat mendjadi pergaoelan sosialis: melainkan maksoed partai ialah hendak meroentoeuhkan soesoenan pergaoelan hidoep jang ada. Perkakas jang dipakai jaitoe segala perkakas baik jang sjah atau jang tidak sjah, baik dengan damai ataudengankekerasan asal sadja dapat dilakoekan.

Oleh karena menerima resoloesi (poetoesan) ini, maka Sosial Democratische Bond laloe dianggap sebagai soeatoe perkoempoelan jang bermaksoed hendak berboeat kedjahatan.

Perkara ini hampir seroepa dengan perkara P.N.I. Ketika naik kasasi Hooqe Raad memoetoeskan (W. 6585) :

"Soepaja dapat ditjapai fasal 140 ajat 1 (Kitab Hoek fasal 169), jaitoe ikoet dengan soeatoe perkoempoelan jang bersifat seperti terseboet dalam fasal ini, tiadalah tjoekeop kalau perkoempoelan itoe memakai soeatoe toedjoean jang hanja dalam berapa hal atau keadaan dapat ditjapai dengan berboeat kedjahatan: perkoempoelan tadi didirikan oentoek atau bekerdja dengan soenggoeh-soenggoeh berboeat kedjahatan jang mendajdi maksoed dan toedjeoannja".

Toean Mr. T. Noyon memberi keterangan fasal 140 Ned. dalam kitabnja "wetboek v. Str. verklaard deel II".

"Perkoempoelan, jang bermaksoed hendak berboeat kedjahatan, ialah soeatoe perkoempoelan jang didirikan ataoe terdiri atas maksoed jang dikandoeng oleh segala orang jang ikoet tjampoer: djadi soepaja berboeat kedjahatan mendjadi bertambah madjoe oleh mereka itoe. Begitoelah keadaannja dengan association de malfaiteurs perkoempoelan orang djahat), perkoempoelan perampok, jang beranggota hendak berboeat djahat, dan mereka berkoempoel dalam

soeatoe perkoempoelan, soepaja mendapat kekoesaan oentoek berboeat djahat bersama-sama dan melakoekannja. Maksoednja ialah hendak berboeat kedjahatan”.

Tiada masoek terhitoeng perkoempoelan jang bermaksoed meminta, soepaja berboeat kedjahatan dengan oemoemnja, djoega diloar lingkoengan orang jang ikoet tjampoer. Perkoempoelan ini boekannja perkoempoelan jang bermaksoed berboeat kedjahatan, melainkan memadjoekan sadja.

Dan memadjoekan kedjahatan baroe boleh dihoekoem, djikalau perboeatan itoe sebagai menjebabkan atau toeroet melakoekan (uitlokking dan medeplichtigheid). Dan ikoet (dealneming) dengan perkoempoelan jang bermaksoed seperti itoe, boleh sebenarnya dihoekoem lebih berat dari pada fasal 140 ajat ke 1. Tetapi dalam hal ini dengan sengadja diseboetkan berboeat kedjahatan: berhoeboengan dengan arti jang hanja tertoe djoe kedepannja (peringatan ke-10 dibawah fasal 37) bertentangan dengan kalimat berboeat kedjahatan maka perkoempoelan jang bermaksoed misalnja toeroet berboeat kedjahatan, tidak toendoek ke fasal 140 ajat ke-1, melainkan masoek ajat ke-2, ”Fasal 71 tiada dapat dipakai oentoek melawan fikiran jang terseboet, karena perkataan ”berboeat”lah jang mendjadikan fasal 140 djadi soeatoe keterangan jang berarti sebaliknja”.

Dalam kitab Prof. Mr. D. Simos ”Leerboek van het Ned, staf-wetboek II” diterangkan, bahwa fasal 140 haroes berarti jang tiada loeas, hal ini memang tiada berlawanan dengan maksoed orang jang memboeat wet dan dengan perkataan-perkataan ketentoean itoe, Djadi fasal 140 (Ned) ajt ke-1 hanja dapat dipakai, kaalau tertoe djoe kepada perkoempoelan-perkoempoelan jang didirikan oentoek menjoeeroeh anggota-anggota berboeat kedjahatan.

Oleh karena maksoed perkoempoelan tiada lain tiada boekan ialah maksoed anggota-anggotanja, maka ikoet berboeat kedjahatan tiada dengan sengadja tiada dapat poela. Menoeroet keterangan Prof. Simons ”kesengadjaan itoe mesti tertoe djoe kepada tabiat perkoempoelan jang dikatakan salah. Djadi segala anggota mesti insjaf kepada maksoed perkoempoelan itu.

Kita mengetahoei, bahwa fasal 169 membagi segala perkoempoelan, jang dilarang dan diantjam dengan hoekoeman kalau ikoet tjampoer, atas tiga golongan:

- 1e. ikoet dengan soeatoe perkoempoelan jang bermaksoed berboeat kedjahatan.
- 2e. ikoet dengan soeatoe perkoempoelan, jang menoedjoe sesoeatoe maksoed melangar peratoeran.
- 3e. ikoet dengan soeatoe perkoempoelan jang dilarang oendang-oendang (peratoeran oemoem, algemene verordening).

Tadi telah kita terangkan, bahwa ajat ke-1 tiada dapat dipakai: oleh karena itoe barangkali ajat ke-2 dapat dilakoekan. Menoeroet Peratoeran Radja (Komink Besluit) tanggal 17 Desember 1918 No. 38, Sts, 1919 27, fasal 3, jang menerangkan bagaimana melakoekan hak berkoempoel dan bersidang di Hindia-Belanda, maka dilarang;

- 1e. perkoempolan-perkoempoelan jang keadaan atau maksoednja dirahasiakan.
- 2e. perkoempoelan-perkeompoelan jang telah disjahkan oleh hooggerechtschof (Pengadilan Tinggi Hindia Belanda) berlawanan dengan ketertiban oemoem, djadi jang berbahaya bagi negeri.

Kita mengetahoei, bahwa keadaan dan maksoed perkoempoelan PNI tiada dirahasiakan. Segala orang tahoe akan hal ini. Maksoed P.N.I. telah diterangkan dengan sedjelas-djelasnja, jaitoe tak lain tak boekan mentjapai kemerdekaan tanah Indonesia.

#### Toedoehan ke-2 Fasal 153 bis.

Sekarang marilah saja bitjarakan toedoehan sub II. Dalam fasal 153 bis terseboet antjaman: "Barang siapa dengan sengadja mengeloarkan fikiran dengan perkataan, soerat atau gambar, dan dalamnja dipoedjikan menganggoe ketertiban oemoem, mendjatoehkan atau menjerang koeasa pemerintah jang ada ditanah Belanda atau Hindia Belanda, atau menimboelkan perasaan baginja, walaoepoen sekali-kali dengan sindiran, baik diberi beralasan ataoe poen dengan semboenji, maka didjatoehkan hoekoeman kepadanja hoekoeman pendjara selama-lamanja enam tahoen atau didenda sebanjak-banjaknja tiga ratoes roepiah.

Toean Presiden! Memang soekar sekali mempertahankan diri bertentangan dengan fasal ini, karena dalamnja tiadalah diseboetkan perboeatan-perboeatan hoekoeman dengan loekisan jang djelas dan tenang, melainkan dalamnja hanja didapat keterangan-keterangan jang kaboer sadja. Fasal 153 bis ialah soeatoe tjontoh, bagaimana soeatoe fasal dalam Kitab Hoekoeman dikarang tiada dengan semes-

tinja: hakim bertentangan dengan Hoekoem Siksa (Strafrecht), jang memestikan soepaja segala perboeatan-perboeatan hoekoeman dikarang dengan keterangan definitie jang tadjam-tadjam. Dalam hal ini, maka banjaklah, kalau sekiranya tidak sama sekali sehabis-habisnja, tergantoeng kepada kebaikan hati seseorang hakim: pemandangannya mesti lebar dan mesti berdaja dengan toeloes ichlas hendak berdiri sama tengah dan tiada menjimpang kepada sesoeatoe pengertian. Hampir segala fikiran, jang dilakoekan dan jang tidak salah sedikit djoea, dapat dimasoekkan kedalam fasal 153 bis, dapat ditjapai oleh perkataan "sindiran" dan "semboenji" dan hal itoe dilakoekan hanja menoeroet lahirnja sadja jang betoel.

Marilah kita perhatikan kalimat-kalimat toedoehan jang hendak dimasoekkan orang kedalam fasal 153 bis itoe:

Kalimat toedoehan pertama berboenji: "oentoek mentjapai kemerdekaan kita, haroeslah kita bersatoe". Bagaimana sekali baiknja hati saja, tiadalah saja dapat mengeloearkan kesoekaan soepaja kalimat ini dimasoekkan kedalam fasal 153 bis. Tiada soeatoe fasal dalam Kitab Hoekoeman menjatakan, bahwa daja oepaja hendak bersatoe atau mentajapai Kemerdekaan itoe dapat dihoekoem, lagi poela tiap-tiap perkoempoelan Indonesia jang berdasarkan politik dapat dikatakan, bahwa toedjoeannya ialah mentjapai Kemerdekaan Indonesia. Oentoek mentjapai atau menjampai toedjoean jang diidjinkan ini maka soeatoe sjarat dari pada beberapa sjarat jang teroetama: Persatoean Bangsa Indonesia. Itoelah sebabnja, maka tiap-tiap perkoempoelan kebangsaan mempropagandakan perasaan persatoean.

Kalimat toedoehan kedoea hanja dapat dimasoekkan kedalam fasal 153 bis, kalau ditalikan dengan kalimat toedoehan jang ketiga. Tetapi mesti diterangkan disini, bahwa tiada sekali-kali pesakitan (jang terdakwa) dapat dianggap, memberi keterangan perkataan "imperialisme" dan "kapitalisme" dengan seperti itoe. Itoe tak mungkin! Jang terdakwa ialah pengandjoer-pengandjoer jang soedah berpengetahoean, djadi dapat mengerti, bahwa imperialisme boekannya koeasa pemerintah Hindia Belanda jang sekarang: dan perkataan "kapitalisme" tiada mengandoeng arti: orang asing atau orang Belanda jang sekrang berniaga ditanah ini.

Kalimat toedoehan jang keempat: "anak negeri ditindas dan diperas oleh Goebnemen Hindia Belanda. Dalam kalimat ini tiada dapat dibatja soeatoe maksoed seperti memoedjikan, soepaja meroentoeh-

kan atau menjerang keoasa pemerintah Hindia Belanda, atau menimboelkan perasaan baginja. Boleh djadi agaknja dapat dimasoekkan kedalam fasal 154, jaitoe sebagai mengeloearkan fikiran dan perasaan kebentjiaan tertoe djoe kepada pemerintah Hindia Belanda. Tetapi hal ini tidak ditoe doehkan.

Kalimat-kalimat jang kelima: "Kemerdekaan akan datang dalam tahoen 1930, apabila peperangan Pasifik kita lakoekan oentoe berpaling kepada Pemeritnah sekarang, memaksa Pemerintah itoe bertolak dan kalimat keenam:

"Koeasa pemerintah sekarang setidak-tidaknja kaoem imperilais, dapat kita paksa mesti bertolak dari Hindia Belanda dengan mengadakan pemogokkan" kalimat ini boleh djadi dapat dimasoekkan kedalam fasal 153 bis.

Begitoe djoega dapat dikatakan dengan ketiga-tiga kalimat toedohan jang paling akhir: djadi dapat dimasoekkan kedalam fasal 153.

#### Conclusie Mr. Sartono.

Toean Presiden! Marilah saja beri ringkasan: dan conclusie saja boenjinja begini:

Menoedjoe toedohan pertama:

Pertama. Karena dalam soerat toedohan (acte van verwijzing, jaitoe soerat penjerahan kemoeka pengadilan ini) tiada dialahkan toedhoehan jang concreet dan jang tentoe, maka soerat toedohan itoe, berhoehoengan dengan penoedohan jang sebagian ini sadja, mendjadi batal.

Kedoea. Kitab Hoekoeman fasal 169 ajat pertama dalam hal ini tiada dapat dilakoekan.

Ketiga. Sebanjak-banjaknja dapat dilakoekan dalam hal ini, Kitab Hoekoeman fasal 165 ajat kedoea tetapi ajat ini tidak ditoe doehkan.

Apabila pengadilan Landraad berfikiran, bahwa dapat dilakoekan maka toedohan itoe tiada memakai boekti: perkara ini nanti akan diterangkan oleh saudara saja Mr. Sastromoeljono.

Menimbang conclusie ini, maka jang ditoe doeh mesti dilepaskan dari toentoetan dan (ataoe) dibebaskan.

Tertoe djoe kepada toedohan kedoea;

Kalimat-kalimat toedohan, selainnja dari pada jang telah saja bitjarakan moengkin dapat dimasoekkan kedalam Kitab Hoekoeman fasal 153 bis. Tetapi perboatan-perboeatan ini tiada terboekti ataoe

diboektikan: hal ini nanti akan diterangkanoleh toean Idi Prawira di Poetra.

Menimbang pendakwaan jang kedoea ini jang tertoeoeh mesti dibebaskan.

### 3. Poetoesan Pengadilan

Pada hari Senin tanggal 22 Desember 1930 kelihatan halaman gedoeng pengadilan Landraad di kota Bandoeng penoeh sesak, beratoesan orang jang hadir, kalaoe tidak riboean. Kelihatan wakil rakjat dari segenap golongan, baik poeta ataupun poetri, wakil pers djoega lengkap segalanja.

Poekoel enam pagi soedah tampak orang toeroen naik halaman pengadilan, datang dari seloeroeh Indonesia menanti-nantikan auto koeroengan datang dari pendjara di Bantjeuj, jang membawa pemimpin jang ditjintainja menoe djoe kemoeka medja pengadilan.

Demikianlah waktoe itoe bangsa Indonesia menanti poetoesan pengadilan. Pekoel sebelas maka djatoehlah poetoesan-poetoesan jang mendoekatjitakan pergerakan Indonesia dan meloekai anak negeri jang berbangsa dan bertoempah darah ditanah Indonesia. Tidak perloe diseboetkan alasan-alasan jang dipakai, karena pembatja boleh membatja dalam pembelaan jang tertoeelis dalam kitab ini: tjoekoep-lah kaalae rakjat Indonesia mengetahoei hoekoeman jang didjatoehkan keatas batoe kepala pengandjoer P.N.I.

Saudara Ir. Soekarno mendapat hoekoeman pendjara lamanja empat tahoen.

Saudara Gatot Mangkoepradja mendapat hoekoeman pendjara lamanja doea tahoen.

Saudara Maskoen mendapat hoekoeman pendjara lamanja satoe tahoen delapan boelan.

Saudara Soepriadinata mendapat hoekoeman pendajara satoe tahoen tiga boelan.

Semoenja naik apel ke pengadilan Joestisi dikota Jakarta.

Pada ketika kitab ini ditjetak pengandjoer jang berempat masih ditahan dalam koeroengan: perkara beloem diboeka kembali.

Sementara itoe rakjat Indonesia doedoek dalam tafakoer, karena meperhatikan lakon kehakiman dan pengadilan jang dinamakan dalam djantoeng hatinja. Walaoepoen demikian, walaoepoen bagaimana sekali boenji soera kehakiman terdenar oleh telinga manoesia, tetapi

bagi bangsa Indonesia jang dinamainja soeara Pengadilan jalah djalan atas Kebenaran, jaitoe djalan menoe djoe Indonesia Raja jang disinari matahari Indonesia merdeka.

Demikianlah djalan koerban jang ditoendjoe kan oleh pergerakan P.N.I.

Kedelapan.

Dalam tahoen 1929—1930 ditoetoepi dengan boenga rampai jang haroem-haroem dipersembahkanoleh beberapa pengandjoer kedalam doepa Tanah Air dan Bangsa, soepaja perdjalan sedjarah Indonesia menoe djoe Kemerdekaan diteroeskan sampai ketempat jang ditoe djoe.

Begitoelah sedjarah pergerakan kebangsaan Indonesia dalam waktu jang terseboet: dimoelai dengan penggeledahan jang mahahebat, serta disoedahi dengan poetoesan pengadilan jang serendah-rendahnja, dan meloekai semangat bangsa jang setinggi-tingginja dan jang hendak bernafas dengan merdekanja.

Zaman jang baroepoen bermoela, dan zaman jang lampaoe tentoe meninggalkan djedjak dan tanda bagi barang siapa jang mesti bekerdja oentoe zaman jang akan datang, baik dengan doeka ataoepoen soeka, walaoepoen bagaimana sekali oedjoeng djiwanja diberi maloe dimoe ka permoeka alam ini, karena soeara Pengadilan bagi bangsa jang tak bebas jalah soeara Kemerdekaan jang terdengar dalam hati sanoebari bangsa Indonesia.

## CATATAN BAB V

1. *Persatuan Indonesia No. 48 Tahun ke III*, (Jakarta: Tanggal 30 April 1930).
2. Pembelaan Ir. Sukarno di pengadilan Landraad Bandung, *Sejarah Pergerakan Indonesia 1929–1930 jilid III*, Jakarta: Fonds Nasional, tanpa tahun), hal. 1.
3. *Majaah Timbul*, (Surakarta: 30 Desember 1929).
4. Garoeda Gentajoe, *Sejarah Pergerakan Indonesia 1929–1930 jilid I*, (Jakarta: Fonds Nasional PPPKI, tanpa tahun), hal. 5–6.
5. Garoeda Gentajoe, *Ibid.* hal. 8.

## BAB VI MR. SARTONO BERJUANG DAN MENGISI KEMERDEKAAN

### 6.1 *Berjuang dan Aktif Berpolitik*

Setelah bermukim di Negeri Belanda, belajar di Fakultas Hukum Universitas Leiden, Sartono kembali ke tanah air dengan berpredikat "*meester in de rechten (Mr)*". Mr. Sartono memilih Kota Bandung mulai mengayunkan cangkul hukum dan politiknya, sebagai pengacara dan mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tanggal 4 Juli 1927 berdama Ir. Sukarno dan kawan-kawannya yang lain. Melalui hukum dan PNI inilah akan terealisasi cita-citanya yaitu Indonesia seperti yang telah dicetuskan dalam statemen politik Perhimpunan Indonesia (PI) di Negeri Belanda dan Partai Nasional Indonesia (PNI) di Indonesia.

Kini ia merasakan berhadapan dan berurusan dengan berbagai tantangan dan sekaligus harus memberikan jawabannya. Ia harus mampu menjadi soko guru dalam bidang hukum dan politik yang penuh dinamis dan berkarakter menggalang persatuan dan kesatuan guna menjawab semua tantangan.

Suatu ide dan ajakan yang baik dari Ir. Sukarno untuk menyatukan dari berbagai golongan dan partai di Indonesia ke dalam satu perserikatan yang dinamai "*Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)*". Ide dan ajakan Ir.

Sukarno ini mendapat sambutan baik dari semua golongan dan partai yang ada pada waktu itu. Dengan kesepakatan bersama terbentuklah PPPKI pada tanggal 17 Desember 1927 yang termasuk dalam PPPKI ialah dari PSII dr. Sukiman dan Syahbuddin Latif, dari PNI ialah Ir. Sukarno dan Mr. Iskaq, dari *Algemeene Studie Club* diwakili oleh Mr. Sartono, Mr. Budiarto dan Mr. Samsi yang ketiganya ini adalah PNI, dari Budi Utomo, ialah Kusumo Utoyo dan Sutopo Wonoboyo, dari Paguyuban Pasundan ialah Oto Subrata, Bakri Suryaatmaja dan S. Senjoyo, dari Kaum Betawi ialah Husni Thamrin, dari Serikat Sumatera ialah Perada Harahap dan Dahlan Abdullah, dan dari *Indonesische Studie Club* ialah Sujono Gondokusumo dan Sunjoto. Sebagai alat tetap dari federasi ini dibentuk suatu "Majelis Pertimbangan", yang terdiri atas seorang ketua, bendahara dan wakil-wakil partai yang bergabung. Sedang pengurus harian dipegang oleh Ir. Sukanro dan Sukiman.

Pada tanggal 26 Desember 1929 oleh kongres ke II PPPKI di Kota Surakarta, telah didirikan sebuah "Fonds Nasional". Adapun maksudnya ialah untuk mengumpulkan harta benda guna keperluan nasional. Fonds Nasional ini diurus oleh suatu badan komisi dari PPPKI yang terdiri atas :

1. Mr. Sartono (ketua),
  2. Moh. Husni Thamrin, (sekretaris),
  3. RMAA Kusumo Utoyo (komisaris),
  4. R.O. Subrata (komisaris),
  5. Haji Dahlan Abdullah (komisaris),
- dan sebagai komisaris yang juga dikuasakan menerima uang derma telah diangkat pula :
1. dr. Sukarno, Surabaya
  2. Mr. Singgih, Solo
  3. dr. Sukiman, Yogyakarta
  4. Bakri Suraatmaja, Redaktur Sipatahunan Tasikmalaya
  5. R.P. Suroso, Mojokerto
  6. R.W. Dwijosewoyo, Bogor.<sup>1</sup>

Sebagai alat media dan propaganda PNI pada waktu itu ialah "Pesatuan Indonesia" yang merupakan "Surat Kabar" berkala partai dengan pemimpin redaksinya ialah Ir. Sukarno dan Mr. Sunario. Sedang sebagai pemegang "administrasinya" ialah Mr. Sartono. Redaksi dan Administrasi Surat Kabar berkala partai pada waktu beralamat di Gang Kenari No. 15 Weltevreden atau Jakarta Pusat sekarang.

Selama berlangsung Kongres Pemuda Indonesia Kedua di Jakarta tanggal 27-28 Oktober 1928 Mr. Sartono hadir mewakili PNI dan PPPKI.

Dalam acara tanggapan umum terjadi insiden tatkala salah seorang yang memberikan tanggapan mengucapkan kata "kemerdekaan". Seketika itu juga perwira polisi Belanda berdiri dari kursi, menuding ke arah ketua panitia kongres sambil bersuara lantang memberikan peringatan keras, dan melarang para pembicara mengucapkan kata "kemerdekaan". Perwira polisi itu malah mengancam akan mengusir para pemuda yang berusia dibawah delapan belas tahun dari dalam gedung dengan alasan bahwa peraturan telah menentukan melarang para pemuda di bawah umur delapan belas tahun untuk menghadiri kongres. Tngkah perwira polisi itu menimbulkan suasana menjadi riuh. Ketua panitia kongres berkali-kali mengetukkan palu dan suasana pertemuan jadi tenang kembali. Setelah suasana tenang kembali, acara dilanjutkan. Tetapi tak lama kemudian terjadi insiden yang kedua, tatkala salah seorang pembicara dalam menyampaikan tanggapannya menganjurkan agar para pemuda dan bangsa Indonesia pada umumnya bekerja lebih giat lagi dalam pengabdianya kepada ibu pertiwi supaya mempercepat proses terwujudnya tanah air Indonesia menjadi negara yang kuat seperti Inggris di kawasan Eropa dan Jepang di kawasan Asia. Ucapan pembicara itu mendapat sambutan tepuk tangan gemuruh dari para hadirin. Mendengar itu perwira polisi Belanda langsung berdiri dari kursi dan menuding ke arah ketua panitia kongres dan sekali lagi memberikan peringatan keras. Malah perwira polisi ituminta agar ketua panitia mengeluarkan

semua pemuda yang hadir dalam rapat pertama kongres. Tetapi kali ini Sugondo Joyopuspito selaku ketua panitia kongres menunjukkan harga dirinya. Ia dengan tegas menolak permintaan perwira polisi dengan menyatakan bahwa permintaan perwira polisi itu sama sekali tidak disertai alasan. Tangkisan Sugondo Joyopuspito membuat perwira polisi itu terdiam dan duduk kembali di kursi dengan perasaan yang tidak senang.

Sementara suasana pertemuan masih belum tenang sepenuhnya, Mr. Sartono yang mewakili PNI dan PPPKI mengacungkan tangan minta kepada ketua panitia kongres untuk diberi kesempatan berbicara. Permintaan itu diluluskan oleh ketua panitia kongres, maka tampillah Mr. Sartono berbicara:

"Mr. Sartono dengan nada halus mengecam sikap perwira polisi yang bertindak atas nama kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda pada malam itu. Sebagai sarjana hukum yang telah bertahun-tahun mempelajari ilmu hukum di negeri Belanda dan di tanah air, ia tidak dapat memahami pengertian istilah politik yang diucapkan oleh perwira polisi itu sebagai alasan untuk menegur ucapan para pembicara. Bahkan ia yakin bahwa sarjana hukum Belanda yang termasuk, Profesor Krebba, tidak pula akan dapat memahami istilah politik menurut pengertian perwira polisi itu. Uraian singkat Mr. Sartono sebagai seorang sarjana hukum itu sebenarnya hanya satu sindiran halus untuk membuat malu sang perwira polisi yang bertindak atas nama kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda telah berlaku kasar dan sok tahu politik dalam suatu pertemuan umum yang justru dihadiri oleh pembesar-pembesar ahli politik dari Kantoor voor Inlandse Zaken, sehingga Vander Plas dan Dr. Pijper yang mengerti akan arti yang tersirat dalam ucapan Mr. Sartono itu menjadi malu.<sup>2</sup>

Uraian singkat Mr. Sartono itu berhasil menerangkan suasana pertemuan dan membuat perwira polisi itu tidak berani bertingkah lagi.

Dalam pimpinan PNI Mr. Sartono memangku jabatan wakil ketua dan ketua apengurus harian. Dalam keadaan memaksa pula setelah pemimpin-pemimpin PNI digrebek dan ditangkap oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 29 Desember 1929, maka pada tanggal 25 April 1931, Mr. Sartono

dan kawan-kawannya membubarkan PNI. Pembubaran PNI oleh Mr. Sartono dan kawan-kawannya hanyalah merupakan taktik belaka untuk mengakali Pemerintah Hindia Belanda. Buktinya besoknya tanggal 26 April 1931 satu hari setelah PNI membubarkan diri, Mr. Sartono bersama Manadi, Sukemi, Angronsudhirjo dan Suwiryono mengadakan rapat di Kramat 97 paviliun Jakarta untuk mendirikan Partai Indonesia yang disingkat "Partindo". Secara resmi Partindo berdiri pada tanggal 29 April 1931. Adapun azas dan tujuan dari pada Partindo hampir tidak berbeda dengan azas dan tujuan PNI seperti di antaranya "Indonesia Merdeka". Sembilan puluh peserta lebih azas dan tujuan Partindo lainnya adalah sama dengan azas dan tujuan PNI.

Dalam Partindo Mr. Sartono terpilih sebagai ketua. Sedangkan pemimpin-pemimpin yang tidak setuju dengan pembubaran PNI, mendirikan Pendidikan Nasional (PNI-Baru) dengan tokoh utamanya Drs. Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir.

Sekeluanya dari penjara Ir. Sukarno berusaha untuk menyatukan Partindo dan PNI-Baru, tetapi gagal, dan ia akhirnya memasuki Partindo. Kedua partai ini kemudian dianggap berbahaya oleh Pemerintah Hindia Belanda. Tokoh PNI-Baru Drs. Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir dibuang ke Digul dan kemudian ke Pulau Banda. Ir. Sukarno terpilih sebagai ketua Partindo dan Mr. Sartono sebagai wakil ketua, kemudian Ir. Sukarno ditangkap lagi oleh Pemerintah Hindia Belanda dan dibuang ke Flores.

Pada tahun 1935 oleh Dr. Sutomo mendirikan Partai Indonesia Raya (Parindra) yang merupakan gabungan dari Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Tujuannya jelas ialah untuk Indonesia Raya. Taktik perjuangannya walaupun tidak dinyatakan secara tegas, lebih condong ke arah kooperatif, dengan demikian Parindra mempunyai wakil di dalam dewan-dewan perwakilan.

Untuk mencapai tujuan Indonesia Raya, Parindra berusaha untuk menjalankan aksi-aksi politik. Juga diusahakan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat dalam bidang ekonomi dan sosial dengan mendirikan rukun tani, bank, serikat sekerja pelayaran, menganjurkan rakyat untuk memakai hasil produksi sendiri (dalam negeri) dan sebagainya. Tokoh Parindra yang paling terkenal usaha-usahanya membela kepentingan rakyat di dewan rakyat (*Volksraad*) adalah Mohammad Husni Thamrin. Beberapa tokoh lainnya adalah R. Sukarjo Wiryopranoto, R. Panji Suroso, Wuryaningrat, dan Mr. Sutanto Tirtoprojo. Dalam perkembangan selanjutnya beberapa partai kecil bergabung ke dalam Parindra. Sedangkan Mr. Sartono tidak kelihatan berperan dalam Parindra, walupun bekas tokoh PNI lainnya banyak yang ikut dalam Parindra seperti R. Suharjo Wiryopranoto. Hal ini mungkin karena Partindo masih ada dan dengan sendirinya Mr. Sartono tentu memimpin Partindo dalam sepak terjang politiknya yang non-koperatif itu.

Setelah Partindo dibubarkan pada tahun 1937, muncul Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) yang didirikan pada bulan April 1937. Para pemimpinnya yang utama adalah: Mr. Sartono, Mr. Amir Syarifuddin, Mr. Muhammad Yamin, Dr. A. K. Gani dan lain-lain. Dalam Gerindo Mr. Sartono duduk sebagai wakil ketua, sedang ketuanya adalah Mr. Amir Syarifuddin. Taktik perjuangannya juga tidak dinyatakan dengan tegas, tergantung kepada keadaan.

Di samping Parindra dan Gerindo, PNI-Baru dan Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) walaupun tidak menonjol, masih mempunyai pengaruh dalam masyarakat. Hanya saja PSII dalam tahun-tahun terakhir penjajahan Belanda seringkali mengalami perpecahan.

Pada tahun terakhir penjajahan Belanda karena ada bahaya fasisme Jepang, Pergerakan Nasional Indonesia mengulurkan tangan kepada pemerintah kolonial menawarkan kerjasama dalam menghadapi ancaman bahaya meletusnya Perang Pasifik. Akan tetapi uluran tangan itu tidak mendapat sambutan yang

layak dari Pemeintah, bahkan sebaliknya pemeintah curiga terhadap sikap tersebut. Tindakan keras tetap dijalankan, bahkan pada akhir tahun 1940 menjadi negara polisi. Karena itu tidak heran kesempatan pada akhir penjajahan Jepang dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Sementara kendornya gerakan politik melalui partai-partai terutama partai-partai non-kooperatif. Mr. Sartono sekitar tahun 1940–1943 mengalihkan pandangan kegiatannya dalam lapangan ekonomi yaitu koperasi membantu gerakan karet di Leuwiliang–Bogor dan berhasil mendirikan 12 buah koperasi karet dan 12 buah pabrik karet di daerah itu.

Sekitar tahun 1943–1944 Mr. Sartono tetap tidak tinggal diam berjuang melalui bidang hukum dan politik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Ia berjuang dengan berwiraswasta dalam lapangan sosial ekonomi, budaya dan pendidikan. Ia lebih banyak bergerak dalam lapangan ekonomi dan koperasi. Dalam lapangan koperasi tani dan industri.

Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan Mr. Sartono ikut sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang biasanya disingkatkan sebagai badan penyelidik saja. Sidang pertama berlangsung dari tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang kedua berlangsung dari tanggal 10–17 Juli 1945. Badan ini didirikan pada tanggal 29 April 1945. Anggota badan penyelidik ini berjumlah 60 orang ditambah dengan tiga orang ketua: dr. KRT. Rajiman Widiodiningrat, Kebebangase (Jepang) dan Raden Panji Suroso. Anggota badan penyelidik ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Dalam sidang badan penyelidik itu, Mr. Sartono duduk pada kursi nomor 46, Ir. Sukarno kursi nomor 1, Mr. Muhammad Yamin kursi nomor 2 dan K. H. Dewantara kursi nomor 6.

Dalam rapat besar badan penyelidik tanggal 11 Juli 1945 yang dibuka pada pukul 14.30. Rapat langsung dipimpin oleh

ketuanya dr. KRT. Rajiman. Mr. Sartono terpilih sebagai anggota panitia untuk merancang UUD. Anggotanya berjumlah 19 orang yang diketuai oleh Ir. Sukarno.

Yang ditunjuk menjadi anggota pembela tanah air sebanyak 23 orang yang ditunjuk sebagai ketuanya: Abikusno Tjokrosuyoso.

Yang ditunjuk sebagai anggota yang mengatur keuangan dan perekonomian berjumlah 23 orang dan yang ditunjuk sebagai ketuanya ialah Drs. Mohammad Hatta.

Dalam rapat panitia perancang UUD tanggal 11 Juli 1945, anggota Mr. Sartono mengatakan :

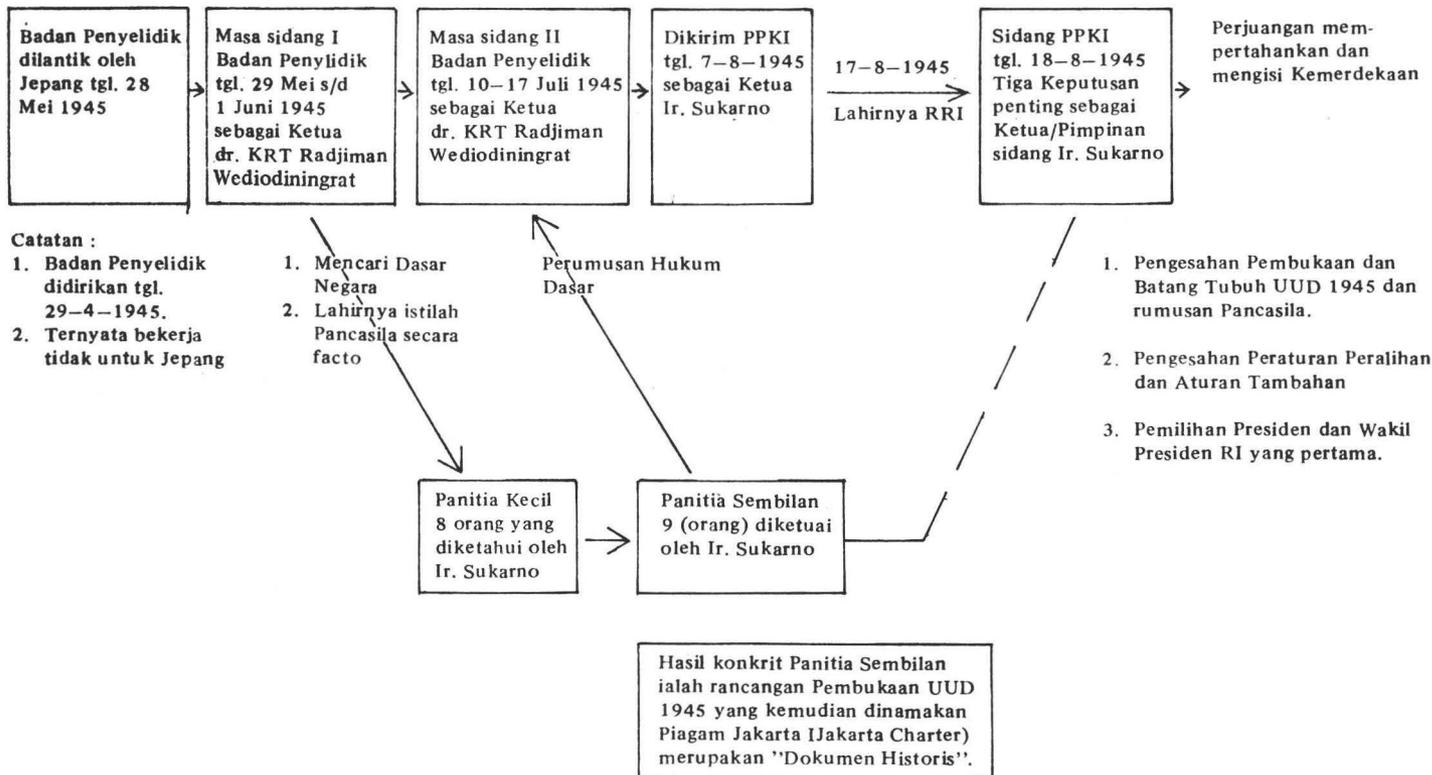
“Memandang perlu membicarakan beberapa pihak dulu, karena tidak semua anggota mengeluarkan pikirannya dalam Rapat Besar, sedang usul-usul yang disampaikan Zimukyokuu juga mengandung hal-hal yang belum diucapkan dalam rapat Besar seperti: Unitarisne atau tidak, badan perwakilan atau badan lain, kebangsaan atau tidak, kerakyatan politik saja atau juga ekonomis, Kepala Negara: seorang saja atau beberapa orang (direktorium). Mengusulkan supaya merancang satu pernyataan kemerdekaan, ditambah dengan sikap terhadap peperangan Asia Timur Raya dan keanggotaan dalam Asia Timur Raya. Berkeberatan, jika hanya dimasukkan hal-hal yang bisa dijalankan pada masa perang. Juga hal-hal yang walaupun belum bisa dijalankan, sebaiknya dimasukkan pula, walaupun hanya dalam pokok”.<sup>3</sup>

Sidang Badan Penyelidik yang pertama yang berlangsung selama 4 hari dan 5 hari dengan pelantikannya, yaitu sebagai berikut : Tanggal 28 Mei 1945 pelantikan anggota-anggota badan penyelidik. Sedang sidang pertama berlangsung dari tanggal 29, 30, 31 Mei dan 1 Juni 1945 selama 4 hari. Sedang sidang badan penyelidik kedua berlangsung dari tanggal 10-17 Juli 1945, berarti berlangsung selama delapan hari.

Hasil sidang badan penyelidik pertama lahirnya 32 soal golongan usul yang diperkecil menjadi 9 golongan usul. Kesembilan golongan usul diolah oleh panitia kecil yang beranggota-

kan delapan orang. Kemudian diolah oleh Panitia Sembilan, yang akhirnya menelurkan Perumusan Hukum Dasar, yang akan diolah oleh Sidang badan penyelidik kedua yang berlangsung dari tanggal 10–17 Juli 1945. Lebih lengkap dapat diperhatikan bagan lahirnya Proklamasi dan UUD 1945.

## PROSES LAHIRNYA PROKLAMASI DAN UUD 1945



## 6.2 Mengabdikan dan Mengisi Kemerdekaan

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan di dalam negeri dan di luar negeri. Presiden dan Wakil Presiden sibuk dengan tugas-tugas selanjutnya.

Komite Nasional Indonesia (KNI) pun berdiri bersama Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang akan memimpin revolusi di daerah-daerah. KNI sebagai pusat tenaga pimpinan rakyat dan BKR sebagai tentaranya. KNI dan BKR ini, *de facto* menjadi suatu alat revolusi yang menyelenggarakan perebutan kekuasaan militer dan sipil dari tangan Jepang, baik dengan jalan kekerasan maupun diplomasi perundingan setempat-setempat. KNI dan BKR daerah-daerah ini, lain dari pada di pusat menjadi organisasi yang tertinggi pada waktu itu.

Dalam hari-hari berikutnya sesudah rapat tanggal 22 Agustus 1945 tersebut tadi, maka Sukarno-Hatta mengadakan perundingan dengan pemuka-pemuka dengan berbagai golongan dan lapisan masyarakat di ibukota untuk mengangkat anggota KNI pusat. KNI pusat tersebut sudah dapat dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Koni di Pasar Baru Jakarta.

Pada waktu itu rapat memilih pimpinan Pusat Komite Nasional Indonesia (KNIP) sebagai berikut :

- Mr. Kasman Singodimejo: Ketua Eksekutif Komite sebagai  
Ketua Pusat Komite Nasional
- Mas Sutaryo : Sebagai Wakil Ketua I
- Mr. Latuharhary : Sebagai Wakil Ketua II
- Adam Malik : Sebagai Wakil Ketua III

Sukarno-Hatta meneruskan usahanya menyusun pucuk pimpinan negara baru pada tanggal 29 Agustus 1945 diselesaikan pengangkatan-pengangkatan menteri, gubernur, dan sebagainya, tetapi baru diumumkan pada tanggal 20 Oktober 1945.

Susunan anggota kabinet yang pertama itu adalah sebagai berikut :

1. R.A.A. Wiranatakusumah – Menteri Dalam Negeri
2. Mr. Akhmad Subarjo – Menteri Luar Negeri

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 3. Prof. Mr. Supomo         | – Menteri Kehakiman   |
| 4. R.P. Surakhman           | – Menteri Kemakmuran  |
| 5. dr. Samsi                | – Menteri Keuangan    |
| 6. R. Buntaran              | – Menteri Kesehatan   |
| 7. Ki Hajar Dewantara       | – Menteri Pengajaran  |
| 8. Mr. Iwa Kusumasumantri   | – Menteri Sosial      |
| 9. Mr. Amir Syarifuddin     | – Menteri Penerangan  |
| 10. R. Abikusno Cokrosuyoso | – Menteri Perhubungan |
| 11. R. Oto Iskandardinata   | – Menteri Negara      |
| 12. dr. Amir                | – Menteri Negara      |
| 13. Mr. Maramis             | – Menteri Negara      |
| 14. Mr. Sartono             | – Menteri Negara      |
| 15. K.H. Wahid Hasyim       | – Menteri Negara      |

Diangkat pula :

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Suwiryo                  | – Walikota Jakarta  |
| 2. Mr. Teuku Muhammad Hasan | – Gubernur Sumatera                                       |
| 3. Sutaryo Kartohadikusumo  | – Gubernur Jawa Barat                                     |
| 4. Suroso                   | – Gubernur Jawa Tengah                                    |
| 5. S u r y o                | – Gubernur Jawa Timur                                     |
| 6. Pangaran Muhammad Noor   | – Gubernur Kalimantan                                     |
| 7. Dr. G.S.S.J. Ratulangi   | – Gubernur Sulawesi                                       |
| 8. I. Gusti Ketua Puja      | – Gubernur Kepulauan<br>Sunda Kecil (Nusat Teng-<br>gara) |
| 9. G a t o t                | – Jaksa Agung   |
| 10. A.G. Pringodigdo        | – Sekretaris Negara                                       |
| 11. Sukarjo Wiryopranoto    | – Juru Bicara   |
| 12. Kusumaatmaja            | – Ketua Mahkamah Agung                                    |
| 13. Sukamto                 | – Kepala Polisi   |

Kemudian menyusul:

- |                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Suryohadikusumo      | – Menteri Keamanan              |
| 2. Mayor Urip Sumoharjo | – Kepala Staf Umum <sup>4</sup> |

Pada bulan Juli 1948 Mr. Sartono menjadi ketua angket komisi Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP–KNIP) di sekitar peristiwa *pemogokan* Delanggu dan ditugaskan

untuk menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan Badan Tekstil Negara. Wakil Presiden Drs. Muhammad Hatta memimpin rapat penyelesaian pemogokan di Delanggu Surakarta. Hadir pula pada waktu itu Mohammad Natsir dan lain-lain.

Pada bulan Desember 1948, Mr. Sartono diangkat sebagai Ketua Misi Jasa-jasa Baik Republik Indonesia berangkat melalui Jakarta ke NIT (Negara Indonesia Timur, tetapi satu dan lain hal maksud itu tidak dapat dilaksanakan.

Setelah proklamasi kemerdekaan dan Roem Royen sekitar Mei 1949 ditandatangani Mr. Sartono menjadi penasihat umum delegasi Republik Indonesia ke Konperensi Meja Bundar di Kota Den Haag, Negeri Belanda.

Lahirnya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dan kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia berturut-turut menjadi DPR-RIS untuk selanjutnya menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Republik Indonesia (DPRS-RI).

Setelah itu menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 Presiden Sukarno setelah berunding dengan Kabinet dan Angkatan Perang membacakan Dekrit Presiden di Istana Merdeka. Dalam dekrit itu ditegaskan :

1. Dibubarkannya Konstituante
2. UUD-45 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia
3. Akan segera dibentuk MPRS, yang anggotanya terdiri atas anggota-anggota DPR, utusan-utusan daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

Sementara itu DPR-RI hasil pemilihan umum pertama masih tetap menjalankan tugasnya seperti biasa sampai dengan tahun 1960 dan ketua DPR-RI hasil pemilihan umum pertama itu tetap Mr. Sartono.

Pada tanggal 5 Maret 1960 itu juga DPR hasil pemilihan umum I dinyatakan bubar dan tidak lama kemudian presiden telah selesai menyusun daftar anggota DPR baru. Oleh Presiden

Sukarno, DPR baru itu dinamai Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Seluruh anggota DPR-GR itu ditunjuk oleh presiden, walaupun mereka mewakili golongan masing-masing Ketua DPR-GR pada waktu itu tetap Mr. Sartono. Ketiga partai besar yaitu PNI, NU dan PKI mendapat suara terbanyak. Mereka dianggap mewakili golongan nasional, agama dan komunis yang kemudian terkenal dengan NASA-KOM. Berbeda dengan DPR lama, yang anggotanya hanya terdiri dari utusan partai-partai politik, maka di dalam DPR-GR juga duduk wakil dari golongan karya termasuk TNI dan polisi, yang semenjak tahun 1959 secara formal telah tampil kemuka sebagai kekuatan sosial politik atau golongan karya.

DPR-GR ini dalam kenyataannya juga tidak dapat berfungsi sesuai dengan UUD, karena anggotanya orang yang ditunjuk oleh presiden, sehingga mereka sukar untuk tidak menyesuaikan keinginan presiden.

Lembaga Legislatif (DPR) seharusnya sejajar kedudukannya dengan presiden menurut UUD 1945. Tetapi dalam kenyataannya kedudukan jauh lebih rendah dari presiden. Bahkan Ketua DPR-GR pun diangkat menjadi menteri sehingga dengan demikian ia menjadi pembantu Presiden, artinya di bawah presiden.

Tindakan presiden tidak terbatas sampai bidang legislatif saja, melainkan juga meliputi bidang yudikatif (kehakiman). ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung juga diangkat menja-

di menteri, padahal kedua jabatan itu menurut sistem trias politica harus bebas dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dengan demikian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif telah ditempatkan di bawah presiden.

Dalam sistem Demokrasi Terpimpin partai-partai politik pada umumnya tidak diberi tempat dalam percaturan politik parlementer. Bahkan DPR-GR itu sebagai lembaga demokrasi tidak begitu dihiraukan.

Beberapa partai politik menyatakan bahwa kebijaksanaan presiden membubarkan DPR hasil pemilihan umum serta tindakan untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR—GR) adalah tidak tepat. Hal itu dapat menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat dan memungkinkan terjadinya hal-hal tidak diinginkan. Juga ikut menentang kebijaksanaan presiden teman lamanya dalam PNI yaitu Mr. Sartono.

Mr. Sartono adalah penganut demokrasi yang begitu tangguh, bangsawan yang berjiwa kerakyatan yang selalu merakyat, secara tidak langsung ia tidak dapat menerimanya tindakan kebijaksanaan presiden itu yang seolah-olah telah mengenyamping demokrasi. Oleh sebab itu pulalah pada tahun 1960 Mr. Sartono mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua DPR—GR Republik Indonesia. Kemudian ketua DPR—GR yang baru pengganti Mr. Sartono secara aklamasi terpilih kiai Haji Zainul Arifin dari NU.

Demikian Mr. Sartono sebagai pejabat negara, penganut demokrasi yang tangguh, bangsawan yang berjiwa kerakyatan dan selalu merakyat dalam tindak tanduknya, tetap mempunyai prinsip sesuai dengan kehendak rakyat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## CATATAN BAB VI

1. *Persatuan Indonesia No. 40 Tahun ke III* (Jakarta tanggal 10 Pebruari 1930).
2. Bambang Sularto, *Wage Rudolf Supratman*, (Jakarta Dep. P dan K, PUSPSB, Proyek IDSN, 1980/1981), hal. 138–139.
3. Prof. Mr. Haji Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, jilid pertama, (Jakarta: Penerbit Yayasan Prapanca, 1959), hal. 258, 258 dan 260.
4. dr. AH. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, jilid I Proklamasi, (Bandung Penerbit Angkasa 1977) hal. 244–245.

## PENUTUP

Mr. Sartono adalah orang pendiam, tetapi disenangi oleh pihak lawan dan kawan. Ia lincah dalam bertindak dan berbuat dibidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Mr. Sartono adalah penganut demokrasi kerakyatan yang mempunyai pendirian yang susah untuk ditumbangkan maupun digoyahkan oleh siapa sekalipun. Apalagi hal-hal yang berlawanan dengan peraturan dan perundang-undangan.

Mr. Sartono di samping pendiam, lincah, penganut demokrasi kerakyatan, juga berani dan cukup diplomatis. Ia berani membela perkara politik di tengah-tengah cengkraman penjajah yang cukup ganas dan mempunyai perikemanusiaan. Sebagai pengacara tidak bosan-bosannya membela perkara orang kena fitnah dan hasutan yang tidak menentu, apakah datangnya dari rakyat sendiri maupun dari pihak penjajah Belanda sendiri.

Dalam mendirikan partai, hari ini PNI dibubarkan besok didirikannya Partindo dengan azas dan tujuan hampir tidak ada perbedaannya.

Sebagai pimpinan Fonds Nasional PPPKI sangat banyak menolong rakyat yang teraniaya dan selalu siap membantu pelajar dan mahasiswa yang kekurangan biaya dalam meneruskan Studinya.

Pengabdianya dan sebagai pejabat negara selalu menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan konsekuen. Jauh dari sifat ambisi pribadi, tetapi cukup banyak toleransi dan partisipasi terhadap sesama teman seperjuangan maupun terhadap kepentingan rakyat banyak.

Di bawah ini dilampirkan biografi singkat dari Mr. Sartono.

1. Nama : Mr. Sartono (almarhum)
2. Tanggal/tempat lahir : 5 Agustus 1900 di Wonogiri Surakarta (Jawa Tengah).
3. Alamat keluarga : Jln. Agus Salim No. 78 Jakarta Pusat.
4. Agama : Islam
5. Isterinya : Bu Sartono masih ada di alamat di atas.
6. Anaknya : Masih ada dua orang di luar negeri.
7. Ayahnya : Raden Mas Martadiharyo (pegawai Pemerintah Mangkunegaran Surakarta) keturunan Mangkunegaran II Surakarta.
8. I b u : Keturunan Mangkunegoro III Surakarta.
9. Pendidikan : – ELS 1906–1913  
– MULO, 1913–1916  
– Rechts School, 1916–1912  
– Universitas Leiden 1922-1925
10. Organisasi : – Perhimpunan Indonesia (PI) di Negeri Belanda sebagai anggota dan komisar. dan komisaris.  
– PNI  
– Salah seorang pendiri tanggal 4 Juli 1927.  
– Wakil ketua dan ketua harian.

- Surat kabar Persatuan Indonesia sebagai administrasi.
  - Fonds Nasional PPPKI sebagai voorzitter, 26–12–1929.
  - Pendiri Perguruan Rakyat Jakarta Desember 1928.
  - Membubarkan PNI pada tanggal 25 April 1931.
  - Partindo :
    - Mendirikan Partindo pada tanggal 26 April 1931 dengan azas dan tujuan 95% sama dengan PNI.
    - Mula-mula sebagai ketua, kemudian sebagai wakil ketua (ketua dipegang oleh Ir. Sukarno).
  - Gerindo :
    - Salah seorang pendiri pada tahun 1937 setelah Partindo dibubarkan.
    - Sebagai wakil ketua (ketua Mr. Amir Syarifuddin).
11. Pekerjaan :
- Pegawai Negeri Hindia Belanda hanya enam bulan.
  - Advokat, 1925–1928 di Bandung dan Jakarta.
  - Tahun 1930 bertindak sebagai salah satu pembela perkara PNI cq di antaranya proses perkara Bung Karno.
  - Pada zaman Pemerintah Hindia Belanda dan Jepang (1940–1943) berwiraswasta dalam lapangan ekonomi yaitu koeprasi membantu gerakan karet di Leuwiliang dan berhasil mendirikan 12 buah koperasi karet dan 12 buah pabrik karet.

- Tahun 1945 menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, akhirnya anggota Panitia Rancangan UUD yang diketuai oleh Ir. Sukarno.
- Dalam kabinet pertama yang dibentuk pada tanggal 29 Agustus 1945 dan baru diumumkan pada tanggal 20 Oktober 1945 menjadi: menteri negara.
- Dalam tahun 1948 menjadi ketua angket Komisi BP–KNIP di sekitar peristiwa pemogokkan Delanggu Surakarta dan ditugaskan untuk menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan Badan Tekstil Negara.
- Desember 1948 diangkat sebagai Ketua Misi Jasa-jasa baik ke NIT, tetapi maksud itu tak dapat dilaksanakan.
- Setelah proklamasi kemerdekaan dan Roem Royen ditandatangani, sekitar Mei 1949, menjadi penasehat umum delegasi RI ke Konperensi Meja Bundar di Den Haag, negeri Belanda.
- Lahirnya negara RIS dan kemudian Negara kesatuan RI berturut-turut menjadi DPR–RIS untuk selanjutnya menjadi ketua DPRS–RI. Setelah itu menjadi ketua DPR–RI dan DPR–GR RI.
- Sekitar tanggal 5 Maret 1960 mengundurkan diri dari sebagai Ketua DPR–GR RI.
- Pernah menjabat presiden selama dua kali.

## DAFTAR SUMBER

### A. BUKU

- Abdulgani, Ruslan, Dr. H., *The Bandung Connection Konperensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955*, (Jakarta: Gunung Agung 1980).
- *Resapkan dan amalkan Pancasila*, (Jakarta: BP. Prapanca).
- *Sosialisme Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Prapanca 1965).
- , *Persatuan dan Kesatuan Bangsa Dalam Hubungan Dengan Semangat Dan Jiwa Kepahlawanan*, Prasaran untuk Rapat Pengarahan Proyek Biografi Pahlawan Nasional, (Cobogo, Bogor, 1977).
- Adams, Cindy, *Sukarno autobiography as told to Cindy Adam*, (Jakarta: Gunung Agung (HK), 1966), Second Printing.
- Ahmad Subardjo, *Lahirnya Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Kinta 1977).
- , *Kesadaran Nasional sebuah Otobiografi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1978).
- AH. Nasution, Jenderal, *Dr. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia* sebelas jilid, (Bandung: Angkasa, 1977).
- AK-Pringodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, (Jakarta: PT Kinta, 1974).

- Ali Murtopo, *Strategi Politik Nasional*, (Jakarta: CSIS, cetakan kedua, 1974).
- Anshari, Endang Saifuddin, H, MA, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, (Bandung: Pustaka-Perpustakaan Salman ITB 1981).
- Anhar Gonggong, Drs. *HOS Cokroaminoto*, (Jakarta: Dep. P dan K, Proyek BPN, 1975).
- Anhar Gonggong, Drs. *Muhammad Husni Thamrin*, (Jakarta: Dep. P. dan K, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek IDSN, 1981/1982).
- Badan Pembina Pahlawan Pusat, *Pahlawan Pembela Kemerdekaan*, (Jakarta: Depsos RI, 1972).
- Bambang Sularto, *Wage Rudolf Supratman*, (Jakarta: Dep. P dan K, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek IDSN, 1980/1981).
- Empat puluh lima tahun, *Sumpah Pemuda*, (Jakarta: Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah, 1974).
- Garoeda Gentayoe, *Sejarah Pergerakan Indonesia 1929–1930: Berisi Surat tuduhan dan Pembelaan Perkara PNI oleh Mr. Sartono, Mr. Sastromulyono dan R. Idih Prawiradiputra*, (Jakarta: Fonds Nasional PPPKI tanpa tahun).
- , *Sejarah Pergerakan Indonesia 1929–1930*, jilid I, (Jakarta: Fonds Nasional PPPKI, Desember 1930).
- , *Sejarah Pergerakan Indonesia 1929–1930*, jilid II, (Jakarta: Fonds Nasional PPPKI, 1930).
- , *Sejarah Pergerakan Indonesia 1929–1930*, jilid III, Berisi Pembelaan Ir. Sukarno dimuka Landraad Bandung, (Jakarta: Fonds Nasional PPPKI, 1930).
- Gedonkbbdek HIK, *Tujuh Puluh Lima Tahun HIK Bandung*, (Bandung: Volkslectuur, 1866–1941).
- Giovani Sitohang, SH, Drs. J.S. dkk, *Suka dan duka seorang pejuang kemerdekaan Angkatan 1928–1945 Prof. Mr. Sunario*, (Jakarta: Penerbit Mrs ) 26, 1982).
- Gunung Mulia, TSG, *Ensiklopedia Indonesia, W–Z* (Bandung: W. Van Hoeve, Bandung's Gravenhage).

- Hatta Muhammad, Drs. *Kumpulan Karangan*, (Jakarta—Surabaya, Balai Buku Indonesia, 1953).
- , *Berpartisipasi Dalam Perjuangan Kemerdekaan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1976).
- Hatta Muhammad, Drs. *Menuju Negara Hukum*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1975).
- , *Mamoi*, (Jakarta: Tintamas, 1978).
- , *Peranan Pemuda Menuju Indonesia Merdeka Indonesia Adil Makmur* (Bandung: Angkasa, 1966).
- , *Indonesia Merdeka*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- Ism aun, Drs. *Tinjauan Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*, (Bandung : Carya Remaja, 1970)
- Iwa Kusuma Sumantri, Pof. sh, *Sejarah Revolusi Indonesia II*, (Jakarta: Grafika).
- Kahin George Mc. Turnan, *Nationalism And Revolution Indonesia*, (Ithaca and London : Cornell University Press, 1970).
- Kansil CST. Drs. SH. *Pancasila dan UUD 1945 Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1973).
- Kemp en RI, *Detik dan Peristiwa, 17 Agustus 1945—25 Januari 1950*, (Jakarta : Kemp en, 1950).
- , *Kabinet-Kabinet RI II*, (Jakarta: Percetakan Negara 243/B—'58).
- , *Kepartaian di Indonesia*, (Jakarta: Kemp en, 1951).
- Kartodirdjo, Sartono dkk, *Sejarah Nasional Indonesia*, enam jilid edisi kedua, (Jakarta: Dep. P dan K, Balai Pustaka, 1977).
- Loirissa, Drs. *Biografi*, Prasaran untuk Rapat Pengarahan Proyek Biografi Pahlawan Nasional, (Cobogo—Bogor: Proyek BPN, 1976).
- Malenan, Drs. R. *Arnold Mononutu—potret seorang patriot* (Jakarta: Gunung Agung, 1981).
- , *Proses Lahirnya Pancasila*, (Jakarta: LPSN—UNTAG 1979).

- , *Iskaq Tjorohadisuryo, Alumni Desa Bersemangat Banteng*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982).
- Notosusanto, Nugroho, *Tentara Peta pada jaman pendudukan Jepang di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1979).
- Onghokham, Dr. *Biografi dan Sejarah*, Prasaran untuk Rapat Proyek Biografi Pahlawan Nasional (Cibogo-Bogor, 1977).
- Raliby, Osman, *Documents Historica*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1963).
- Salam Solichin, *Bung Karno dalam Kenangan*, (Jakarta: Penerbit Pustaka, 1981).
- , *Bung Karno Putera Fajar*, (Jakarta : Gunung Agung 1981).
- Sartono. Mr. *Menoleh ke belakang dan meninjau ke depan*, pidato Ketua DPRS, 17-8-1952. (Jakarta: Kempen RI, 1952).
- , *11 Tahun Proklamasi. . . . . Pidato Ketua Perlemen Menyambut Hari Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1956*, (Jakarta: Kempen RI, 1956).
- , *Juga keutuhan Negara dan Bangsa Setialah kepada Proklamasi 17 Agustus 1945*, (Jakarta: Kempen RI. 1958).
- Sukaro Ir, *Dibawah Bendera Revolusi*, daa jilid, (Jakarta: Panitia Dibawah Bendera Revolusi, 1964).
- , *Kepada Bangsaku*, (Jakarta: Panitia Pembina Jiwa Revolusi, 1963).
- Susanto Tirtoprojo, SH, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT Pembangunan, 1980).
- Suratmin, Drs. *Dr. Sutomo*, (Jakarta: Dep. P dan K, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Poryek IDSN, 1982/1983).
- Sunario, Prof. Mr. *PNI dan Perjuangannya*, (Jakarta: DPP-PNI, 1972).
- Subagio IN, *Sudiro, Pejuang tanpa Lensi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1981).

Slamet Mulyana, Prof. Dr, *Nasionalisme sebagai modal perjuangan Bangsa Indonesia, I dan II*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 1981).

Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta, *Bunga Rampai Sumpah Pemuda*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1978).

Yamin Muhammad, Prof. Mr. H. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Yayasan Penerbit Prapanca, 1959).

#### B. MAJALAH/KORAN

Darmokondo, 25-5-1928, 31-5-1928, Jili 1928, 24-5-1929.

Timbul, Surakarta, 30-12-1929.

Persatuan Indonesia Th. I, 1-9-1928.

Persatuan Indonesia

Th. III. No. 37, tgl. 10-1-1930

No. 38 dan 39, tgl. 20, 30-1-1930

No. 40, tgl. 10-2-1930

No. 48, tgl. 30-4-1930

No. 60-61 tgl. 30-8 dan 10-9-1930

No. 62-63 20 dan 30 September 1930

No. 65-66 20 dan 30 Oktober 1930

No. 72, 30 Desember 1930

Th. IV No. 73, 10-1-1931

No. 78, 28-2-1931

No. 81, 30-3-1931

No. 84, 30-4-1931

No. 87, 30-5-1931

No. 88, 10-6-1931

No. 89, 17-6-1931

No. 92, 8-7-1931

No. 94, 22-7-1931

No. 99, 26-8-1931

No. 100, 2-9-1931

- No. 102, 16-9-1931  
 No. 103, 23-9-1931  
 No. 105, 7-10-1931  
 No. 106, 14-10-1931  
 No. 107, 21-10-1931  
 Th. V. No. 147, 10-8-1932  
 No. 150, 12-9-1932  
 No. 151, 21-9-1932  
 No. 157, 158, 20-30 Nopember 1932  
 No. 159, 10-12-1932  
 Th. VI No. 168, 169, 170, 10, 20 dan 30-3-1933  
 No. 179, 30-8-1933  
 No. 182, 30-9-1933  
 No. 185, 30 Nopember 1933  
 No. 186, 187 dan 188 Desember 1933  
 Majalah *Selecta*, Jakarta, 27-12-1971  
 Majalah *Karini* No. 67, Jakarta, 30 Mei - 12 Juni 1977  
 Surat kabar *Kompas*, 7-9-1979  
 14-9-1979  
 24-4-1984  
 27-4-1984

### C. INFORMAN

- Sarwoko (72 tahun), Jakarta, 18 Agustus 1983  
 Mr. Iskaq Tjorohadisuryo (88 tahun), Jakarta, 12-12-1933  
 Sudiro (73 tahun) Jakarta, 15-12-1983  
 Mr. Sunario, (82 tahun) Jakarta, 15-11-1983, 3-3-1984  
 dan 12-3-1984.  
 Mr. Natmoko (62 tahun), Jakarta, 6-3-1984.  
 Bu Sartono (73 tahun), Jakarta, 8-3-1984  
 Ny. Saryati (65 tahun), Solo, 8 Mei 1984  
 Sarwono (75 tahun), Yogyakarta, 8 Mei 1984.  
 Ceramah M. Tabrani, 26-4-1973.

